



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa visi Kabupaten Bantul adalah terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Bantul, perlu adanya *Smart City* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan yang disusun dalam *Masterplan Smart City*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan pengembangan *Smart City* Kabupaten Bantul.

2. *Smart City* adalah kota cerdas yang mengembangkan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Dokumen *Masterplan Smart City* dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - a. *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul; dan
 - b. *Review Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul.
- (2) Penyusunan Dokumen *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul bertujuan:
 - a. sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Bantul;
 - b. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Bantul;
 - c. dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Bantul;
 - d. menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* pemerintah daerah, Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
 - e. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Bantul dalam dokumen perencanaan *Bantul Smart City*;
 - f. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif; dan
 - g. menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA *MASTERPLAN*

Pasal 3

Dokumen *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul meliputi identifikasi pencapaian program kerja yang telah disusun pada dokumen *Masterplan Smart City* dimana identifikasi tersebut dilakukan untuk menilai ketercapaian, hambatan dan inisiatif perbaikan serta relevansinya dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Pasal 4

Dokumen *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul secara rinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mulai tahun 2018 sampai dengan 2023;
- (2) Pelaksanaan dan Pengembangan *Smart City* menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dengan melibatkan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2019 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

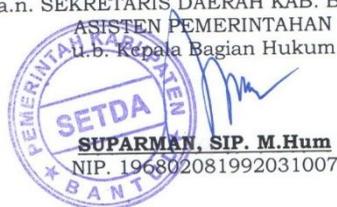
ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 93

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 93 TAHUN 2020
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN BANTUL



Master Plan Smart City Kabupaten Bantul

BUKU 2

Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Masterplan	5
1.3. Landasan Hukum.....	6
1.4. Kerangka Pikir <i>Smart City</i>	6
BAB II VISI MISI <i>SMART CITY</i>	16
2.1. Visi Smart City Kabupaten Bantul.....	16
2.2. Sasaran <i>Smart City</i> Kabupaten Bantul	16
BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	17
3.1. Smart Governance	17
3.2. Smart Branding	18
3.3. Smart Economy	19
3.4. Smart Living.....	20
3.5. Smart Society	21
3.6. Smart Environment	22
BAB IV RENCANA AKSI <i>SMART CITY</i> KABUPATEN BANTUL	23
4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan <i>Smart City</i>	23
4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung <i>Smart City</i>	26
4.2.1. <i>Data Center</i> (Pusat Data).....	26
4.2.2. Jaringan	27
4.2.3. Pusat Kendali Jaringan & Data.....	28
4.2.4. Pusat Kendali Operasi (Operation Control Center).....	28
4.2.5. Disaster Recovery Center	28
4.3. Rencana Pengembangan Perangkat Lunak <i>Smart City</i>	29
4.4.1. Standar Arsitektur	29
4.4.2. Klasifikasi Perangkat Lunak <i>Smart City</i>	30
4.4. Tahapan pengembangan.....	34
4.5.1. Prioritas Pengembangan	34
4.5.2. Pola Ketergantungan Antar Sistem	34
4.5. Rencana Penguatan Literasi <i>Smart City</i>	35
BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	36
5.1. Dimensi Kebijakan.....	37
5.2. Dimensi Kelembagaan.....	37

5.3.	Dimensi Infrastruktur Jaringan	38
5.4.	Dimensi Aplikasi / Sistem Informasi	38
5.5.	Dimensi Perencanaan	39
5.6.	Peta Strategis Program Kerja Smart City	40
5.7.	PETA JALAN SMART CITY	61
5.8.	QUICK WIN SMART CITY	95
BAB VI PENUTUP		96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekomendasi Suprastruktur <i>Smart City</i> Bantul.....	23
Tabel 2 Peta Strategis Program Kerja Smart City	40
Tabel 3 Peta Jalan Smart City	61
Tabel 4 Quick Win Smart City	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Elemen <i>Smart Readiness</i>	8
Gambar 2 Dimensi <i>Smart City</i>	8
Gambar 3 <i>Smart Governance</i>	9
Gambar 4 <i>Smart Branding</i>	11
Gambar 5 <i>Smart Economy</i>	12
Gambar 6 <i>Smart living</i>	13
Gambar 7 <i>Smart Economy</i>	14
Gambar 8 <i>Smart Environment</i>	15
Gambar 9 Komponen Infrastruktur	26
Gambar 10 Kerangka arsitektur perangkat lunak <i>Smart City</i> Kab. Bantul.....	29
Gambar 11 Pola Ketergantungan Antar Sistem	35

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena kepada kita masih diberikan nikmat kesehatan, untuk melanjutkan karya dan pengabdian kita kepada masyarakat serta kepada bangsa dan negara tercinta.

Atas nama pemerintah kabupaten Bantul kami mengucapkan terima kasih kepada tim pembimbing smart city Kabupaten Bantul, tim pendamping, dewan smart city, tim pelaksana, serta seluruh pihak yang selama ini turut serta dalam menyusun masterplan smart city di Kabupaten Bantul. Konsep masterplan Bantul smart city akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari proses pembangunan yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera.

Smart city harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta *sustainability* pembangunan daerah kita melalui penggunaan teknologi, terutama teknologi digital, dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai ujung tombaknya.

Semoga kita dapat berproses bersama, menjadikan peradaban pemerintahan dan masyarakat Bantul akan lebih maju dan mapan, tanpa tersesat jalan. Karena pada akhirnya, smart city bukanlah hanya sekedar soal infrastruktur dan teknologinya, tetapi pada warga masyarakatnya yang cerdas dan bijaksana.

Bantul, 5 November 2018
BUPATI BANTUL

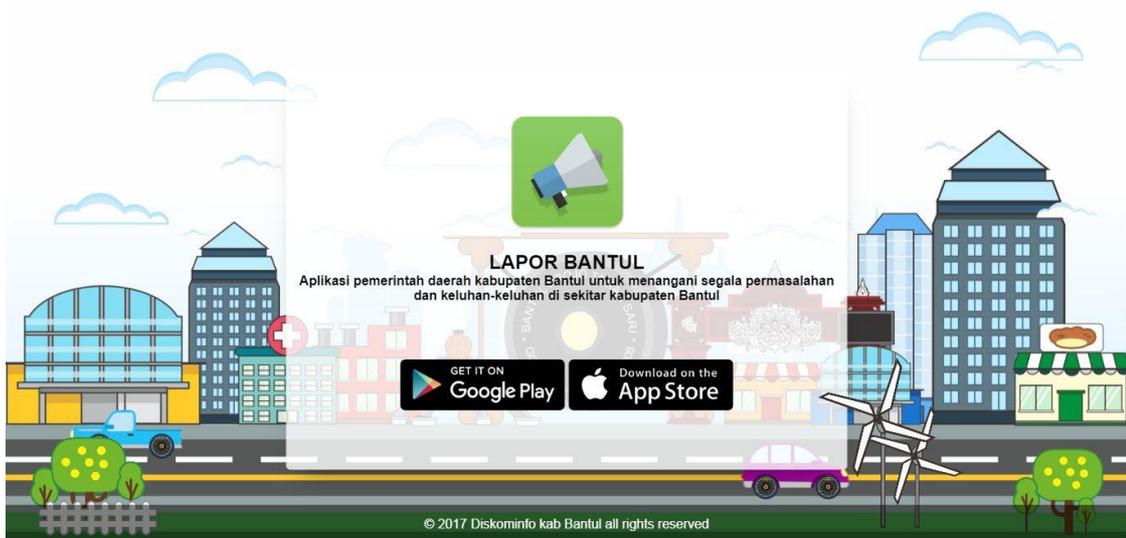
DRS.H. SUHARSONO

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, untuk disebut sebagai kota besar dan makmur, kota-kota di seluruh dunia memiliki standar dan kualitas yang baik di berbagai sektor kegiatan serta kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan kombinasi antara perencanaan kota, peningkatan kualitas tata pemerintahan, teknologi yang inovatif, masyarakat yang lebih sejahtera dan bisnis yang berkembang untuk menghasilkan apa yang dikenal sebagai *Smart City*.

Untuk mencapai predikat *Smart City* diperlukan pengembangan infrastruktur yang cerdas dan penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang akan berguna bagi pemerintah, masyarakat dan pebisnis lokal.

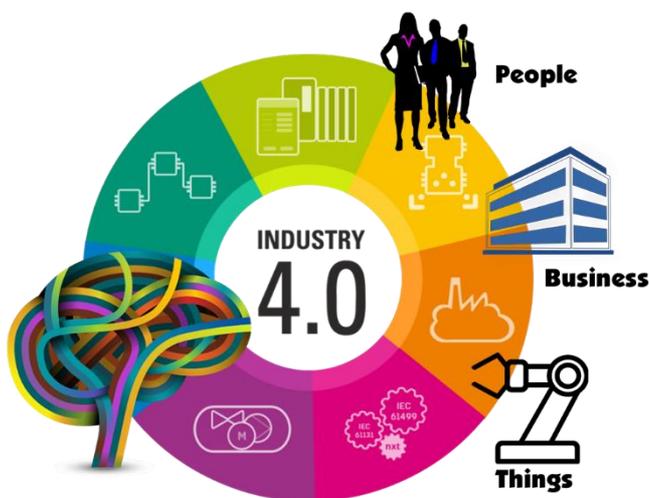


Menjadi *Smart City* juga berarti harus terus berinovasi dan berkembang dengan cara yang lebih baik. Selain investasi modal, diperlukan metode yang inovatif dan efisien dalam menemukan kebutuhan masyarakat yang tinggal, bekerja, atau bahkan hanya mengunjungi Kabupaten Bantul.

Dalam era teknologi seperti sekarang ini, diperlukan pendekatan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi yang inovatif dan smart infrastruktur. Perlu dipahami, apabila perubahan tersebut baik, perlu kita meningkatkan standar dan kualitas daripada tetap mempertahankan pendekatan tradisional.

Tren persaingan dunia sudah bergeser dari sekedar membangun daya saing nasional atau negara menuju daya saing kota atau daerah. Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Denpasar, Makassar dan lain-lain, bersaing dengan Kota Singapura, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Osaka, Seoul, Tokyo, Mumbai dan lain-lain untuk menjadi pilihan masyarakat global dalam melakukan aktifitas investasi, perdagangan, wisata, kemitraan dan lain-lain. Pada saat yang sama masyarakat di suatu daerah semakin berharap akan lingkungan tempat tinggal yang layak (*livable*), inovatif dan berkelanjutan (*sustainable*). Tuntutan sebuah kota atau lingkungan yang nyaman, aman, sehat, mudah, dan berkemakmuran menjadi indikator kota yang berdaya-saing.

Pada saat yang sama, tren revolusi digital secara drastis telah mengubah cara hidup dan bahkan masa depan peradaban umat manusia. Gerd Leonhard menggambarkan bahwa gerakan digitalisasi telah membawa perubahan yang bersifat tidak hanya eksponensial tetapi juga kombinatorial. Mengantarkan manusia ke era dimana perubahan yang terjadi pada peradaban manusia untuk 20 tahun ke depan akan mengalahkan perubahan yang pernah terjadi sejak tiga ratus tahun yang lalu.



Salah satu fenomena perubahan yang bisa kita amati adalah terjadinya akselerasi proses urbanisasi di seluruh dunia. Pada tahun 2014, sebuah studi oleh PBB tentang tren urbanisasi dunia menunjukkan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia, lebih dari setengah populasi manusia (54%) hidup di

daerah urban. Sebagai gambaran pada tahun 1950 jumlah populasi urban dunia hanya 30%.

Tren urbanisasi ini akan terus berlanjut dan diperkirakan pada tahun 2050 populasi urban akan mencapai angka 66% dari seluruh populasi dunia. Di Indonesia sendiri populasi urban telah mencapai 53.3% di tahun 2015 (BPS RI) dan berdasarkan penelitian oleh Citiasia Center for Smartnation (CCSN) jumlah ini akan meningkat menjadi 68% di tahun 2035.

Digitalisasi juga telah memperluas arti dari urbanisasi itu sendiri. Terminologi urbanisasi lahir pertamakali pada masa revolusi industri, ketika kehidupan berubah dari pola

ekonomi pertanian ke pola ekonomi industri (manufaktur). Warga desa berbondong-bondong berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja di pabrik-pabrik sebagai kesempatan baru yang muncul terutama akibat ditemukannya konsep mesin uap, mekanisasi, dan elektrifikasi. Pada masa ini batas-batas dimensi fisik sangat jelas terlihat. Hal ini sangat kontras dengan apa yang terjadi pada masa kini, dalam dunia digital batas-batas dimensi fisik begitu samar atau bahkan pada kasus-kasus tertentu batas-batas dimensi fisik ini benar-benar tidak ada. Artinya urbanisasi tidak bisa lagi diejawantahkan sebagai migrasi fisik semata. Melainkan juga migrasi gaya hidup dan interaksi socio-cultural masyarakat dari pola-pola bersifat rural ke pola yang bersifat urban.



Masyarakat urban merupakan sebuah sistem kompleks dimana aktor-aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya

pusat-pusat masyarakat yang bersifat urban akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan *Smart City* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau enabler.

Tren gerakan pembangunan kota atau daerah berbasis *Smart City* bisa kita saksikan di berbagai belahan dunia seperti Barcelona, Tokyo, London, Berlin, Amsterdam, Melbourne, Seoul, Shanghai, Mumbai, Singapura dan lain-lain. Di setiap kota di

berbagai belahan dunia tersebut memiliki kisah sukses pembanguna *Smart City* yang berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh setiap kota. Di Korea, sebuah kawasan reklamasi seluas 600 hektar dibangun dari nol sebagai sebuah *Smart City*, di Dubai menjadikan Masdar sebagai Kota yang membangun program kemandirian energi dengan energi surya dan terbarukan serta bertekad menjadi kota yang bebas emisi karbon, Amsterdam fokus pada pembangunan Smart People, Smart Energy, dan Smart Waste Management. Di Singapura, pembangunan *Smart City* langsung dikendalikan dibawah Prime Minister Office sebagai sebuah program untuk warga, pebisnis, dan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dengan memanfaatkan teknologi, ide, aplikasi, dan big data.

Namun perlu dipahami bahwa konsep *Smart City* adalah konsep yang unik dan dinamis. Inisiasi inisiasi yang muncul sebagai solusi akan permasalahan kota yang satu tidak serta merta bisa diaplikasikan sebagai solusi akan permasalahan yang muncul di kota yang lain. Hal ini terjadi karena *Smart City* menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan data analytic sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (enabling factor). Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lain. Jadi inisiasi *Smart City* yang muncul bukanlah solusi mutlak yang menutup pintu inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya panduan agar pemerintah kabupaten dan kota mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep *Smart City* dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

Proses pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang memerlukan waktu dan tidak seketika. Diperlukan komitmen dan perencanaan yang matang serta menyeluruh. Pada tahap-tahap tertentu, usaha pembangunan *Smart City* juga perlu melibatkan semua pihak di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, baik dari pihak warga, pemerintah maupun swasta. Selain untuk mewujudkan terciptanya sinkronisasi, hal ini juga dimaksudkan untuk menyamakan (alignment) pemahaman akan visi, misi, dan mempertemukan kepentingan yang berbeda dari setiap pihak serta menumbuhkan rasa kepemilikan (sense of belonging) atas rencana pembangunan *Smart City* yang diinisiasi. Dengan kata lain pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang kontinu, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen masterplan *Smart City*.

Pada dasarnya konsep *Smart City* berfokus pada pengembangan elemen manusia melalui pemanfaatan teknologi. Jadi melalui teknologi setiap elemen didorong untuk berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi-inovasi demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. Masterplan *Smart City* hadir sebagai wadah berbagai inovasi yang muncul dari proses berpikir kreatif dan identifikasi aktif. Masterplan *Smart City* memungkinkan setiap ide dapat terakomodasi ataupun memperkaya ide yang lainnya. Masterplan *Smart City* juga memastikan bahwa suatu ide tidak akan berdiri sendiri melainkan akan menjadi bagian dari suatu rencana implementasi yang terintegrasi dan komprehensif.

Masterplan *Smart City* berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan. Masterplan ini berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kota. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi,

identitas dan karakter kota, masterplan *Smart City* mempermudah pemerintah dalam mengurai masalah khas perkotaan.



Masterplan *Smart City* juga memastikan proses transformasi menuju konsep kota cerdas baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sehingga sebuah masterplan *Smart City* haruslah

memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah
2. Berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal
3. Obyektif, tepat sasaran, dan tepat guna
4. Berkesinambungan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan
5. Dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah

1.2. Tujuan Masterplan

Adapun tujuan dari disusunnya Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Bantul;
2. Sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Bantul;
3. Dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Bantul
4. Menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* pemerintah daerah, OPD lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi.
5. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Bantul dalam dokumen perencanaan *Smart City* Bantul;
6. Mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan BuBantul Bantul Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* di Kabupaten Bantul.

1.4. Kerangka Pikir *Smart City*

Kerangka pikir (*frameworks*) *Smart City* atau Daerah Pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan *Smart City*. Selain lembaga-lembaga tersebut

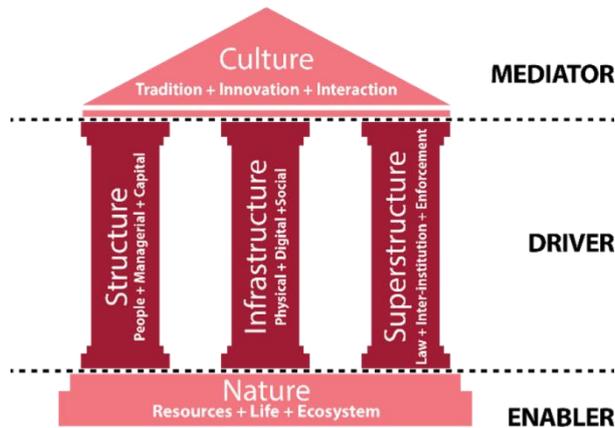
terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga *think tank* dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Istilah *smart* dalam bahasa Indonesia disebut dengan “pintar”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pandai; cakap”, “cerdik; banyak akal”, dan “mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu)” atau “cerdas” yang diartikan sebagai “sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran” dan “sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat)”. Kata “Kota Pintar” dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau “*intelligent*”. Namun demikian penggunaan kata “Kota Cerdas” juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Dalam membangun *Smart City*, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

1. **Struktur**; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
2. **Infrastruktur**; pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
3. **Suprastruktur**; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

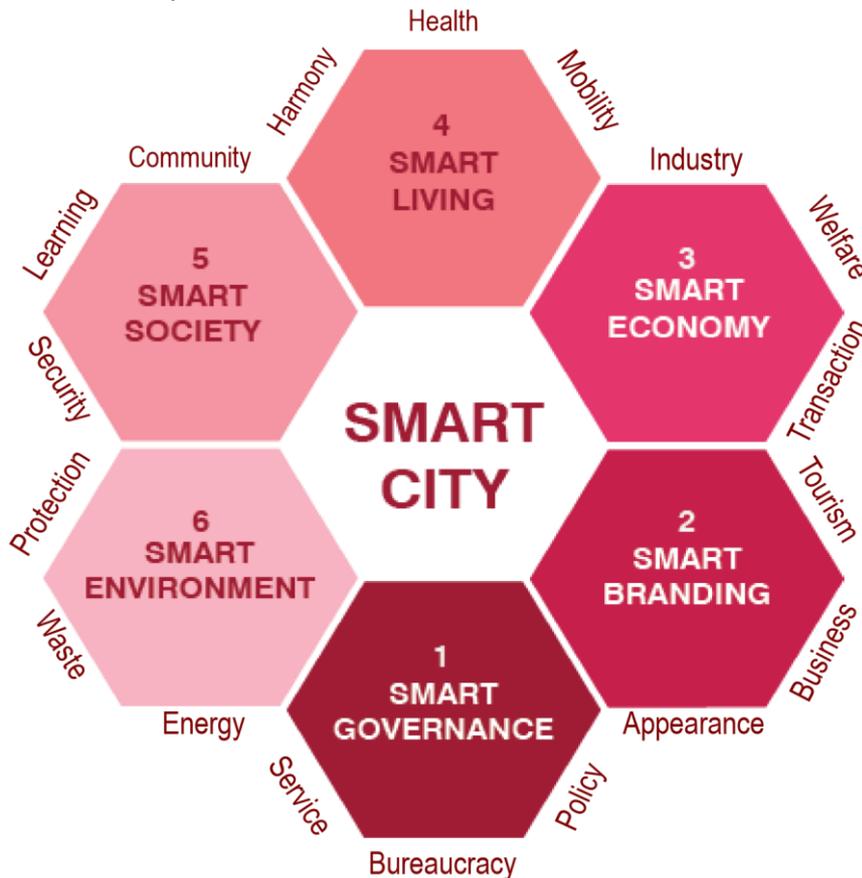
SMART CITY READINESS



Gambar 1 Elemen Smart Readiness

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah *Smart City* adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam *Smart City* itu sendiri.



Gambar 2 Dimensi Smart City

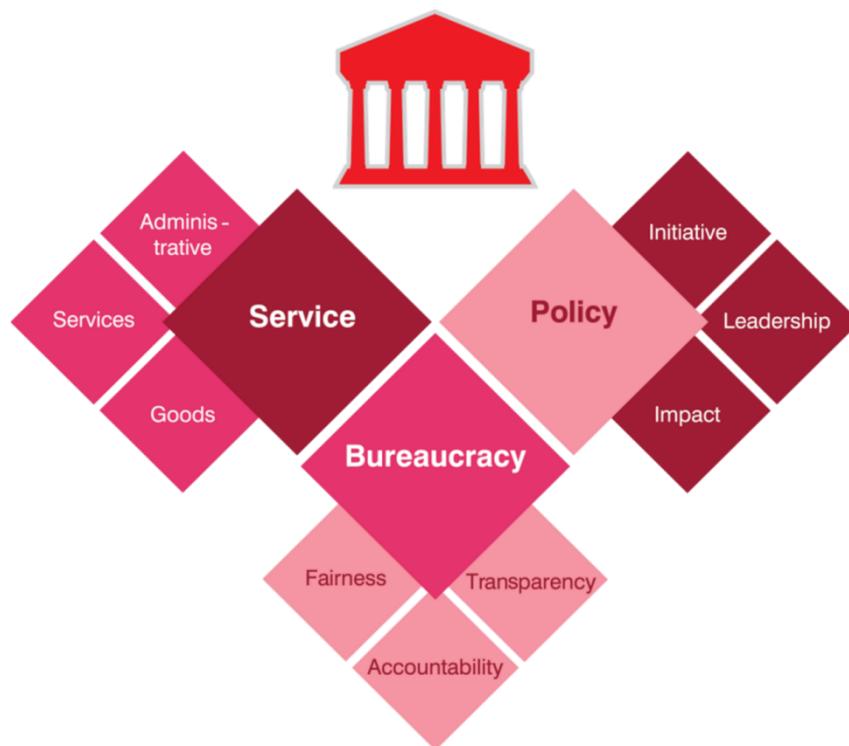
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

1. Smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

SMART GOVERNANCE



Gambar 3 Smart Governance

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

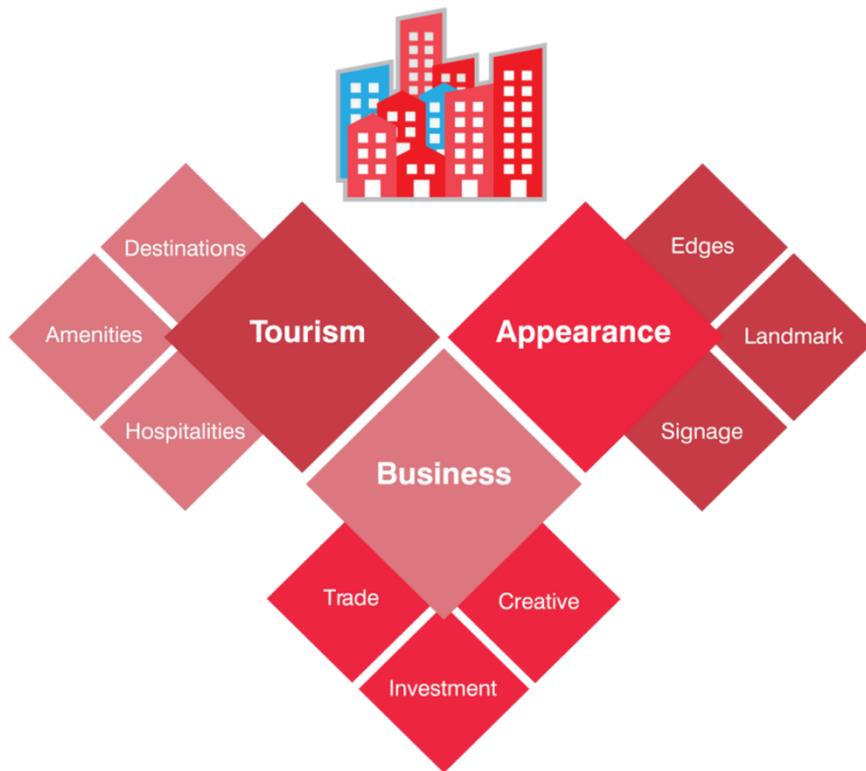
2. *Smart Branding*

Dimensi kedua dalam *Smart City* adalah *Smart Branding*, yaitu *branding* daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.

Sehingga pada dasarnya konsep *branding* daerah memiliki kemiripan dengan konsep *branding* di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam *branding* korporasi tujuannya adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada *branding* daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SMART BRANDING



Gambar 4 Smart Branding

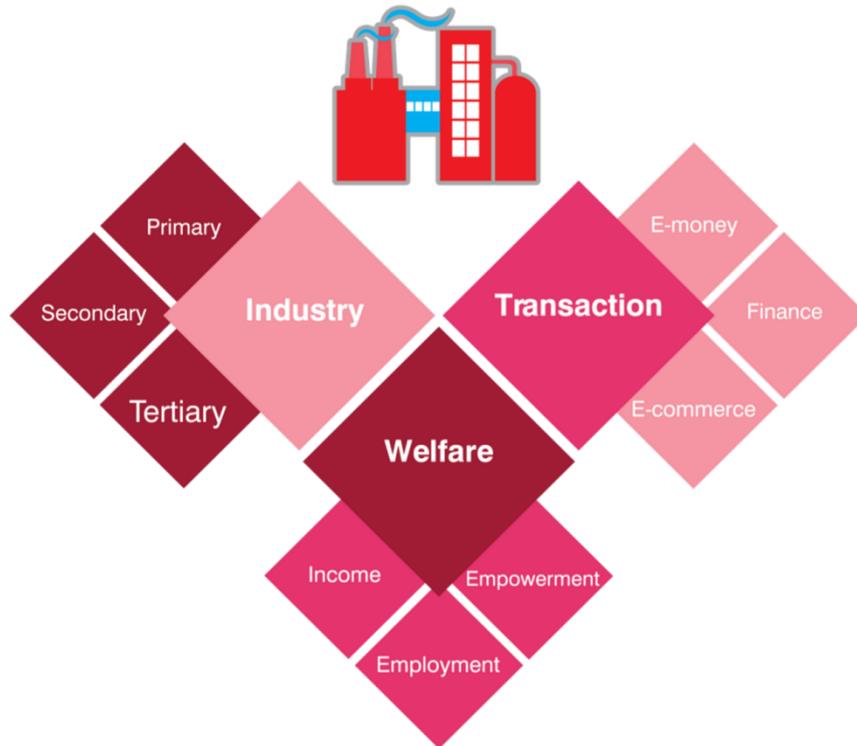
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari *Smart Branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

3. *Smart Economy*

Dimensi ketiga dalam *Smart City* adalah smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart economy dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.

SMART ECONOMY



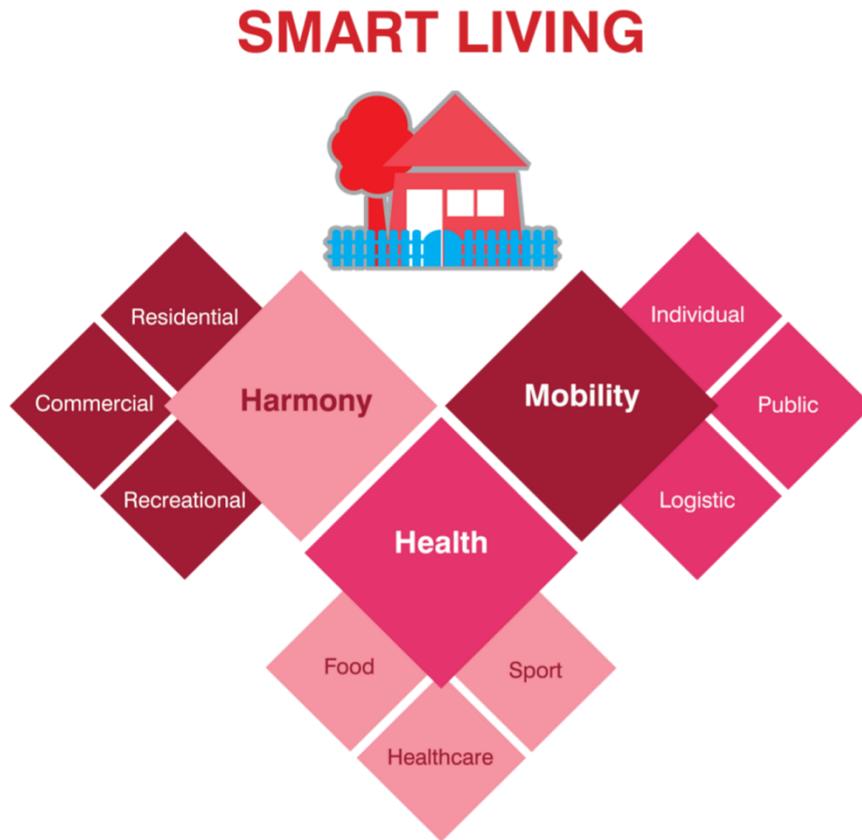
Gambar 5 Smart Economy

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari dimensi smart economy di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam smart economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

4. Smart Living

Smart Living menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*.



Gambar 6 Smart living

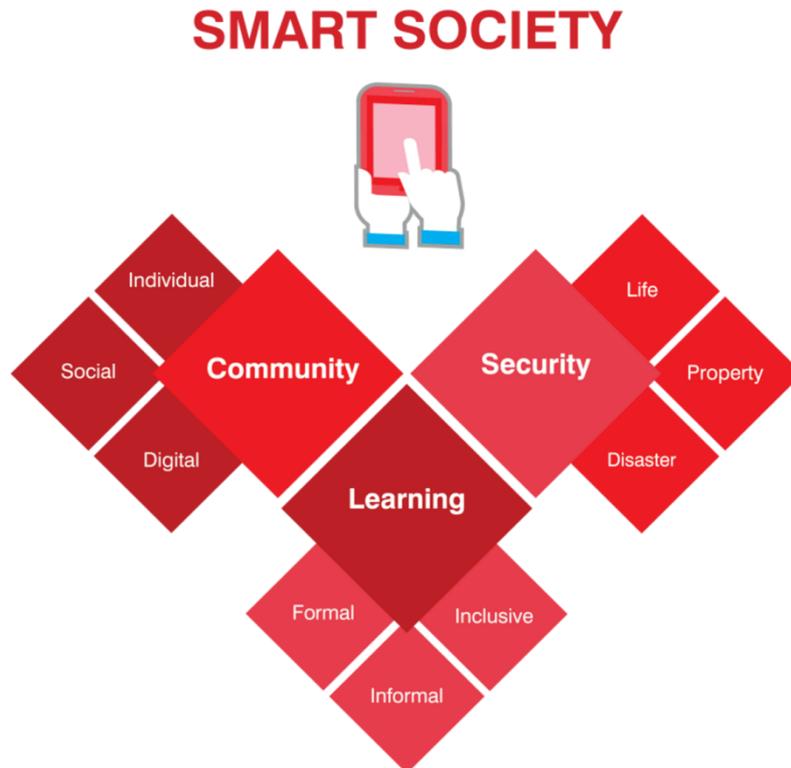
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari *Smart living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

5. *Smart Society*

Smart Society sebagai bagian dari *Smart City* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari *Smart Society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *Smart Society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).



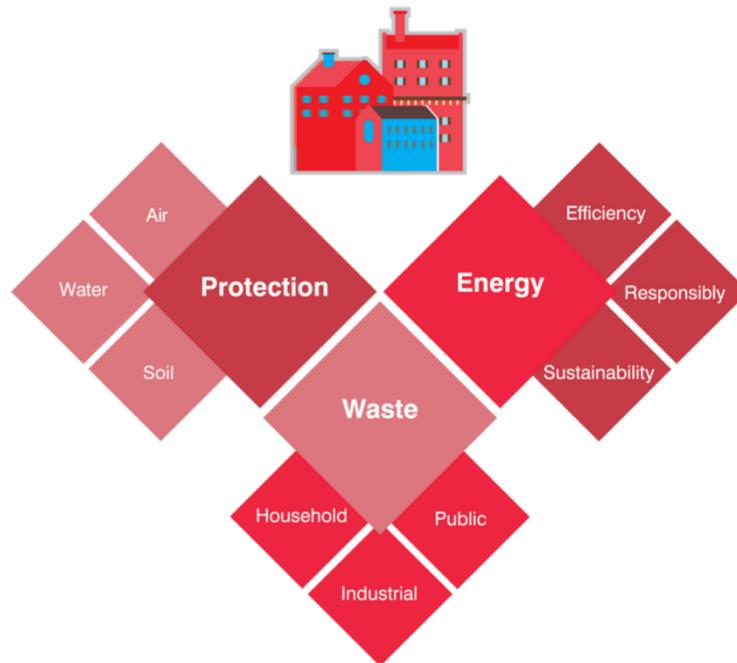
Gambar 7 Smart Economy

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

6. Smart Environment

Dimensi keenam dalam sebuah *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari *Smart Environment* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

SMART ENVIRONMENT



Gambar 8 Smart Environment

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari *Smart Environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

BAB II

VISI MISI *SMART CITY*

2.1. Visi Smart City Kabupaten Bantul

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Visi *Smart City* tersebut, kemudian dijabarkan dalam Misi Yaitu: “Mewujudkan Bantul yang berdaya saing, informatif, Komunikatif, akuntabel dan transparan didukung kolaborasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik”.

Sedangkan **tujuan** dari **capaian Misi *Smart City*** tersebut dirinci menjadi beberapa tujuan antara lain:

1. Meningkatkan **daya saing daerah** mengacu pada strategi yang sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana (RPJP, RPJMD);
2. Menumbuhkan **nilai kreatifitas dan inovasi Pemerintah Daerah** serta **masyarakat** dalam pemasaran (*marketing*) potensi daerah yang dimiliki;
3. Mewujudkan **iklim investasi daerah** yang **kondusif**;
4. Mengembangkan **potensi Wisata** dan **kearifan lokal masyarakat** sebagai komoditas **branding pemasaran wisata budaya** Kabupaten Bantul;
5. Mewujudkan **optimalisasi pelayanan publik** yang lebih **efektif dan efisien**.

2.2. Sasaran *Smart City* Kabupaten Bantul

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran *Smart City* Kabupaten Bantul adalah:

1. Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi (IT) yang memadai;
2. Peningkatan daya saing daerah bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki.
3. Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah;
4. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, dan nyaman bagi masyarakat
5. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi (IT).
6. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Bantul yang baik, dan berkelanjutan

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

3.1. *Smart Governance*

Smart Government atau pemerintahan yang cerdas adalah kunci utama dalam pembentukan Smart City. Pemerintah sebagai bagian dari fundamental sebuah negara, mempunyai tugas untuk membentuk paradigma atau pandangan kepada masyarakat tentang kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah yang pintar merupakan pemerintah yang peduli dan transparan terhadap rakyatnya, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kemauan masyarakat terhadap pemerintahnya. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah Good Governance. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum.

Beberapa tujuan dari *Smart Governance* ini yaitu:

Tujuan	Strategi
Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatkan kapasitas SDM Penyedia layanan
	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang layanan publik.
Meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi	Menyederhanakan prosedur birokrasi
	Pembuatan SOP bersama pada OPD yang memiliki pelayanan publik yang sama
	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan
	Optimalisasi Sistem/ Aplikasi Data dan informasi

3.2. *Smart Branding*

Branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya (membedakan) dari barang atau jasa pesaing. Fungsi Branding adalah untuk menanamkan image dan citranya di masyarakat, jika perusahaan/lembaga tersebut memiliki produk yang mereka buat, sehingga dengan adanya branding (merk dagang atau corporate identity) diharapkan brand atau merk mereka akan senantiasa diingat oleh masyarakat atau konsumennya dalam jangka waktu yang lama. Jadi berdasarkan hal tersebut, smart branding merupakan salah satu faktor pendukung Smart city.

Adapun tujuan dari *Smart Branding* ini adalah:

Tujuan	Strategi
Mengembangkan daya saing komoditas unggulan berbasis potensi wilayah secara berkelanjutan	Sinergisitas antara pengelolaan dan pengembangan dengan pemasaran
	Regulasi dan kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan produk unggulan
	Fasilitasi pemasaran produk-produk unggulan berbasis potensi wilayah
	Publikasi dan promosi secara <i>multi channel</i> terhadap komoditas unggulan mengacu pada potensi masing-masing
	Meningkatkan indikator akses (terhadap kegiatan publikasi dan promosi)
Membangun infrastruktur dan memasarkan pariwisata	Penyediaan infrastruktur pariwisata yang memadai
	Penyediaan jaringan transportasi penunjang pariwisata
	Pemasaran pariwisata melalui pariwisata go digital
	penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penunjang interaksi
	Penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
Integrasi pemasaran <i>offline</i> dan <i>online</i> untuk produk-produk unggulan UKM	pemasaran produk unggulan UKM secara online dan offline

	Penguatan kapasitas kelembagaan UKM dalam hal <i>marketing</i> dan manajemen bisnis
--	---

3.3. *Smart Economy*

Smart Economy maksudnya ini adalah semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Pemerintah daerah dan masyarakatnya perlu mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Ekonomi cerdas / Smart Economy yang menciptakan ekonomi berjalan baik adalah salah faktor pendukung terciptanya Smart City

Adapun tujuan dari *smart economy* ini yaitu:

Tujuan	Strategi
Penguatan komoditas unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing	Memfasilitasi pemanfaatan market place untuk produsen dan konsumen dalam memasarkan produk.
	Memfasilitasi Produsen untuk melakukan Ekspansi pasar, dalam rangka perluasan pasar untuk produk produk daerah
Menyediakan ekosistem rantai pasokan (supply chain) komoditas unggulan	Menyediakan saluran distribusi
	Meningkatkan Rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan cluster industry
	meminimalisasi Biaya operasi
Pemberdayaan petani dan masyarakat pelaku usaha mulai dari produksi hingga pemasaran komoditas-komoditas unggulan	meningkatkan pembinaan petani dan pelaku usaha

3.4. *Smart Living*

Smart Living jika diartikan dapat berarti gaya hidup cerdas, ruang lingkup dari Smart Living ini diantaranya pengelolaan kehidupan yang baik, berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri.

Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Smart living merupakan cara pandang, pola pikir yang berujung pada paradigma kecermatan, praktis, dan kreatifitas

Adapun tujuan dari *Smart living* ini yaitu:

Tujuan	Strategi
Harmonisasi tata ruang wilayah berupa Pembangunan infrastruktur fisik bagi masyarakat berbasis pendekatan spasial kewilayahan	Pembangunan perumahan di kawasan pemukiman bagi masyarakat yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang
	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan
	Pembangunan fasilitas perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
Penyediaan informasi spasial untuk masyarakat	menyiapkan informasi spasial yang dapat diakses oleh masyarakat melalui teknologi informasi yang ada
Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik	Menyiapkan jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat untuk mengakses lokasi-lokasi penting ke pusat-pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata dan lokasi strategis lainnya
	Penyediaan moda transportasi umum bagi masyarakat dipedesaan untuk mengakses lahan-lahan produktif pertanian
Peningkatan penyediaan akses terhadap layanan publik bagi masyarakat	Penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat
	Penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat;
	Penyediaan fasilitas social dan budaya tempat berkumpul bagi masyarakat

3.5. *Smart Society*

Smart Society atau masyarakat cerdas. Dalam pembangunan Smart City masyarakat memegang peranan yang penting. Mewujudkan Badung Smart City harus seimbang antara pemahaman dan penguasaan TIK di sisi penyelenggara pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik, dan di sisi masyarakat yang menerima pelayanan tersebut. Ketika pemerintah sudah membangun dan mengembangkan Smart City untuk memudahkan pelayanan masyarakat, di sisi lain warganya juga harus dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya masyarakat masih bingung menggunakan teknologi tersebut sehingga aplikasi yang dibangun dan dikembangkan tidak berjalan maksimal

Adapun tujuan dari *Smart Society* ini yaitu:

Tujuan	Strategi
Mewujudkan interaksi masyarakat yang efektif dan efisien (community)	Menyediakan akses internet yang terhubung antar rumah tangga;
	Menyediakan akses internet bagi masyarakat umum;
	Menyediakan Sarana dan pendukung dan penguatan kapasitas SDM penyuluh Ketenagakerjaan
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan (formal dan informal),	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengajar;
	Penyediaan internet di tempat pendidikan;
	Meningkatkan kualitas SDM bagi penjaga situs-situs budaya dan memberikan publikasi informasi tentang situs-situs budaya;
	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Mewujudkan sistem keamanan dan tanggap darurat masyarakat (security),	Mengaktifkan kelompok siskamling
	Pembuatan <i>Earli Warning System</i> (EWS)
Peningkatan pemberdayaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial),	Pelatihan dan peningkatan SDM PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
	Pelatihan dan peningkatan SDM PMKS

3.6. *Smart Environment*

Smart Environment jika diartikan dapat berarti lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Ruang lingkup dari Smart Environment ini diantaranya pengelolaan lingkungan yang baik, dari segi tata ruang dan sektor-sektor lainnya yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat

Adapun tujuan dari *Smart Environment* ini yaitu:

Tujuan	Strategi
Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai	Optimalisasi RTH di semua kawasan sesuai SPM RTH
	optimalisasi penanganan sampah sampai ditingkat desa/kelurahan dari sumber sampah sampai ke TPA;
	optimalisasi pengelolaan air limbah dalam lingkungan permukiman
	menyesuaikan pembangunan lingkungan berdasarkan daya dukung lahan;
Meningkatkan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penanganan pencemaran lingkungan hidup
	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)

BAB IV

RENCANA AKSI *SMART CITY* KABUPATEN BANTUL

4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan *Smart City*

Rencana pengembangan *Smart City* Bantul untuk kebijakan cukup ditetapkan dalam bentuk Perbup (Peraturan BuBantul). Adapun yang perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan BuBantul Bantul ditampilkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut. Dari Tabel 4.1 diturunkan dalam bentuk pelaksanaan teknis yaitu SOP.

Tabel 1 Rekomendasi Suprastruktur *Smart City* Bantul

No	Kebijakan
1	Organisasi Pengelola <i>Smart City</i> : Dewan TIK dan Tim Pelaksana TIK dengan koordinator di setiap dimensi smart city Pengembangan <i>Smart City</i> Bantul yang terdiri dari <i>Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart living, Smart Society, Smart Environment</i> , Ketetapan Visi dan Misi, Bentuk Organisasi, Tupoksi, Indikator keberhasilan, Tunjangan Kinerja, dan Hubungan dengan OPD / Unit Kerja.
2	Aplikasi <i>Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart living, Smart Society</i> , dan <i>Smart Environment</i> terintegrasi.
3	Infrastruktur TIK terpadu
4	Standardisasi metadata
5	Aset Informasi Daerah
6	Pemanfaatan software Legal (Open Source dan Proprietary)
7	Pemanfaatan akses Informasi
8	Keamanan Informasi dan <i>Incident handling</i>
9	Layanan Publik berbasis elektronik
10	Proses Birokrasi berbasis Elektronik / SPBE

Untuk kelembagaan, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa telah terbentuk Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing. Dalam pemanfaatan TIK, antar

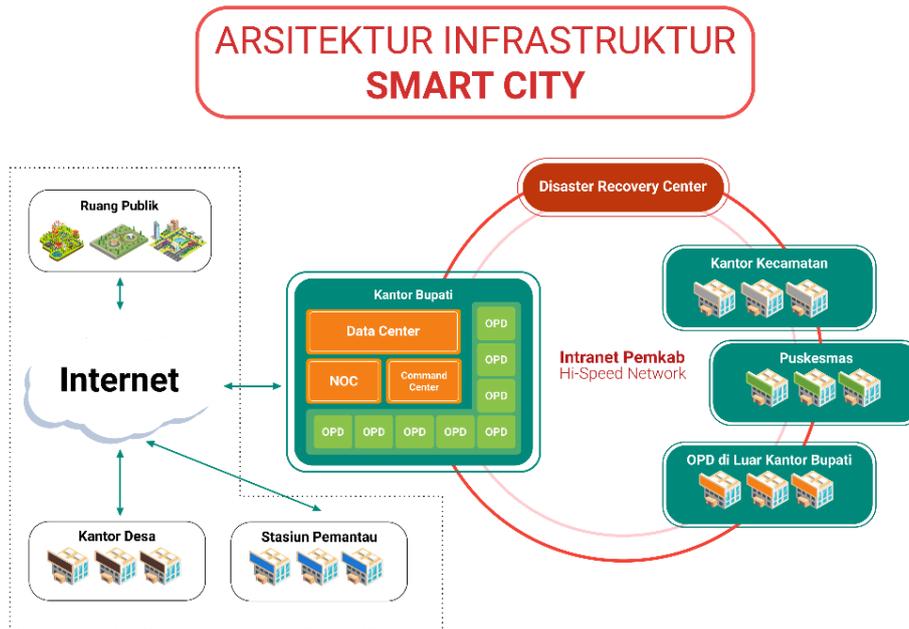
OPD akan memiliki kepentingan teknis dan administrasi masing – masing, maka perlu diatur koordinasinya untuk bisa bersinergi dalam rangka memenuhi semua kebutuhan TIK.

Semua OPD selain Dinas KOMINFO merupakan pemilik data / informasi dan proses birokrasinya menggunakan sarana prasarana TIK. Berikut adalah faktor – faktor yang harus dipatuhi dalam usaha transformasi proses birokrasi dan layanan publik dari manual menjadi berbasis elektronik:

No	Persyaratan Transformasi Elektronik Proses Birokrasi
1	Semua OPD harus berkoordinasi dengan Dinas KOMINFO dalam memanfaatkan sarana prasarana TIK Pemerintah Kabupaten Bantul.
2	Data, informasi, dan proses birokrasi dimiliki oleh OPD Sedangkan Dinas KOMINFO berwenang untuk sarana prasarana TIK.
3	Proses bisnis <i>re-engineering</i> yaitu melakukan inventarisasi proses birokrasi terkini yang bisa diotomatisasikan menjadi sistem informasi.
4	Pengelola data yang berfungsi untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> Akuisisi dan validasi data dasar Kebijakan data / informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data melalui sistem informasi Kebijakan pemanfaatan dan distribusi data Pengamanan dan pemeliharaan data Pengembangan sistem terintegrasi Penetapan proses yang akan dijadikan modul sistem informasi
5	OPD berkoordinasi dengan tim teknis pengembangan sistem Dinas KOMINFO dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan data Proses bisnis (proses kerja sistem) Metodologi Platform (bahasa pemrograman, database engine, sistem aplikasi, dll) Pelaksana Kelayakan Anggaran Pengelolaan sistem Sarana dan prasarana sistem (Server, jaringan, PC terminal, dll) Ketersediaan sistem di pasaran
6	OPD juga berkoordinasi dengan Dinas KOMINFO untuk mendapatkan ijin kelayakan tentang kebutuhan <i>software proprietary</i> dan aplikasi dari pemerintah pusat atau provinsi untuk dianalisa integrasi dengan sistem yang sudah ada.

	OPD pemilik data dan pemilik proses birokrasi juga berkoordinasi dengan OPD lain dalam hal akuisisi data, pengelolaan dan tanggung jawab kepemilikan data / informasi / proses birokasinya.
7	Selanjutnya untuk pemanfaatan infrastruktur TIK, dimana semua OPD berkoordinasi dengan Dinas KOMINFO untuk hal – hal berikut: <ol style="list-style-type: none">Kapasitas infrastruktur TIK yang dibutuhkanJumlah dan kualitas media komunikasi dataTingkat keamananSistem jaringan yang dibutuhkanKomBantulabilitas <i>hardware</i> dan <i>software</i>Spesifikasi teknis kebutuhan pekerjaanMekanisme pemeliharaan, pengoperasian dan pengendaliannya
8	Semua OPD harus berkoordinasi dengan Dinas KOMINFO dalam melaksanakan pengadaan, perawatan dan pengendalian infrastruktur TIK.

4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City*



Gambar 9 Komponen Infrastruktur
Ilustrasi komponen infrastruktur Smart City Bantul

4.2.1. Data Center (Pusat Data)

Kabupaten Bantul telah menyediakan pusat data yang dapat dimanfaatkan bersama oleh seluruh aplikasi *Smart City*. Pusat data dimaksud akan menyediakan kapasitas penyimpanan (*storage*), pemrosesan (*computing*), dan distribusi data yang dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi *Smart City*.

Pusat Data dimaksud setidaknya memiliki komponen dan perannya sebagai berikut:

1. *Database Server*, menyediakan kapasitas untuk penyimpanan data pokok, data transaksi, analisis dan pelaporan untuk seluruh aplikasi *Smart City*.
2. *Application Server*, menyediakan backend API dan Frontend bagi aplikasi *Smart City*
3. *File sharing server*, menyediakan solusi *cloud* untuk penyimpanan bersama arsip-arsip penting daerah
4. *Generic hosting service*, menyediakan solusi hosting untuk aplikasi-aplikasi generik *off-the-shelf* pendukung *Smart City*.
5. *Mail server*, menyediakan fasilitas email resmi di lingkup Pemkab Bantul.
6. *Domain Name Server*, menyediakan layanan domain resmi untuk memudahkan pemberian alamat layanan *Smart City*.

4.2.2. Jaringan

Ketersediaan ini jaringan ini mutlak diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya yang dibangun melalui inisiatif *Smart City* secara optimal. Infrastruktur jaringan yang akan dibangun dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yakni: Infrastruktur Jaringan Intra OPD (Intranet Kabupaten) dan Infrastruktur Jaringan Internet Masyarakat.

1. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan intra pemerintah adalah jaringan komputer yang menghubungkan seluruh kantor penyelenggara pemerintahan di lingkup Pemkab Bantul pada level kabupaten dan kecamatan. Jaringan dimaksud dapat dibangun baik melalui jalur privat (baik fisik atau virtual) maupun publik (internet).

Kapasitas jaringan yang disediakan harus diproyeksikan untuk mampu menangani lalu lintas data dalam kapasitas besar, termasuk diantaranya untuk menyediakan jalur komunikasi VoIP dan Video Conference dalam lingkungan OPD di Kabupaten Bantul

2. Jaringan Internet Masyarakat

Adalah infrastruktur jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan perangkat pemerintahan pada tingkat desa/kelurahan. Infrastruktur ini perlu disediakan untuk memastikan tersedianya jalur lalu lintas data hingga pada tingkatan yang terendah dengan jangkauan hingga titik-titik yang tergolong jauh dari pusat pemerintahan (*remote*). Tersedianya jalur tersebut akan memberikan manfaat antara lain:

- a. Memberikan kemudahan akses layanan bagi perangkat pemerintahan maupun masyarakat di seluruh wilayah kabupaten untuk memanfaatkan layanan pemerintah.
- b. Memungkinkan pemantauan kondisi daerah terotomasi menggunakan teknologi seperti *video surveillance*, stasiun monitoring cuaca dan iklim, monitoring kondisi lahan pertanian, hewan ternak, kondisi saluran irigasi dan lainnya (*Internet of Things*).
- c. Mendorong munculnya inovasi pelayanan masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang diprakarsai secara mandiri oleh pemerintah setempat dalam berbagai bentuk seperti implementasi Sistem Informasi Desa, *public hotspot*, perpustakaan digital desa, rumah pintar dan lainnya.

4.2.3. Pusat Kendali Jaringan & Data

Infrastruktur pusat kendali jaringan dan data dibangun untuk memudahkan pemantauan kondisi operasional pusat data dan jaringan intra pemerintah untuk menjamin ketersediaan (*availability*) seluruh infrastruktur pendukung *Smart City*.

4.2.4. Pusat Kendali Operasi (Operation Control Center)

Infrastruktur pusat kendali operasi *Smart City* merupakan fasilitas terpusat dimana seluruh sistem *Smart City* dapat dipantau. Pusat kendali operasi dilengkapi dengan berbagai tampilan yang menyajikan informasi *real-time* dari perangkat dan sistem yang tersebar di seluruh Bantul sehingga kondisi daerah dapat dipantau tanpa perlu menuju lokasi bersangkutan.

4.2.5. Disaster Recovery Center

Disaster Recovery Center (DRC) melakukan replikasi dan backup secara berkala terhadap seluruh data yang tersedia di data center. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap terjadinya kejadian *force majeure* yang mengakibatkan gagalnya data center menyediakan layanan seharusnya. DRC dirancang untuk mampu mengambil alih sementara peran data center hingga keadaan berhasil dipulihkan.

4.3. Rencana Pengembangan Perangkat Lunak *Smart City*



Gambar 10 Kerangka arsitektur perangkat lunak *Smart City* Kab. Bantul

4.4.1. Standar Arsitektur

1. Penyimpanan Data

Data seluruh sistem harus disimpan pada *datacenter* secara terpusat untuk kemudahan integrasi dan pengelolaan data.

Pengecualian dapat diberikan kepada sistem-sistem khusus dengan karakter membutuhkan beban akses dan *availability* tinggi namun penggunaanya terpusat di satu lokasi, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Khusus untuk sistem seperti ini, harus disediakan mekanisme sinkronisasi data dengan *datacenter*.

2. Akses & Keamanan Data

Akses dan pertukaran data dilakukan melalui API yang disediakan sebagai bagian dari infrastruktur *datacenter*. Komunikasi data harus dibangun dan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan data dan jaringan baik dari sisi *Confidentiality*, *Integrity*,

Availability dan *Authenticity*. Setiap komunikasi sistem melalui API harus dipastikan menggunakan protokol HTTPS.

3. Platform Perangkat Lunak

Platform *front end* perangkat lunak *Smart City* Kabupaten Bantul disediakan dengan teknologi *web-based* dan atau *mobile based*. Penggunaan platform berbasis desktop harus ditinggalkan untuk memudahkan kemungkinan pembaharuan, perawatan dan meminimalisir biaya, kecuali untuk kasus-kasus khusus dimana penggunaan kedua platform tersebut tidak dimungkinkan.

4.4.2. Klasifikasi Perangkat Lunak *Smart City*

1. Sistem Informasi Pengelolaan Data Induk Utama

Data induk utama kabupaten mencakup data-data utama yang menjadi rujukan lintas sektor. Karena menjadi rujukan lintas sektor, sistem informasi ini harus disediakan pada tahap awal dari rangkaian pengembangan sistem dalam inisiatif *Smart City* ini.

Data induk utama harus disusun dari *feed* basisdata yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang secara nasional, untuk menjamin kemudahan integrasi dengan sistem informasi milik pemerintah di luar Kabupaten Bantul, baik dengan memanfaatkan API yang tersedia maupun cara manual. Termasuk dalam kelompok ini adalah:

- 1) Data induk wilayah administratif, mencakup data kecamatan, kelurahan, desa, lingkungan, RT & RW.
- 2) Data induk kependudukan berisi data dasar penduduk Kabupaten Bantul minimal mencakup NIK, dan informasi yang tertera data-data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- 3) Data induk organisasi pemerintahan, berisi data organisasi penyelenggara daerah di lingkup Kabupaten Bantul minimal mencakup nama dan tupoksi OPD, struktur organisasi tiap-tiap OPD.
- 4) Data induk ASN, berisi data dasar seluruh ASN yang bekerja di bawah naungan Pemkab Bantul

2. Sistem Informasi Pengelolaan Data Induk Sektoral

Data induk sektoral mencakup data-data sektoral yang dicatat, dimutakhirkan, dan dianalisis oleh masing OPD sesuai sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Penekanan pada data sektoral ini adalah kepemilikan data ada pada OPD tertentu sehingga tanggung jawab atas pengelolaan data ada pada OPD bersangkutan namun

hak akses terhadap data bersangkutan juga dimiliki oleh OPD lain yang memiliki kepentingan atas data tersebut.

Sistem ini harus didesain untuk bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan OPD secara dinamis sehingga setiap ada penambahan klasifikasi data tertentu, tidak perlu pengembangan sistem baru. Contoh yang termasuk ke dalam klasifikasi ini antara lain:

- 1) Database Kawasan Strategis Kabupaten
- 2) Database obyek wisata
- 3) Database infrastruktur pendukung pariwisata
- 4) Database pelaku pariwisata
- 5) Database klasifikasi komoditas
- 6) Database kelompok tani
- 7) Database kelompok peternak
- 8) Database lahan pertanian dan kapasitas produksi
- 9) Database peternakan dan kapasitas produksi
- 10) Database pelaku usaha/penyedia jasa bidang pertanian, peternakan dan perikanan
- 11) Database infrastruktur pendukung pertanian, peternakan dan perikanan
- 12) Database klasifikasi produk UMKM
- 13) Database pelaku UMKM beserta jenis usaha, kapasitas usaha, beserta produk dan jasa yang ditawarkan.
- 14) Database pasar
- 15) Database tenaga kerja
- 16) Database infrastruktur jalan, jembatan
- 17) Database peruntukan kawasan
- 18) Database prasarana, sarana dan utilitas kawasan
- 19) Database ruang terbuka hijau
- 20) Database penerangan jalan umum
- 21) Database infrastruktur keairan
- 22) Database akses air bersih oleh rumah tangga
- 23) Database kawasan kumuh perkotaan
- 24) Database Rumah Tidak Layak Huni
- 25) Database infrastruktur sanitasi dan drainase
- 26) Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 27) Database produk hukum daerah
- 28) Database Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal

3. Sistem Informasi Pencatatan Data Rutin

Sistem ini memfasilitasi pencatatan data-data yang dicatat secara rutin (reguler). Pencatatan dapat dilakukan baik dengan cara manual (*entry* oleh petugas melalui aplikasi) atau dengan mendapatkan *feed* data secara otomatis dari sistem lain (misal: perangkat *IoT*).

Jenis data yang data dikelola di dalam sistem ini sebagian besar adalah data-data statistik sektoral, dimana tanggung jawab atas data berada pada OPD dengan bidang yang bersesuaian.

Akses terhadap pencatatan data diberikan melalui API dari data center. Pilihan mekanisme pengiriman data sesuai karakter proses bisnis di lapangan, yang sepenuhnya menjadi kewenangan OPD. Aplikasi pembantu dapat berupa aplikasi *front-end* berbasis web ataupun *mobile*.

Jenis data yang dikelola pada sistem ini harus dipahami sebagai sesuatu yang senantiasa berkembang, baik dari sisi kualitas (kedetailan data), maupun jenis data sesuai dengan kebutuhan OPD. Hal ini berarti bahwa sehingga sistem ini harus disiapkan untuk terus-menerus berkembang.

Contoh yang termasuk dalam cakupan sistem ini antara lain:

- 1) Pencatatan data kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, dan lainnya
- 2) Pencatatan data tarif dan biaya
- 3) Data agenda dan event pariwisata
- 4) Pencatatan harga pasar, baik untuk komoditas pangan, pertanian, peternakan dan lainnya
- 5) Pencatatan data produksi
- 6) Pencatatan distribusi bantuan kepada masyarakat
- 7) Pencatatan data stok dan distribusi pangan
- 8) Pencatatan data terkait cuaca, suhu, kondisi udara dan parameter lingkungan lainnya
- 9) Data agenda kerja aparat pemerintahan

4. Sistem Informasi dengan Alur Kerja (Workflow) Khusus

Sistem dengan *workflow* khusus adalah sistem spesifik yang diperuntukkan untuk mendukung proses bisnis tertentu di pemerintahan. Sistem ini dibangun secara terpisah dari sistem pengelolaan maupun pencatatan data untuk mengakomodasi kekhususan dari setiap proses bisnis. Contoh yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain:

- 1) Sistem Layanan Pengajuan Perijinan dan Rekomendasi
- 2) Sistem Layanan Pengaduan oleh Masyarakat
- 3) Sistem Layanan Darurat
- 4) Sistem Layanan Pengaduan oleh ASN
- 5) Sistem Pencatat Kehadiran Guru dan ASN
- 6) Sistem Pengelolaan Aset Daerah
- 7) Sistem Kepegawaian Daerah
- 8) Sistem Perencanaan Daerah
- 9) Sistem Keuangan Daerah
- 10) Sistem Informasi Desa

5. Sistem Pendukung Diseminasi Informasi

Sistem pendukung diseminasi informasi adalah sistem-sistem yang dibangun untuk memberikan informasi tertentu yang bersifat untuk konsumsi publik. Informasi yang disampaikan pada sistem ini dapat merupakan agregasi dari data yang telah disimpan pada sistem pengelolaan data induk, sektoral, dan pencatatan data rutin.

Berbagai bentuk dari sistem ini antara lain:

- 1) Website resmi masing-masing OPD
- 2) Direktori data sektoral (misal: direktori UMKM, direktori pariwisata, direktori pertanian, dsb.)
- 3) Sistem Informasi Geografis (Peta Kawasan Strategis, Peta Wisata, Peta Infrastruktur, dsb.)
- 4) Etalase Komoditas dan Produk Unggulan
- 5) Pusat arsip publik
- 6) Perpustakaan digital daerah
- 7) Sistem manajemen pengetahuan bagi aparat pemerintahan
- 8) Pusat pembelajaran digital bagi masyarakat

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh informasi yang tersedia, diperlukan sebuah “pintu masuk” khusus, baik dalam bentuk Web Portal maupun Mobile Apps yang didalamnya berisi tautan (*links*) maupun ringkasan dan agregat informasi dari seluruh sistem yang ada dalam klasifikasi ini.

6. Sistem Pendukung Pelaporan dan Analisis

Sistem pendukung laporan dan analisis adalah sistem informasi untuk jajaran manajerial, yang menyajikan kemampuan agregasi dan analisis data dari seluruh data yang tersimpan pada data center. Termasuk ke dalam sistem ini antara lain:

- 1) Dashboard Executive
- 2) Online Analytical Processing (OLAP)

- 3) Business Intelligence
- 4) Data Mining

7. Sistem Pendukung Komunikasi & Kolaborasi

Termasuk ke dalam kategori ini adalah sistem yang digunakan untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi baik di internal jajaran pemerintah kabupaten maupun dengan publik yakni:

- 1) Fasilitas email resmi OPD
- 2) VoIP dan Video Conference
- 3) Akun resmi media sosial

8. Sistem Monitoring

Sistem monitoring yang dimaksud adalah sistem-sistem yang dibangun untuk melakukan pemantauan otomatis terhadap kondisi-kondisi yang perlu dipantau baik secara *real-time* maupun berkala. Termasuk ke dalam sistem ini adalah:

- 1) Sistem monitoring fasilitas publik (CCTV)
- 2) Sistem monitoring lalu lintas
- 3) Sistem monitoring indikator kebencanaan
- 4) Sistem monitoring indikator lingkungan

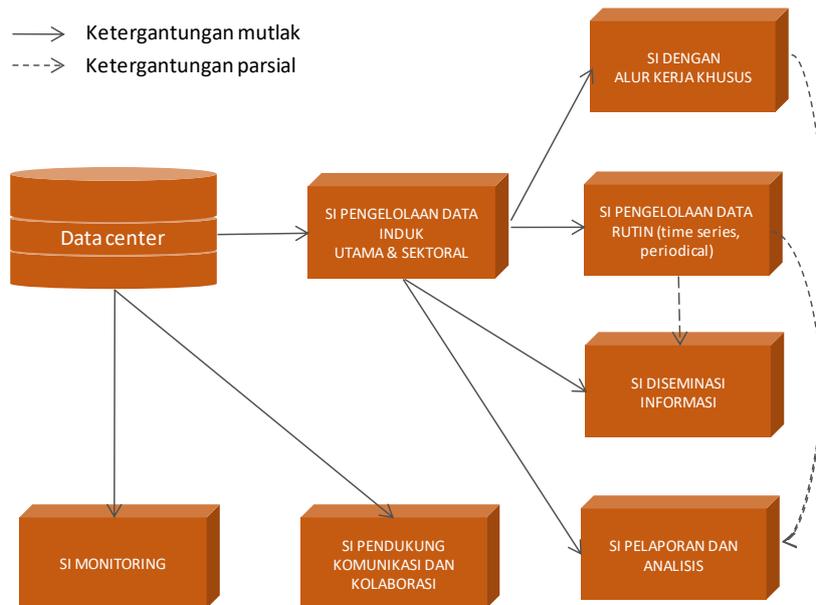
4.4. Tahapan pengembangan

4.5.1. Prioritas Pengembangan

Prioritas pengembangan perangkat lunak *Smart City* disusun dengan memperhatikan setidaknya dua faktor yakni pola ketergantungan antar sistem dan prioritas pengembangan yang merujuk kepada Kawasan Strategis Kabupaten.

4.5.2. Pola Ketergantungan Antar Sistem

Perangkat lunak *Smart City* tidak berdiri sendiri-sendiri. Terdapat perangkat lunak yang memiliki ketergantungan terhadap keberadaan infrastruktur tertentu dan perangkat lunak lain, terutama dari sisi ketersediaan data. Secara garis besar ketergantungan tersebut dapat disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 11 Pola Ketergantungan Antar Sistem

Ketergantungan mutlak menggambarkan bahwa sistem yang menjadi pendahulu (*predecessor*, pangkal panah) mutlak harus sudah ada sebelum sistem yang membutuhkan (*successor*, ujung panah). Sebagai contoh, pengembangan sistem untuk diseminasi informasi beserta sistem untuk pelaporan dan analisis dapat dimulai setelah data induk utama dan sektoral yang bersesuaian selesai dikerjakan. Seiring pengembangan, data-data dari hasil pencatatan data rutin juga dapat dimasukkan ke dalam sistem.

4.5. Rencana Penguatan Literasi *Smart City*

Selain literasi melalui Website <http://Bantulkab.go.id>, penguatan literasi *Smart City* dilaksanakan paralel dengan penguatan komponen *Smart City* lainnya, seperti penguatan infrastruktur dan suprastruktur. Penguatan literasi dilaksanakan berkesinambungan melalui bimtek, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar tentang *Smart City*. Bimtek, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang terkait. Semua pengembangan aplikasi dan layanan publik online memerlukan sosialisasi dan *focus group discussion* pada awal pengembangan, saat uji coba, dan saat implementasi. Selanjutnya dilakukan bimtek penggunaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, dan pengamanan aplikasi. Bimtek, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar tentang perkembangan teknologi, *trouble shooting* sistem, etika profesi, etika penyebaran dan penggunaan informasi. Untuk itu Dinas KOMINFO Kabupaten Bantul memastikan adanya dokumentasi seperti *manual book*, SOP, dan buku petunjuk.

BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY*

- I. **Tahun pertama dan tahun kedua difokuskan pada pematapan kebijakan, regulasi, dokumen pengembangan pengelolaan TIK, dan kelembagaan.** Sehingga di tahun ke tiga hingga akhir tahun ke lima hanya perlu melakukan review, revisi minor, dan penambahan SOP seperlunya. Sedangkan untuk rekrutmen dan pengelolaan SDM lebih mengikuti prosedur umum yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- II. **Tiga tahun pertama dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 akan dilakukan penguatan dan pematapan infrastruktur** hingga tercapai kondisi ideal untuk terjaminnya Business Continuity Plan. Selama lima tahun selalu dilaksanakan pemeliharaan dan penggantian perangkat yang sudah waktunya diganti berdasarkan umur efektif dan tingkat kerusakannya.
- III. Demikian juga dengan **pengembangan Infostruktur (aplikasi)**, dimana pada **tiga tahun pertama** akan dilakukan **pematapan dan pematangan interoperabilitas sistem informasi dan aplikasi, arsitektur sistem terintegrasi, database terpadu, bisnis proses reengineering pada seluruh birokrasi, sosialisasi dan penyelenggaraan pilot project.** Selanjutnya 2 tahun berikutnya dilakukan kegiatan pengembangan sistem terintegrasi secara masif yang melibatkan seluruh OPD

Untuk lebih menyederhanakan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan, maka akan tahap pengembangan digolongkan kedalam lima dimensi, yaitu dimensi kebijakan, dimensi kelembagaan, dimensi infrastruktur, dimensi aplikasi, dan dimensi perencanaan untuk *Smart City* Bantul

5.1. Dimensi Kebijakan

Dimensi kebijakan ini perlu mendapat prioritas utama, karena keberhasilan pelaksanaan *Smart City* sangat ditentukan oleh adanya regulasi yang baik sebagai landasan melakukan pengawasan dan tindakan jika terjadi kekeliruan. Untuk mereduksi resiko yang ditimbulkan atas lemahnya dimensi kebijakan ini, maka perlu langkah – langkah berikut.

1. Mempercepat penyusunan kelengkapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government/TIK Pemerintah Kabupaten Bantul
2. Penetapan semua dokumen yang diperlukan seperti dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Rencana Strategis, Framework e-government, dan semua SOP sebagai acuan dalam pengelolaan e-government Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Mempercepat penerapan pengembangan e-government dalam birokrasi dengan mendorong perubahan proses birokrasi dan budaya kerja berbasis elektronik dengan menyusun aturan/kebijakan untuk transformasi proses birokrasi ini.
4. Membangun dan memperkuat standardisasi pendelegasian tugas dan kewenangan pengembangan TIK kepada Dinas KOMINFO selaku koordinator dan seluruh OPD sebagai salah satu upaya menuju efektifitas dan efisiensi pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK di Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Melakukan sosialisasi, kontrol dan monitoring atas kebijakan strategis yang sah untuk diimplementasikan, untuk memastikan bahwa kebijakan telah dilaksanakan dengan baik di seluruh OPD.

5.2. Dimensi Kelembagaan

1. Pembentukan organisasi Dewan *Smart City* dimana kepala daerah atau minimal kepala OPD eselon 2 yang kompeten untuk membuat kebijakan TIK yang memimpin secara langsung pengendalian pengembangan dan pemanfaatan TIK.
2. Tim pelaksana *Smart City*
3. Tim ahli *Smart City* yang mendampingi pengelola Dinas KOMINFO
4. **Memperkuat peran lembaga pengelola Dinas KOMINFO** yang secara khusus dan mandiri dalam pengelolaan e-Government untuk memudahkan koordinasi dengan OPD lainnya dalam perencanaan, pengembangan, implemetasi, dan pengelolaan TIK.

5. Peningkatan kapabilitas SDM di bidang TIK baik Dinas KOMINFO maupun OPD lainnya.
6. Pengadaan dan pendistribusian SDM terkait TIK dikoorDinasikan dengan Dinas KOMINFO berdasarkan jumlah, kualifikasi, dan pendidikan.
7. Kebijakan legalitas pengelola TIK di OPD.
8. Pembentukan jenjang karir jabatan fungsional bagi SDM TIK.
9. Perlunya pendampingan untuk pengembangan pengelolaan TIK.
10. Pembentukan fungsi sistem Helpdesk terpadu dan satu pintu sehingga monitoring sistem jaringan OPD baik jaringan eksternal maupun internal dilakukan secara cepat.

5.3. Dimensi Infrastruktur Jaringan

1. Percepatan pengembangan dan pengelolaan Command Center (CC), Datacenter (NOC) dan Data recovery centre yang baik untuk menjamin availability dan peningkatan keamanan informasi.
2. Pengembangan government cloud storage.
3. Pemanfaatan Intranet (kabel dan seamless wifi) untuk komunikasi antar OPD, kecamatan / kelurahan, puskesmas, sekolah dan RSUD.
4. Adanya kebijakan standar pengelolaan infrastruktur TIK di OPD, kecamatan / kelurahan, puskesmas, sekolah dan RSUD.
5. Adanya kebijakan manajemen bandwidth, Public Internet Protocol (IP) dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh OPD.
6. Adanya penambahan akses wifi di ruang – ruang publik.
7. Adanya infrastruktur TIK terpadu untuk monitoring dan pengelolaan kabupaten guna mewujudkan Bantul *Smart City*

5.4. Dimensi Aplikasi / Sistem Informasi

1. Pengembangan dan pernyataan kepemilikan, pemanfaatan data / informasi dan aplikasi e-government yang terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas.
2. Untuk pengelolaan aset data dan informasi di Pemerintah Kabupaten Bantul, maka perlu **kebijakan sentralisasi data dan informasi** yang dihasilkan dari pemrosesan data di OPD pada datacenter Dinas KOMINFO
3. Setiap OPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B), koorDinasi pemerintahan (G2G), maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap, dimana pengembangan dan pengelolaannya tetap berkoordinasi dengan Dinas KOMINFO.
4. Perlunya standarisasi metadata untuk pengembangan aplikasi dan pengelolaan data tunggal dalam rangka interoperabilitas.

5. Percepatan pengembangan website OPD yang terintegrasi, dengan kemampuan melakukan interaksi dan transaksi.

5.5. Dimensi Perencanaan

1. Mempercepat penyusunan semua dokumen yang diperlukan seperti dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Rencana Strategis, Framework e-government, dan semua SOP.
2. Penetapan dokumen Rencana Pengembangan e-Government ini digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan renstra OPD terkait pengembangan e-government.
3. Penyusunan dokumen action plan untuk setiap kegiatan TIK yang berdampak luas terhadap kinerja OPD.
4. Segera disusun Business Continuity Plan untuk layanan infrastruktur TIK.
5. Segera disusun dokumen kerangka kerja (framework) pengembangan e-government. Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai dasar penyusunan semua SOP.
6. Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-government kepada level eksekutif.
7. Adanya **rekomendasi optimalisasi anggaran** penyelenggaraan TIK untuk seluruh OPD dari Dinas KOMINFO

5.6. Peta Strategis Program Kerja Smart City

Tabel 2 Peta Strategis Program Kerja Smart City

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	SIMDAN (Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa)
			Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	GALAMATRA (Garap Lahan Masyarakat Sejahtera) merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan tegalan dan halaman rumah yang masih terbengkalai untuk kegiatan produktif cth, untuk menanam tanaman buah, obat (tanaman obat keluarga), tanaman sayur-sayuran, kolam budidaya ikan

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
			Keserasian Kebijakan Kependudukan	Inovasi Pelayanan akta kelahiran dan akta keahiran	Aksi Simpati (Akta kematian sehari jadi)
			Pembangunan Sistim Pendaftaran Tanah	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Sistim pendaftaran tanah
			Pembinaan dan pengembangan aparatur	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	SAPA ASN merupakan Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN) sistem informasi manajemen kepegawaian untuk layanan kepegawaian: pengangkatan cpns ke pns., pembuatan kartu pegawai, pembuatan kartu istri/ suami, pengajuan ijin belajar dan tugas belajar. Selain itu untuk melayani proses kepegawaian internal, antaralain, cuti, kenaikan pangkat , pensiun. selain itu untuk melayani proses

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
					pemberian tunjangan kinerja: SIM Presensi dan SIM TUNGKIN (tunjangan kinerja)
			Penataan Administrasi Kependudukan	Pemutakhiran Data Kependudukan	PAGODA (Perekaman KTP-eL Plus Test Golongan Darah)
				Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Paten Berhadiah
			Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Pemberian kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah	Pembangunan SIM Pendaftaran Ijini Usaha Mikro Kecil (UMK) sehingga masyarakat pemohon mengajukan ijin secara online
			Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan obyek pariwisata unggulan	Melakukan koordinasi dan pembinaan POKDARWIS (Kelompok sadar wisata)
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	DGS Layanan Kesehatan Aplikasi untuk mengintegrasikan data dan pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat dari Puskesmas sampai RSUD sebagai proses tindaklanjut penanganan

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
					pasien yang akan membantu mempercepat dan mempermudah pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul
					Integrasi SID dengan SIAK
					Lapor Bantul Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Kecamatan Srandakan akan melaksanakan expo khusus untuk mempromosikan produksi dari kecamatan Serandakan, dan karya seni serandakan
			Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	JETISJOS (Jetis One Stop Service) untuk menyelenggarakan administrasi

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
					kependudukan dan pelayanan kecamatan satu pintu
			Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	JETRUDAL (Jetis Rumah Data Lengkap) untuk memberikan pelayanan data bagi masyarakat melalui pengembangan website kecamatan Jetis
			Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	PASBATIK (Pasukan Anak Sekolah Pembasmi Jentik) untuk memberantas nyamuk, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan siswa (anak sekolah).
			Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Paten(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Berhadiah adapun hadiah yang diberikan adalah buku bacaan untuk mendorong masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan secara

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
					mandiri, dan bibit tanaman untuk meningkatkan minat baca masyarakat, dan menggalakkan kesadaran masyarakat/ rumah
			Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil menengah untuk memberikan pelatihan packaging, labelisasi, perijanan usaha kepada pelaku UMKM
			Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Yan Perum (Layanan Antar KTP Sampai rumah) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pundong
			Peningkatan pelayanan masyarakat	Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
			Peningkatan pelayanan masyarakat	Peningkatan pelayanan masyarakat IUMK	Peningkatan pelayanan masyarakat IUMK
			Peningkatan pelayanan masyarakat	Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
			Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	Master Plan Pembangunan Gerbang Selamat Datang Kabupaten Bantul
	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi aparatur	Terwujudnya sasaran prima kepegawaian	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	Sosialisasi aplikasi SAPA ASN secara manual dan virtual melalui media massa dan media sosial
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Layanan Aplikasi Pajak BANTUL (LAPAK BANTUL)
				Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Sosialisasi aplikasi LAPAK BANTUL secara manual dan virtual melalui media massa dan media sosial

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
				Pembinaan Pengelola keuangan SKPD	Pembangunan aplikasi e-Retribusi untuk Mengatasi kekurangan tenaga pemungut retribusi dan mengurangi celah kebocoran pungutan retribusi
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Peningkatan Pemberdayaan Warga Miskin	Pemutakhiran Data Warga Miskin dengan cara pembetulan kader / surveyor untuk melakukan validasi data BDT (Basis Data Terpadu)	Pemutakhiran Data Warga Miskin dengan cara pembetulan kader / surveyor untuk melakukan validasi data BDT (Basis Data Terpadu)
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Pengembangan Sistem Informasi Desa dan profile desa	Pengembangan Sistem Informasi Desa dan profile desa
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	peningkatan kualitas pelayanan informasi	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis	E-Arsip - GETAR BAHANA (Gerakan Tertib Arsip Bantul Harmoni dan Akuntabel)

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
			Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan Sarpras Perpustakaan (e-perpus)	Pengembangan aplikasi IBRA (E-Library) , merupakan layanan perpustakaan online perpusdabantul.id
		Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Program manajemen pelayanan pendidikan	Peningkatan Metodologi Pengajaran	E-Raport Sistem informasi manajemen penilaian pendidikan pada sekolah menengah pertama (SMP) berbasis web dan mengintegrasikan data manajemen pendidikan yang telah dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	WA-Tantri (Whatsapp Tanpa Antri)

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	Gropyok TBC
			peningkatan pelayanan rumah sakit (Pengelolaan BLUD RSUD)	Sistem Antrian Pendaftaran Pasien Online dan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)	Sistem Antrian Pendaftaran Pasien Online dan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)
		Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Peningkatan Mutu dan Cakupan Pendidikan	Pembentukan Kader JBM (Jam Belajar Masyarakat)	Pembentukan Kader JBM (Jam Belajar Masyarakat)
		Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Sampel Air Bakteriologis pada Rumah Tangga Keluarga Balita KEK/ Stunting	Pemeriksaan Sampel Air Bakteriologis pada Rumah Tangga Keluarga Balita KEK/ Stunting
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Pemberian PMT (Pemulihan Ibu Hamil, Kekurangan Energi Kronis/ Anemia)	Pemberian PMT (Pemulihan Ibu Hamil, Kekurangan Energi Kronis/ Anemia)

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
				Pendampingan pemberian PMT (Ibu Hamil dengan KEK), dan pembuatan menu MP ASI	Pendampingan pemberian PMT (Ibu Hamil dengan KEK), dan pembuatan menu MP ASI
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Rujukan	SIGAP (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Publik) – Public Safety center (PSC) 119
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Pengembangan aplikasi "Jelajah Bantul" untuk penambahan konten dan pemutahiran data
				Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Sosialisasi aplikasi Jelajah Bantul secara manual dan virtual dengan menggunakan media sosial dan media massa lainnya.

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
				pengembangan Statistik wisata terpadu	Pelatihan pengisian data kunjungan obyek wisata dan desa wisata bagi para POKDARWIS (kelompok sadar wisata) dan pengelola desa wisata
				pengembangan Statistik wisata terpadu	Pembangunan SIM Data Kunjungan obyek wisata dan desa wisata
				Peningkatan Pelayanan Informasi Pariwisata	Pembangunan TIC (Toursim Information Center) untuk memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan yang melewati obyek wisata pantai
		Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pemberdayaan pedagang	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Telo kasp0 (Temukan Lokasi Pangkalan Gas Pada Android)
			Ppembinaan pedagang kakilima dan asongan	Pemberdayaan pedagang kaki lima dan asongan	PEGANG KAKI BESAN (Penataan Pedagang Kaki Lima Berbasis Kawasan)

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
				Pemberdayaan pedagang kaki lima dan asongan	Sidak malih (Sosialisasi Pedagang Kaki Lima Melalui Roadshow)
			peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan Pelayanan Perdagangan	Awas Dagadu (Pengawasan Perdagangan Terpadu)
			Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Nasi Putar (Perizinan dan Sistem Layanan Jemput Antar) untuk memudahkan pemohon izin yang tidak mempunyai banyak waktu dalam pengurusan izin serta meminimalisir piutang retribusi izin.
		Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	pelayanan pendataan jaminan bantuan sosial	masuk di dalam kegiatan updating data kemiskinan dan kegiatan data base kk miskin	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
			peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Optimalisasi Pokjanal (Kelompok kerja operasional) posyandu	Pembangunan "SIPANDU TERPANA" (Sistem Informasi Posyandu Terpadu Sederhana), untuk menyajikan data profile posyandu dan kader posyandu, untuk mempermudah informasi data posyandu yang valid, berbagai kegiatan posyandu, dan mengintegrasikan data prosyandu se kabupaten BANTUL,
			pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi pmks	UPTD Kesejahteraan dan Puskesmas
			Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	RPH24Jam (Rumah Pemotongan Hewan)

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
				Peningkatan Penerapan teknologi pertanian dan perkebunan	Penyusunan dan pengelolaan data statistik pertanian daerah melalui aplikasi SIPADU (Sistem Informasi Pangan Terpadu) yang berbasis WebGIS dan mencakup sektor pertanian dalam arti luas (ketahanan pangan, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, kesehatan hewan, kelautan dan perikanan) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi seputar pembangunan pertanian pangan kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan mudah
			Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Peningkatan Daya Saing Produk dan Investasi Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif	Gelar Tehnologi Tepat Guna	Gelar Tehnologi Tepat Guna
				Pelatihan dan Pendampingan Industri Kreatif	Pelatihan dan Pendampingan Industri Kreatif
		Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Peningkatan Daya Saing Produk dan Investasi Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif	Pengembangan SDM Desa Wisata dalam bentuk pelatihan bagi pemandu Outbond	Pengembangan SDM Desa Wisata dalam bentuk pelatihan bagi pemandu Outbond
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kampung UKM Digital untuk mempromosikan hasil produksi bagi Pelaku Usaha UMKM secara online

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
			Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Pengembangan kerjasama dan kemitraan koperasi	PERAS HABIS (Koperasi Sahabat Si Miskin) merupakan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin disekitar koperasi
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam, dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Program Bencana Alam	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Penambahan menu e-Logistik untuk pendataan logistik yang dibutuhkan dalam penanganan bencana
				Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Intergrasi Sistem Informasi Kebencanaan dengan Peta Rawan Bencana untuk memberikan akses informasi wilayah rawan bencana bagi masyarakat

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
				Sosialisasi Sistem Informasi Kebencanaan secaramanual dan virtual melalui media massa dan media sosial	Sosialisasi Sistem Informasi
	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Program Bencana Alam	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	PASEBAN (Pelaporan Singkat Emergency dan Kebencanaan) untuk menyajikan pelaporan bencana, peringatan dini dari BMKG, prakiraan cuaca, penyajian data bencana sebagai alat edukasi mitigasi bencana, dan penanggulangan pada saat bencana
		Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)	SIPENTOL (Sistem Informasi Pendaftaran Online)

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
		Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengembangan Data Pemanfaatan Ruang	Cybernetics Tata Ruang
	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Pembinaan Jasa Konstruksi	: Belanja modal pengadaan aplikasi dan pemeliharaan aplikasi	Pengembangan Web Layanan PU dengan menambahkan menu ALSANTI (Aplikasi Layanan Sanitasi Tinja) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi seputar pelayanan sanitasi,
	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH	One Village one JPSM/OVOJ (Jaringan Pengelolaan Sampah Mandiri) selanjutnya jpsm yang terbentuk tergabung dalam satu wadah JPSM Bantul Amor. Amor bekerjasama dengan Bank BNI dalam mengelola dana tabungan sampah dari nasabah

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
				Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah 3 Reuse, Reduce, Recycle) yang bukan tempat pembuangan sampah tetapi ada aktivitas pemilahan sampah, penggunaan kembali sampah dalam bentuk lain.
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengendalikan pencemaran lingkungan	Penurunan beban pencemaran lingkungan	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan data dan informasi lingkungan	sosialisasi aplikasi SUDOKU secara manual dan virtual melalui media massa, dan media sosial
				Pengembangan data dan informasi lingkungan	Susun Dokumen Lingkungan (SUDOKU)
	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan	Evaluasi adipura	Gost Sampah (kegiatan menyeluruh terhadap upaya bersih sampah yang terdiri atas Gropyok Sampah, OTT

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Nama Kegiatan	Inovasi
					Sampah, Saber Sampah, tindak Sampah)
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	SIPP MAS (Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Perlindungan Masyarakat)
			Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Upaya pendampingan Korban kekerasan perempuan dan anak	UPTD PPT KKPA Hotline 24 Jam

5.7. PETA JALAN SMART CITY

Tabel 3 Peta Jalan Smart City

No	Inovasi	OPD	Mitra	Usulan Anggaran	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek (1-3thn)	Jangka Menengah (3 – 5 thn)	Jangka Panjang (> 5thn)
1	Master Plan Pembangunan Gerbang Selamat Datang Kabupaten Bantul	BAPPEDA	- DPPUPKP - DIPERTARU	Rp.250.000.000	Smart Branding	banyak masyarakat yang sejenak menikmati suasana gerbang, dengan berfoto, bersantai dengan saudara dan kawan			
2	Pengembangan aplikasi " Jelajah Bantul " untuk penambahan konten dan pemutahiran data	Dinas pariwisata	Kominfo, UGM, Akakom, dinas kebudayaan, dinas KUKMP, Dinas perdagangan, assosiasi pelaku wisata, Dinas PU, BAPPEDA	Rp.70.000.000	Smart Branding	sebagian besar masyarakat / wisatawan bisa mengatur aplikasi ini, kalau bisa diberikan jumlah kunjungan yang melihat aplikasi ini:Jumlah konten data dan informasi yang di input kedalam aplikasi jelajah bantul			

3	Sosialisasi aplikasi Jelajah Bantul secara manual dan virtual dengan menggunakan media sosial dan media massa lainnya.	Dinas Pariwisata		Rp.150.000.000	Smart Branding	Jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi Jelajah Bantul; Jumlah konten informasi yang dikemas secara manual dan virtual			
4	Pembangunan TIC (Toursim Information Center) untuk memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan yang melewati obyek wisata pantai	Dinas Pariwisata		Rp.1.590.000.000	Smart Branding	Jumlah wisatawan yang mengunjungi TIC			
5	Pembangunan SIM Data Kunjungan obyek wisata dan desa wisata	Dinas pariwisata		Rp. 100.000.000	Smart Branding	Jumlah data kunjungan obyek wisata dan desa wisata dan fasilitas wisata yang di input kedalam aplikasi SIM data kunjungan			

6	Pelatihan pengisian data kunjungan obyek wisata dan desa wisata bagi para POKDARWIS (kelompok sadar wisata) dan pengelola desa wisata	Dinas pariwisata		Rp.50.000.000	Smart Branding	jumlah anggota POKDARWIS dan Pengelola desa wisata			
7	Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja	Disnakertrans		Rp. 72.478.700	Smart Economy	Pencari kerja dapat mencari lowongan pekerjaan di semua wilayah dengan lebih efektif dan efisien, Perusahaan akan memperoleh calon tenaga kerjasesuai kualifikasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien, Lebih optimalnya sinergitas peran BKKmaupun PPTKIS terhadap Disnakertrans Kab/Kota.			

8	RPH24Jam (Rumah Pemotongan Hewan)	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan		Rp 216.600.000	Smart Economy	pemasok daging terbesar dengan jaminan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal), dan pengelolaan limbah yang optimal			
9	Awas Dagadu (Pengawasan Perdagangan Terpadu)	Dinas Perdagangan		Rp. 42.000.000	Smart Economy	a. Semakin berkurangnya barang- barang/produk yang beredar dipasaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. b. Konsumen terlindungi dari kemungkinan resiko gangguan kesehatan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan			

						atau jasa yang beredar.			
10	Telo kaspo (Temukan Lokasi Pangkalan Gas Pada Android)	Dinas Perdagangan		Rp. 46.000.000	Smart Economy	<p>a. Masyarakat selalu konsumen dapat mengakses informasi lokasi pangkalan di masing-masing pangkalan se Kabupaten Bantul melalui aplikasi android tersebut.</p> <p>b. Peta pangkalan gas LPG sesuai dengan titik – titik koordinat yang berada di google map.</p> <p>c. Masyarakat semakin minat untuk selalu mengakses aplikasi tersebut.</p> <p>d. Terjalannya komunikasi yang baik</p>			

						antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat secara luas.			
11	Sidak malih (Sosialisasi Pedagang Kaki Lima Melalui Roadshow)	Dinas Perdagangan		Rp. 44.625.000	Smart Economy	PKL paham kebersihan; PKL bersedia ditata; PKL mampu bermitra dengan bank; komunikasi terjalin dengan baik			
12	PEGANG KAKI BESAN (Penataan Pedagang Kaki Lima Berbasis Kawasan)	Dinas Perdagangan		Rp. 650.000.000	Smart Economy	Terwujudnya kawasan sentra kuliner di Kecamatan – kecamatan se-Kabupaten Bantul; - Tidak ada konflik sosial saat dilakukan penataan antara PKL itu sendiri dengan pihak – pihak terkait; - Pinggir jalan raya bekas lahan PKL, sudah terlihat			

						bersih dan indah dipandang mata; - Kawasan baru sebagai relokasi PKL, terlihat ramai pengunjung dan tidak ada konflik sosial dari manapun.			
13	Kampung UKM Digital untuk mempromosikan hasil produksi bagi Pelaku Usaha UMKM secara online	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Kominfo dan PT TELKOM, Dinas perdagangan	Rp. 33.600.000	Smart Economy	Untuk mempromosikan hasil produksinya ke pangsa pasar yang lebih luas ;Jumlah Transaksi jual beli yang terjadi melalui website blanja.com			
14	PERAS HABIS (Koperasi Sahabat Si Miskin) merupakan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha bagi	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas sosial, Bappeda, Dukcapil	Rp. 337.525.000	Smart Economy	Jumlah masyarakat miskin yang menerima pelatihan/ pendampingan kewirausahaan dan bantuan modal usaha			

	masyarakat miskin disekitar koperasi								
15	Penyusunan dan pengelolaan data statistik pertanian daerah melalui aplikasi SIPADU (Sistem Informasi Pangan Terpadu) yang berbasis WebGIS dan mencakup sektor pertanian dalam arti luas (ketahanan pangan, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, kesehatan hewan, kelautan dan perikanan) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi seputar pembangunan pertanian pangan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Kominfo, Kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok peternak, KWT (Kelompok Wanita Tani)	Rp. 20.000.000	Smart Economy	1. jumlah data ketahanan pangan, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, kesehatan hewan, kelautan dan perikanan yang di input kedalam aplikasi SIPADU 2. Jumlah masyarakat yang mengkases aplikasi SIPADU			

	kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan mudah								
16	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil menengah untuk memberikan pelatihan packaging, labelisasi, perijanan usaha kepada pelaku UMKM	Kecamatan Kasian	DKUMKM, Dinas perdagangan, Dinas Perindustrian	Rp. 40.000.000	Smart Economy	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan			
17	One Village one JPSM/OVOJ (Jaringan Pengelolaan Sampah Mandiri) selanjutnya jpsm yang terbentuk tergabung dalam satu wadah JPSM Bantul Amor. Amor bekerjasama dengan Bank BNI	Dinas LH	Perbankan, Paguyuban pengelola sampah (TPS 3R)	Rp.1.778.880.000	Smart Environment	1. Jumlah JPSM yang terbentuk di tingkat desa dan dusun 2. Jumlah Anggota JPSM yang mengikuti diklat tentang pengelolaan sampah 3. Jumlah kegiatan diklat tentang pengelolaan			

	dalam mengelola dana tabungan sampah dari nasabah					sampah yang dilakukan terhadap JPSM			
18	Gost Sampah (kegiatan menyeluruh terhadap upaya bersih sampah yang terdiri atas Gropyok Sampah, OTT Sampah, Saber Sampah, tindak Sampah)	Dinas LH	Masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, perguruan tinggi, Sat Pol PP, kepolisian, dinas perhubungan	Rp. 87.500.000	Smart Environment	1. Jumlah timbulan sampah liar, 2. Jumlah pelaksanaan OTT Sampah 3. Jumlah pelanggaran pembuangan sampah ilegal			
19	Susun Dokumen Lingkungan (SUDOKU)	Dinas LH	DPMPT; perusahaan/badan usaha;	Rp. 50.850.000	Smart Environment	1. Jumlah data dokumen lingkungan yang di input kedalam aplikasi SUDOKU 2. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan dokumen lingkungan melalui aplikasi SUDOKU 3. Jumlah masyarakat yang mengkases aplikasi SUDOKU			

20	Sosialisasi aplikasi SUDOKU secara manual dan virtual melalui media massa, dan media sosial	Dinas LH		Rp. 50.000.000	Smart Environment	Jumlah konten informasi yang dikemas secara manual dan virtual dan disosialisasikan lewat berbagai media			
21	E-Arsip - GETAR BAHANA (Gerakan Tertib Arsip Bantul Harmoni dan Akuntabel)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- TELKOM - ANRI	Rp. 98.375.000	Smart Governance	Jumlah masyarakat (termasuk ASN) yang etrlibat dalam program GETAR BAHANA			
22	PAGODA (Perekaman KTP-eL Plus Test Golongan Darah)	Disdukcapil	PMI PUSKESMAS	Rp. 1.595.949.500	Smart Governance	elemen data golongan darah dalam wajib KTP sudah terisi semua			
23	Integrasi SID dengan SIAK	Dinas Kominfo	Bappeda, Administrasi Pemerintahan Desa, Disdukcapil, 17 Kecamatan, 75 Desa	Rp. 128.062.500,00	Smart Governance	Pelayanan di desa lebih cepat, data kependudukan lebih valid, masyarakat terbantu apabila ingin mengetahui data baik itu tentang potensi desa taupun data tentang kependudukan,			

						meningkatnya kualitas pelayanan di masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat berjalan dengan lancar karena data telah terintegrasi dengan SIAK dari Disdukcapil.			
24	Layanan Aplikasi Pajak BANTUL (LAPAK BANTUL)	BKAD	17 Kecamatan, 75 Desa	Rp. 50.000.000	Smart Governance	Masyarakat dapat mengetahui data objek pajak, data riwayat pembayaran dan tagihan PBB dengan mudah. Hanya cukup dengan menggunakan aplikasi LAPAK Bantul.;Jumlah data objek pajak , riwayat pembayaran dan tagihan PBB, jadwal mobil pelayanan pajak keliling yang bisa			

						diakases oleh wajib pajak			
25	Sosialisasi aplikasi LAPAK BANTUL secara manual dan virtual melalui media massa dan media sosail	BKAD	17 Kecamatan, 75 Desa	Rp. 50.000.000	Smart Governance	Jumlah konten informasi yang di kemas dalam bentuk manual (kertas) dan bentuk virtual (video)			
26	SIMDAN (Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa)	Setda		Rp. 1.214.495.000	Smart Governance	Proses pengajuan permohonan user id PPK dan Pejabat Pengadaan menjadi lebih efisien disebabkan permohonan user id melalui SIMDAN akan memudahkan OPD untuk melengkapi bila masih ada kekurangan berkas permohonan tidak harus berulang kali datang ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			

27	Paten Berhadiah	Disdukcapil		Rp.1.595.949.500	Smart Governance	Minimalnya jasa calo, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, lingkungan menjagi sejuk dan rindang, minat baca meningkat.			
28	Aksi Simpati (Akta kematian sehari jadi)	Disdukcapil		Rp. 715.000.000	Smart Governance	Data kependudukan akurat			
28	SIPENTOL (Sistem Informasi Pendaftaran Online)	Dinas Perhubungan		Rp. 101.495.000	Smart Governance	Indikator keberhasilan: 1. Antrian bisa tertib sesuai jam dan hari pendaftaran2. Waktu yg dibutuhkan untuk mengujikan kend bisa diprediksi 3. Meinalisir kkn la whong jumlah SKRD nya sudah bisa dilihat di hp wajib uji 4. Database kendaraan angkutan di bantu semakin tertata 5.			

						Bisa disusun taman kendaraan angkutan di bantu			
29	Aplikasi Pelayanan Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN) sistem informasi manajemen kepegawaian untuk layanan kepegawaian: pengangkatan cpns ke pns., pembuatan kartu pegawai, pembuatan kartu istri/ suami, pengajuan ijin belajar dan tugas belajar. Selain itu untuk melayani proses kepegawaian internal, antaralain, cuti, kenaikan pangkat , pensiun. selain	BKPP	Kominfo, dan semua OPD	Rp. 23.000.000	Smart Governance	Meningkatnya kemudahan dalam pengelolaan database kepegawaian yang terpadu di Pemerintah Kabupaten Bantul, Meningkatnya keakuratan database kepegawaian yang terpadu melalui Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN) sehingga mampu menyajikan potret kondisi data kepegawaian yang lebih akurat, Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan aksebilitas dalam pelayanan			

	itu untuk melayani proses pemberian tunjangan kinerja: SIM Presensi dan SIM TUNGKIN (tunjangan kinerja)					data kepegawaian yang terpadu melalui Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN).;Jumlah data kepegawaian yang di inputkedalam aplikasi SAPA ASN ;Rekapitulasi data kinerja untuk perhitungan pembayaran tunjangan kinerja;Jumlah pegawai dan masyarakat yang mengakses aplikasi SAPA ASN			
32	Sosialisasi aplikasi SAPA ASN secara manual dan virtual melalui media massa dan media sosial	BKPP	Kominfo, dan semua OPD	Rp. 25.000.000	Smart Governance	Jumlah konten informasi yang dikemas dalam bentuk manual (kertas) dan virtual (video) yang disosialisasikan lewat berbagai media			

31	Pembangunan aplikasi e-Retribusi untuk Mengatasi kekurangan tenaga pemungut retribusi dan mengurangi celah kebocoran pungutan retribusi	BKAD	17 Kecamatan, 75 Desa	Rp.167.415.000	Smart Governance	Jumlah transaksi pembayaran retribusi yang dibayarkan lewat e-retribusi			
33	Nasi Putar (Perizinan dan Sistem Layanan Jemput Antar) untuk memudahkan pemohon izin yang tidak mempunyai banyak waktu dalam pengurusan izin serta meminimalisir piutang retribusi izin.	DPMPT	Bank BPD, OPD Terkait (Dishub, DPUPKT, Dinas pertahutkan, dll	Rp. 324.000.000	Smart Governance	Jumlah pengajuan perizinan yang terlayani			

34	Yan Perum (Layanan Antar KTP Sampai rumah) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	Dinas Dukcapil	Rp. 6.000.000	Smart Governance	Jumlah KTP yang selesai yang didistribusikan ke masyarakat sesuai alamat tercantum pada KTP			
35	Paten(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Berhadiah adapun hadiah yang diberikan adalah buku bacaan untuk mendorong masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan secara mandiri, dan bibit tanaman untuk meningkatkan minat baca masyarakat, dan menggalakkan kesadaran	Kecamatan Pundong	Dinas Dukcapil	Rp. 5.000.000	Smart Governance	Jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan secara mandiri			

	masyarakat/ rumah								
36	JETISJOS (Jetis One Stop Service) untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pelayanan kecamatan satu pintu	Kecamatan Jetis	Dinas Dukcapil, Dinas KUMKM, Dinas perindustrian, PTSP, Dinas Perdagangan, Dinas sosial	Rp. 15.000.000	Smart Governance	1.Tingkat IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 2. Jumlah pengajuan administrasi kependudukan dan adminitrasi lainnya yang terlayani			
37	JETRUDAL (Jetis Rumah Data Lengkap) untuk memberikan pelayanan data bagi masyarakat melalui pengembangan website kecamatan Jetis	Kecamatan Jetis	Dinas Kominfo	Rp. 20.000.000	Smart Governance	1. jumlah yang data yang di input ke website kecamatan Jetis 2. Jumlah masyarakat yang mengakses website kecamatan jetis			
38	Sistim pendaftaran tanah	Kecamatan Srandakan	BPN	Rp. 15.360.000	Smart Governance	Jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialisasi pendaftaran sertifikat tanah			

39	Pembangunan SIM Pendaftaran Ijini Usaha Mikro Kecil (UMK) sehingga masyarakat pemohon mengajukan ijin secara online	Kecamatan Srandakan	Kominfo, DPMPT, dinas Koperasi dan UKM	Rp. 50.000.000	Smart Governance	1 Jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi SIM Pendaftaran Ijin UMK			
40	Melakukan koordinasi dan pembinaan POKDARWIS (Kelompok sadar wisata)	Kecamatan Srandakan	Dinas Pariwisata dan POKDARWIS	Rp. 2.500.000	Smart Governance	Jumlah anggota POKDARWIS yang mengikuti sosialisasi			
41	Kecamatan Serandakan akan melaksanakan expo khusus untuk mempromosikan produksi dari kecamatan Serandakan, dan karya seni serandakan	Kecamatan Srandakan	Semua OPD khususnya dinas Koperasi dan UKM, kepala dusun	Rp. 50.000.000	Smart Governance	1. Jumlah kegiatan expo kecamatan Serandakan 2. Jumlah pengunjung expo kecamatan Serandakan			

42	Cybernetics Tata Ruang	DIPERTARU	BIG BPN Bappeda PLN integrasi peta jaringan listrik Telkom integrasi peta jaringan telkom Dinas Pertanian integrasi peta PL2B BPBD integrasi peta rawan bencana PDAM integrasi peta jaringan air DPUPKP integrasi peta jalan dan jaringan irigasi DLH integrasi peta sampah Dishub Kecamatan dan Desa	Rp. 334.357.000	Smart Living	Tersedianya infrastruktur layanan informasi, tersedianya personel pengampu kontrol kualitas, informasi layanan tata ruang, terlaksananya operasionalisasi strategi cybernetics tata ruang			
43	WA-Tantri (Whatsapp Tanpa Antri)	Dinas Kesehatan		Rp. 102.210.000	Smart Living	Banyaknya pemohon yang menggunakan aplikasi, efisiensi waktu, pelayanan maksimal kepada masyarakat			

44	SIGAP (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Publik) – Public Safety center (PSC) 119	Dinas Kesehatan		Rp. 261.602.000	Smart Living	<p>1. Prosentase Fasyankes yang melakukan MOU dengan SIGAP – PSC 119 Bantul dibanding semua Fasyankes di Bantul</p> <p>2. Tingkat utilisasi (masyarakat yang mengakses) ke SIGAP – PSC 119 Bantul</p> <p>3. Prosentase kasus Gadar yang tertangani melalui SIGAP – PSC 119 Bantul</p>			
45	Sistem Antrian Pendaftaran Pasien Online dan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)	RSUD	Kominfo,	Rp. 86.889.000	Smart Living	<p>Pendaftaran pasien melalui APM ternyata banyak diminati masyarakat terbukti di bulan April 2018 sudah mencapai 3.577 pasien (19,73%) dan pada bulan Mei 2018 mencapai 7.363</p>			

						<p>pasien (39,33%) dari total pasien di bulan tersebut. Prediksi bulan berikutnya pendaftaran pasien melalui APM akan lebih diminati masyarakat dengan prosentase yang semakin meningkat. Rata rata pendaftaran online tahun 2017 ada 1.866 pasien (2,76%) dan tahun 2018 bulan januari 2018 sampai bulan mei 2018 ada 4.285 pasien (4,74%)</p>			
46	<p>DGS Layanan Kesehatan Aplikasi untuk mengintegrasikan data dan pelayanan fasilitas kesehatan</p>	Dinas Kominfo	RSUD Panembahan Senopati, 27 Puskesmas, Dinas Kesehatan, BPJS	Rp. 900.000.000	Smart Living	Masyarakat dapat pelayanan yang cepat serta mudah dalam pengobatan baik dalam faskes 1 ataupun rujukan ke rumah sakit			

	masyarakat dari Puskesmas sampai RSUD sebagai proses tindaklanjut penanganan pasien yang akan membantu mempercepat dan mempermudah pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul					dengan sudah terhubung ke BPJS			
47	Pengembangan Web Layanan PU dengan menambahkan menu ALSANTI (Aplikasi Layanan Sanitasi Tinja) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan	Dinas PUPKP	KOMINFO	Rp. 200.000.000	Smart Living	1. Jumlah masyarakat yang mengajukan layanan sanitasi secara online 2. Jumlah masyarakat yang mengakses web layanan PU khususnya layanan ALSANTI			

	informasi seputar pelayanan sanitasi,								
48	PASBATIK (Pasukan Anak Sekolah Pembasmi Jentik) untuk memberantas nyamuk, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan siswa (anak sekolah).	Kecamatan Jetis	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan komunitas masyarakat, dkpora	Rp. 20.000.000	Smart Living	1. Jumlah ABJ (Angka Bebas Jentik) 2. Jumlah siswa yang terlibat dalam program PASBATIK			
49	GALAMATRA (Garap Lahan Masyarakat Sejahtera) merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan tegalan dan halaman rumah yang masih terbengkalai untuk kegiatan	Kecamatan Jetis	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas pertanian, Dinas Perikanan, DKUMKM	Rp. 20.000.000	Smart Living	1. jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program GALAMATRA 2. Jumlah lahan terbengkalai yang tergarap			

	produktif cth, untuk menanam tanaman buah, obat (tanaman obat keluarga), tanaman sayur-sayuran, kolam budidaya ikan								
50	PASEBAN (Pelaporan Singkat Emergency dan Kebencanaan) untuk menyajikan pelaporan bencana, peringatan dini dari BMKG, prakiraan cuaca, penyajian data bencana sebagai alat edukasi mitigasi bencana, dan penanggulangan pada saat bencana	BPBD	Kominfo, dinas PU, Dinas Tata Ruang, Satpol PP, Dinas Sosial, BMKG, BASARNAS, BPBD DIY, Komuntas masyarakat	Rp. 279.500.000	Smart Society	Presentase laporan yang benar dan presentase tindak lanjut laporan ; Jumlah masyarakat yang mengakses sistem informasi kebencanaan			

51	Pengembangan aplikasi IBRA (e-Library) , merupakan layanan perpustakaan online perpusdabantul.id	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Disdikpora - Pengembang Aplikasi Distributor/Konsorsium E-book	Rp. 100.750.000	Smart Society	Kemudahan akses, jumlah pengguna, dan jumlah koleksi yang semakin besar;Jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi IBRA ;jumlah data buku dan digital book (e-book) yang di inpt kedalam aplikasi IBRA			
52	Lapor Bantul Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.	Dinas Kominfo	Semua unsur Pemkab Bantul	Rp. 250.000.000	Smart Society	Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dimanapun dan kapanpun, Aspirasi/Keluhan yang masuk dapat tertangani dengan cepat karena arus data infomasi yang real time			
53	UPTD PPT KKPA Hotline 24 Jam	Dinas Sosial PPPA		Rp. 640.314.950	Smart Society	elayanan dan penganan terhadap korban 100%			

54	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	Dinas Sosial PPPA		Rp. 883.554.400	Smart Society	pendataan dan pengelolaan penanganan pmks			
55	UPTD Kesejahteraan dan Puskesmas	Dinas Sosial PPPA		Rp.616.124.000	Smart Society	memenuhi SPM sesuai permensos no.9 tahun 2018			
56	SIPP MAS (Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Perlindungan Masyarakat)	Satpol PP		Rp. 403.990.000	Smart Society	Tersedianya data dan informasi bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum yang akurat dan up to date, tersedianya ruang komunikasi dari kasi ketentraman dan ketertiban kecamatan ke Satpol PPKabupaten Bantul atau sebaliknya.			
57	E-Raport Sistem informasi manajemen penilaian pendidikan SMP berbasis web dan mengintegrasikan data manajemen	Dinas Pendidikan		Rp. 761.620.000	Smart Society	Nilai dan Hasil Kompetensi Siswa dapat di pantau dengan mudah oleh setiap siswa, orang tua dan para pengambil kebijakan			

	pendidikan yang telah dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.								
58	Penambahan menu e-Logistik untuk pendataan logistik yang dibutuhkan dalam penanganan bencana	BPBD	Kominfo, dinas PU, Dinas Tata Ruang, Satpol PP, Dinas Sosial, BMKG, BASARNAS, BPBD DIY, Komuntas masyarakat	Rp. 225.000.000	Smart Society	Jumlah data logistik yang di input kedalam sistem informasi kebencanaan			
59	Intergrasi Sistem Informasi Kebencanaan dengan Peta Rawan Bencana untuk memberikan akses informasi wilayah rawan bencana bagi masyarakat	BPBD	Kominfo, dinas PU, Dinas Tata Ruang, Satpol PP, Dinas Sosial, BMKG, BASARNAS, BPBD DIY, Komuntas masyarakat	Rp. 225.000.000	Smart Society	Jumlah data sistem informasi kebencanaan yang di intergrasikan dengan data peta rawan bencana			
60	Sosialisasi Sistem Informasi	BPBD	Kominfo, dinas PU, Dinas Tata Ruang, Satpol PP, Dinas Sosial, BMKG, BASARNAS, BPBD DIY, Komuntas masyarakat	Rp. 100.000.000	Smart Society	Jumlah konten informasi yang dikemas secara manual dan virtual dan disebarluaskan melalui media			

						massa dan media sosial			
61	Pembangunan “SIPANDU TERPANA” (Sistem Informasi Posyandu Terpadu Sederhana), untuk menyajikan data profile posyandu dan kader posyandu, untuk mempermudah informasi data posyandu yang valid, berbagai kegiatan posyandu, dan mengintegrasikan data prosyandu se kabupaten BANTUL,	Dinas Pengendalian Pendudukan (PPKBPMD)	75 Petugas Operator Desa	Rp. 108.700.000	Smart Society	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah data profile posyandu yang di input kedalam aplikasi SIPANDU TERPANA 2. Jumlah data kader posyandu yang di input kedalam aplikasi SIPANDU TERPANA 3. Jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi SIPADU TERPANA 			

62	Gropyok TBC	Dinas Kesehatan		Rp.540.000.000	Smart Living	Dapat direplikasi di semua kecamatan, Dukungan jelas dan pendanaan tersedia, Dapat memanfaatkan anggaran dana desa, Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan, pengawasan minum obat oleh penderita TBC dapat terpantau.			
63	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan TPS3R (Tempat Pengelelolaan Sampah 3 Reuse, Reduce, Recycle) yang bukan tempat pembuangan sampah tetapi ada aktivitas pemilahan sampah,	Dinas LH		Rp. 1.778.880.000	Smart Environment	1. Jumlah TPS3R yang dibangun ditingkat kecamatan, desa, dan dusun 2. Jumlah anggota JPSM yang melakukan aktivitas pengelolaan sampah di TPS3R			

	penggunaan kembali sampah dalam bentuk lain.								
64	Pemberian PMT (Pemulihan Ibu Hamil, Kekurangan Energi Kronis/ Anemia)	Desa Tri harjo		Rp.10.000.000	Smart Living	1. Jumlah Ibu dan anak yang menerima PMT 2. Jumlah paket PMT *Pemberian makanan tambahan) yang didistribusikan ke ibu dan anak			
65	Pendampingan pemberian PMT (Ibu Hamil dengan KEK), dan pembuatan menu MP ASI	Desa Tri harjo		Rp. 3.000.000	Smart Living	1. Jumlah kegiatan pendampingan pembuatan PMT kepada ibu dengan KEK (Kekurangan Energi Kronis) 2. Jumlah ibu yang mengikuti pelatihan/ pendampingan pembuatan PMT dan MP ASI			

66	Pemeriksaan Sampel Air Bakteriologis pada Rumah Tangga Keluarga Balita KEK/ Stunting	Desa Triharjo		Rp. 1.000.000	Smart Living	Jumlah Rumah Tangga yang terindikasi mempunyai balta Stunting dan diambil airnya untuk diperiksa di laboratorium			
67	Pembentukan Kader JBM (Jam Belajar Masyarakat)	Desa Triharjo		Rp. 6.000.000	Smart Living	Jumlah Kader JBM			
68	Pemutakhiran Data Warga Miskin dengan cara pembetulan kader / surveyor untuk melakukan validasi data BDT (Basis Data Terpadu)	Desa Triharjo		Rp. 2.000.000	Smart Governance	Jumlah data BDT yang di validasi			
69	Pengembangan Sistem Informasi Desa dan profile desa	Desa Triharjo		Rp. 15.000.000	Smart Governance	1. Jumlah data dan informasi yang di input ke Sistem Informasi Desa 2. Jumlah mengakses Web Desa / Sistem Informasi Desa			

70	Pengembangan SDM Desa Wisata dalam bentuk pelatihan bagi pemandu Outbond	Desa Tri harjo		Rp. 100.000.000	Smart Branding	Jumlah pemandu Outbond yang ikut pelatihan			
71	Gelar Tehnologi Tepat Guna	Desa Tri harjo		Rp. 10.000.000	Smart Living	Jumlah kegiatan gelar teknologi tepat guna			
72	Pelatihan dan Pendampingan Industri Kreatif	Desa Tri harjo		Rp. 20.000.000	Smart Economy	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendampingan industri kreatif			
73	Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Kecamatan Sedayu		Rp. 3.960.000	Smart Governance	Pelaksanaan pelayanan terpadu di Kecamatan (PATEN)			
74	Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Kecamatan Sedayu		Rp. 3.086.000	Smart Governance	Fasilitasi pelayanan dan pengolahan data adm kependudukan masyarakat			
75	Peningkatan pelayanan masyarakat IUMK	Kecamatan Sedayu		Rp. 26.620.000	Smart Economy	Jumlah IUMK			

5.8. QUICK WIN SMART CITY

Tabel 4 Quick Win Smart City

No	Program Quick Win	Dimensi
1	Lapor Bantul	Smart Society
2	Jelajah Bantul	Smart Branding
3	One Village one JPSP (OVOJ)	Smart Environment
4	DGS Layanan Kesehatan	Smart Living
5	Kampung UKM Digital	Smart Economy
6	SAPA ASN	Smart Government

BAB VI PENUTUP

Di dalam dokumen Master Plan *Smart City* Kabupaten Bantul ini disampaikan Program Inisiatif dan kerangka kerja *Smart City* dengan fokus pada implementasi peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi dan program berkelanjutan di daerah Kabupaten Bantul.

Selanjutnya dipaparkan profil serta kondisi Kabupaten Bantul saat ini yang mencakup visi dan misi, target pencapaian, kajian geografi dan demografi, struktur organisasi tata kerja perangkat daerah, serta fokus bidang strategi yang dijadikan sebagai landasan implementasi *Smart City* di Kabupaten Bantul dalam 6 (enam) bagian, yaitu:

1. *Smart Governance*
2. *Smart Economy*
3. *Smart living*
4. *Smart Society*
5. *Smart Branding*
6. *Smart Environment*

Dari informasi profil, kondisi, dan potret arsitektur TIK di Kabupaten Bantul, dilakukanlah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) serta analisis risiko sehingga lahirlah rekomendasi implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul dalam inisiatif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam bentuk *Roadmap Smart City* Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022.

Tiap inisiatif dalam *Roadmap Smart City* Kabupaten Bantul dijabarkan secara rinci sehingga bisa dijadikan sebagai panduan yang holistik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk melakukan implementasi inisiatif *Smart City*.

Dokumen Master Plan *Smart City* Kabupaten Bantul ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel yang harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantul, serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul termasuk semua instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tercakup di dalamnya. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa Master Plan *Smart City* Kabupaten Bantul ini harus selalu selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah serta masyarakat Kabupaten Bantul.

Pada akhirnya, dokumen Master Plan *Smart City* Kabupaten Bantul ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan strategis dalam membangun *Smart City* di Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan.



LAPORAN REVIEW MASTERPLAN SMART CITY KAB. BANTUL

2018-2023



KATA PENGANTAR

Laporan Review Masterplan Smart City Kabupaten Bantul disusun untuk mengetahui capaian dan kesesuaian dari program di setiap dimensi Smart City dengan dokumen Masterplan Smart City Kabupaten Bantul tahun 2018 dan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021. Ukuran ketercapaian suatu program ditentukan oleh progres yang telah dijalankan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketercapaian suatu program akan mempengaruhi indeks pemenuhan dimensi Smart City, sehingga dapat dilakukan analisis mendalam terkait program yang mampu berjalan dan memiliki hambatan dari setiap dimensi Smart City. Pentingnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Smart City Kabupaten Bantul ini dilakukan untuk menilai ketercapaian, hambatan dan inisiatif perbaikan yang mampu digunakan untuk bahan pertimbangan dan pengalaman di masa yang akan datang. Pekerjaan yang telah dilakukan telah mencapai 100% dari keseluruhan kegiatan. Laporan Review Masterplan Smart City Kabupaten Bantul berisikan pendahuluan, landasan teori, sasaran Smart City, capaian Smart City, dan lampiran. Laporan ini diharapkan dapat menjadi gambaran dari keseluruhan dokumen pelaksanaan Kegiatan Review Masterplan Smart City Kabupaten Bantul.

Yogyakarta, Juni 2020

(.....)

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Visi dan Misi Smart City	7
2.2 Kerangka Pikir Smart City	9
BAB III PROGRAM KERJA SMART CITY.....	17
3.1 Evaluasi Program Kerja Smart City Kabupaten Bantul.....	18
3.2 Hubungan Misi dan Sasaran Smart City Kabupaten Bantul	24
3.3 Peta Jalan Pembangunan Smart City	26
BAB IV CAPAIAN SMART CITY	51
4.1 Model Evaluasi Smart City Kabupaten Bantul	52
4.2 Tingkat Kematangan Implementasi Smart City	53
4.3 Tahapan Pencapaian Implementasi Smart City.....	54
4.4 Penilaian Capaian Progress Program Kerja	55
4.5 Indeks Pemenuhan Dimensi Smart City	112

BAB V PENUTUP.....	114
5.1 Rekomendasi.....	115
5.2 Penutup	115

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Dimensi Smart City	9
Gambar 2.2. Smart Governance	10
Gambar 2.3. Smart Branding	10
Gambar 2.4. Smart Economy	11
Gambar 2.5. Smart Living	12
Gambar 2.6. Smart Society	12
Gambar 2.7. Smart Environment.	13
Gambar 4.1. Smart City Maturity Level	53
Gambar 4.2. Tahapan Implementasi Smart City	54
Gambar 4.3. Smart City Maturity Level Kab. Bantul	112
Gambar 4.4. Nilai Kematangan Smart City Bantul	112

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Sinkronisasi Misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun	8
Tabel 2.2. Komponen, Variabel dan Indikator Smart City	13
Tabel 3.1. Hubungan Sinkronisasi Elemen Smart City dengan.....	24
Tabel 3.2 Peta Jalan Pembangunan Smart City Kabupaten Bantul	26
Tabel 4.1. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Governance	56
Tabel 4.2. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Branding ...	57
Tabel 4.3. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Economy...	57
Tabel 4.4. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Living.....	58
Tabel 4.5. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Society.....	59
Tabel 4.6 Penilaian Capaian Program Kerja Smart Environment..	61
Tabel 4.7. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Governance ..	62
Tabel 4.8. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Branding.....	64
Tabel 4.9. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Economy.....	67
Tabel 4.10. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Living.	67
Tabel 4.11. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Society.....	69
Tabel 4.12 Penilaian Capaian Program Kerja Smart Environment	71
Tabel 4.13. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Governance	71
Tabel 4.14. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Economy ...	72

Tabel 4.15. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Living.....	73
Tabel 4.16. Penilaian Capaian Program Kerja Smart Society.....	74
Tabel 4.17 Penilaian Capaian Program Kerja Smart Environment	74
Tabel 4.18 Penilaian Program Kerja Jangka Pendek.....	75
Tabel 4.19 Penilaian Program Kerja Jangka Menengah.....	88
Tabel 4.20 Penilaian Program Kerja Jangka Panjang.....	105
Tabel 4.21 Indeks Pemenuhan Dimensi Smart City.....	112



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten merupakan suatu bagian dari wilayah administratif di bawah tingkat provinsi yang memiliki fungsi sebagai ruang dari peradaban manusia dengan berbagai fasilitas penunjangnya. Kabupaten memiliki kewenangan yang sama dengan kota. Kabupaten Bantul adalah salah satu daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan posisi geografis terhadap pusat pertumbuhan (kota) berada di pinggiran (*hinterland*) sehingga beberapa kecamatan merupakan bagian dari Perkotaan Yogyakarta. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk seiring berjalannya waktu, sebagaimana data menjelaskan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2011-2016 rata-rata sebesar 1.66%.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Bantul tersebut akan memacu perkembangan fasilitas pelayanan yang disesuaikan dengan *range* dan *threshold* yang ada. Namun, suatu daerah yang memiliki kondisi semakin dinamis akan berpotensi memunculkan berbagai permasalahan pada penggunaan lahan, pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pemerintahan), infrastruktur, transportasi dan lain sebagainya. Berbagai solusi dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu daerah. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan konsep Smart City. Pemerintah daerah sebagai pemegang amanat rakyat, tentu memiliki hak, kewajiban sekaligus otoritas untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat yang cerdas, partisipatif, dan juga kontributif terhadap kemajuan kabupaten yang bersangkutan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan adanya pertukaran ilmu pengetahuan, pengalaman, dan juga keahlian dalam masyarakat.

Pengembangan Smart City menjadi sebuah tantangan besar untuk diwujudkan. Smart City atau konsep kota pintar ini adalah sebuah konsep tatanan kota yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kota. Kota yang memiliki basis pelayanan, bersifat transparan dan berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Di dalam konteks layanan kota diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang mudah diakses tanpa terbatas lokasi dan waktu. Selain itu, konsep kota cerdas ini juga memang dihadirkan sebagai jawaban untuk pengelolaan sumber daya secara efisien.

Dukungan aplikasi yang terus berkembang serta terciptanya ekosistem kreatif di bidang teknologi, merupakan langkah awal yang baik menuju kota pintar. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kemudian turut berkembang dalam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat, dengan tujuan memperdekat hubungan vertikal antara pemerintah dengan masyarakat. Namun pada kenyataannya Smart City tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Konsep ini

merupakan kombinasi antara teknologi baru dengan pola pikir cerdas tentang penggunaan teknologi dalam sebuah organisasi yang diwujudkan dalam inovasi dan kreatifitas.

Perkembangan kota dan kabupaten di Indonesia yang semakin pesat dan dinamis menuntut kinerja Pemerintah Daerah yang semakin cepat, responsif, solutif, inovatif dan dapat dipercaya. Guna menghadirkan kinerja tersebut maka Pemerintah Daerah membutuhkan bantuan teknologi. Oleh karena itu adanya konsep Smart City (Kota Cerdas) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mampu menghasilkan potensi inovatif untuk menyelesaikan berbagai tantangan perkotaan secara tepat guna pada segala sisi Pemerintah Daerah.

Gerakan menuju 100 Smart City mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan *citizen centric*, sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara masyarakat dengan penyedia layanan yaitu pemerintah daerah. Interaksi dua arah ini akan terus berkembang dan berproses sehingga nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk bermukim dan tangguh dalam merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat. Penerapan konsep Smart City bagi Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menjadi suatu kewajiban. Hal tersebut didukung dengan konsep Smart City yang telah menjadi visi Kabupaten Bantul dan terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Pengembangan dan penerapan konsep Smart City di Kabupaten Bantul bertujuan untuk mewujudkan visi Kabupaten Bantul yaitu:



Berdasarkan visi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 tersebut menunjukkan bahwa adanya keselarasan dengan konsep Smart City, karena dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera maka diperlukan pengembangan dan pengelolaan berbagai sumberdaya sebagai potensi yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Di dalam implementasi konsep Smart City di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul tetap memperhatikan potensi yang ada sebagai kekuatan wilayah untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memacu perekonomian lokal dengan berbagai inovasi dan kreatifitas.

Sejak tahun 2018 Kabupaten Bantul telah berupaya mewujudkan konsep Smart City dengan melibatkan seluruh *stakeholders* terutama masyarakat yang tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subyek pembangunan, lalu dilakukan juga penyusunan Masterplan Smart City Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2023. Pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal dan teknologi, informasi dan komunikasi saling melengkapi dan dikelola dengan baik sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan solusi yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan. Terdapat 6 dimensi dalam konsep Smart City yang diterapkan dalam Kabupaten Bantul yakni *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment*.

Di dalam implementasi konsep Smart City, terdapat lingkungan di luar atau dalam yang mempengaruhi proses dan *output* sehingga perlu adanya *monitoring* dan evaluasi untuk melihat proses yang berlangsung dari setiap program dan hambatan yang terjadi. Program dari setiap dimensi perlu diketahui apakah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan. Apabila ditemukan hambatan maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut cara mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi yang nanti akan dilakukan maka dapat diketahui ketercapaian dari *output* yang dihasilkan, bahkan jika program jangka panjang juga diharapkan dapat menganalisis dampak yang dihasilkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen *Review* Masterplan Smart City Kabupaten Bantul (2018 - 2023) memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari kegiatan *review* Masterplan Smart City Kabupaten Bantul adalah untuk mengetahui capaian dari implementasi program di setiap dimensi Smart City sesuai dengan dokumen Masterplan Smart City Kabupaten Bantul tahun 2018 dan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan *review* Masterplan Smart City Kabupaten Bantul adalah untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi Smart City Kabupaten Bantul. Kemudian dapat merencanakan kembali Masterplan Smart City berdasarkan hasil evaluasi tersebut untuk pelaksanaan Smart City hingga tahun 2023.

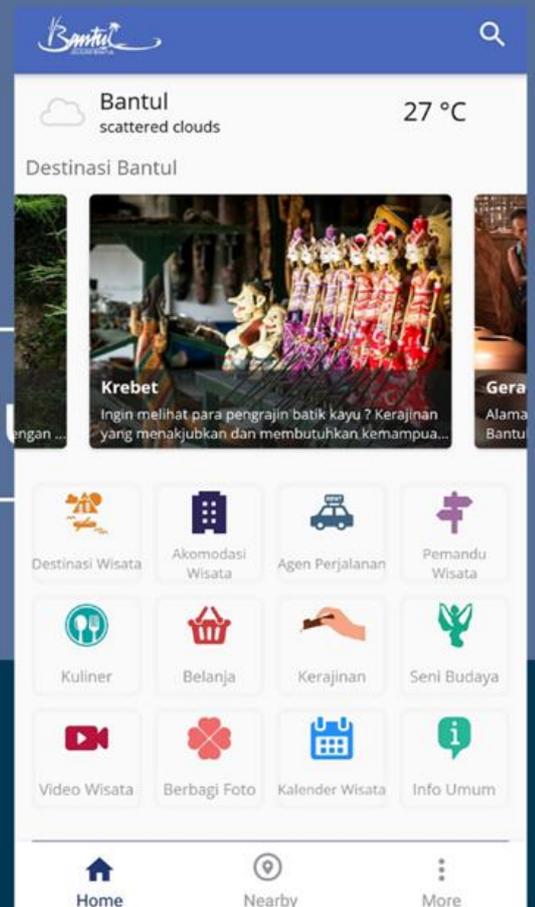
1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan *review* Masterplan Smart City Bantul meliputi identifikasi pencapaian program kerja yang telah disusun pada dokumen Masterplan Smart City Bantul tahun 2018. Identifikasi tersebut dilakukan untuk menilai ketercapaian, hambatan dan inisiatif perbaikan. Namun, di dalam pelaksanaan setiap program tentunya akan berdasarkan kebijakan di atasnya yang telah diprediksikan (tipe perencanaan rutin) dan kebijakan yang tanggap darurat (hasil dari teori kebutuhan), sehingga di dalam pelaksanaan konsep Smart City dapat berpotensi adanya usulan program yang menyesuaikan teori kebutuhan tersebut. Hal tersebut juga perlu dipertimbangkan dalam *monitoring* dan evaluasi untuk melihat relevansinya dengan visi misi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021.



BAB II LANDASAN TEORI

M



2.1 Visi dan Misi Smart City

Visi Smart City Kabupaten Bantul disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025. Hal ini bertujuan untuk terciptanya sinkronisasi program kerja pemerintah sehingga selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Adapun Visi Smart City Kabupaten Bantul sebagai berikut:



Lebih lanjut, berdasarkan Visi Smart City tersebut dijabarkan dalam Misi yaitu: **“Mewujudkan Bantul yang berdaya saing, informatif, Komunikatif, akuntabel dan transparan didukung kolaborasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik”**. Tujuan dari capaian Misi Smart City Kabupaten Bantul dirinci menjadi beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing daerah mengacu pada strategi yang sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana (RPJP, RPJMD);
2. Menumbuhkan nilai kreatifitas dan inovasi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pemasaran (*marketing*) potensi daerah yang dimiliki;
3. Mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif;
4. Mengembangkan potensi Wisata dan kearifan lokal masyarakat sebagai komoditas branding pemasaran wisata budaya Kabupaten Bantul; dan
5. Mewujudkan optimalisasi pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Penyusunan Visi Misi Smart City Kabupaten Bantul selain didasarkan pada dokumen pembangunan disesuaikan juga dengan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul. Harapannya, Smart City Kabupaten Bantul dapat menjadi penggerak perubahan dan solusi dari masalah yang dihadapi tanpa meninggalkan unsur-unsur kearifan lokal yang telah berkembang

pada masyarakat Kabupaten Bantul. Adapun sinkronisasi Misi RPJMD Kabupaten Bantul dengan Tujuan Misi Smart City tertuang pada Tabel 2.1.

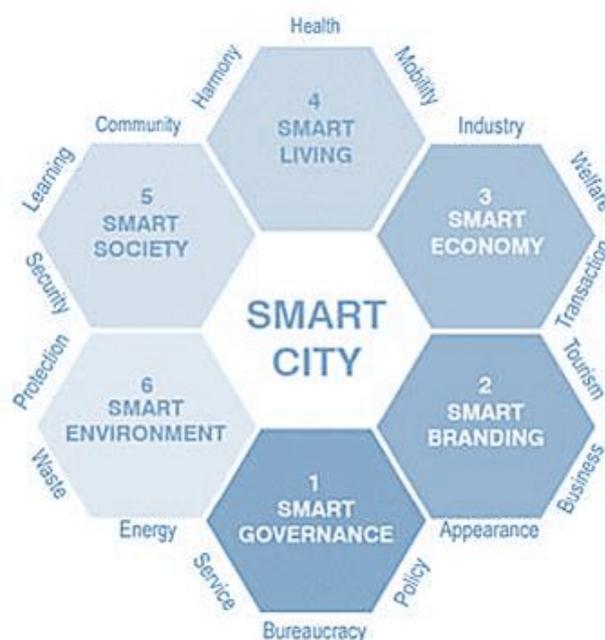
Tabel 2. 1 Sinkronisasi Misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dengan Tujuan Misi Smart City Kabupaten Bantul

MISI RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021		PENJABARAN TUJUAN MISI SMART CITY
MISI 1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	MISI 1 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 diterjemahkan ke dalam Tujuan MISI 5 Smart City Kabupaten Bantul, yakni mewujudkan optimalisasi pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
MISI 2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.	MISI 2 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam Tujuan MISI 2 Smart City Kabupaten Bantul, yaitu menumbuhkan nilai kreatifitas dan inovasi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pemasaran (<i>marketing</i>) potensi daerah yang dimiliki.
MISI 3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.	MISI 3 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam Tujuan MISI 3 Smart City Kabupaten Bantul, yakni mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif.
MISI 4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.	MISI 4 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam Tujuan MISI 4 Smart City Kabupaten Bantul yaitu mengembangkan potensi Wisata dan kearifan lokal masyarakat sebagai komoditas branding pemasaran wisata budaya Kabupaten Bantul.
MISI 5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	MISI 5 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam Tujuan MISI 1 Smart City Kabupaten Bantul yakni, meningkatkan daya saing daerah mengacu pada strategi yang sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana (RPJP, RPJMD).

(Sumber: Data olahan, 2020)

2.2 Kerangka Pikir Smart City

Kerangka pikir Smart City Kabupaten Bantul disusun berdasarkan Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2017-Gerakan Menuju 100 Smart City yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2017. Adapun elemen dalam Smart City Kabupaten Bantul terdiri atas enam elemen antara lain yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart society*, *smart living* dan *smart environment* (**Gambar 2.1**).



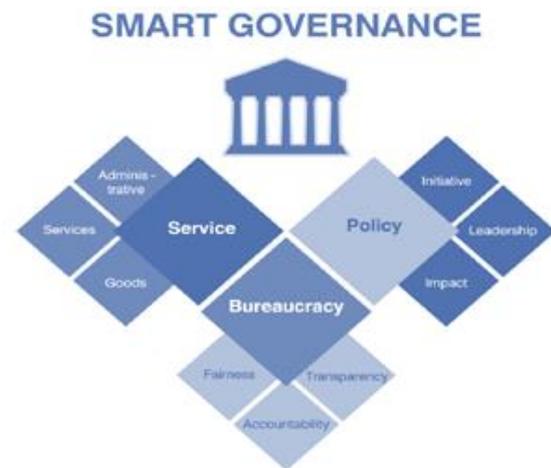
Gambar 2.1 Dimensi Smart City

(Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

a. *Smart Governance*

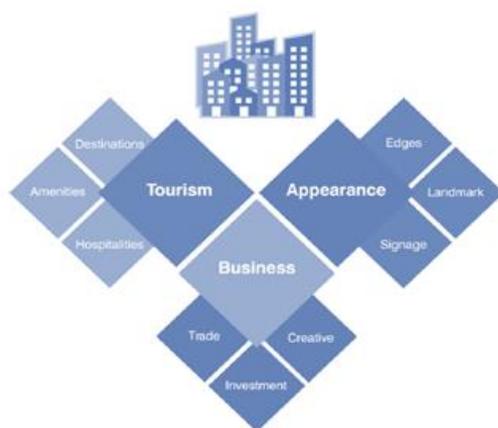
Smart Governance diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar serta tata pamong pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur antara lain yaitu:

1. Pelayanan (*service*).
2. Birokrasi (*bureaucracy*).
3. Kebijakan (*policy*).



Gambar 2. 2 *Smart Governance*
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

b. *Smart Branding*



Gambar 2. 3 *Smart Branding*
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

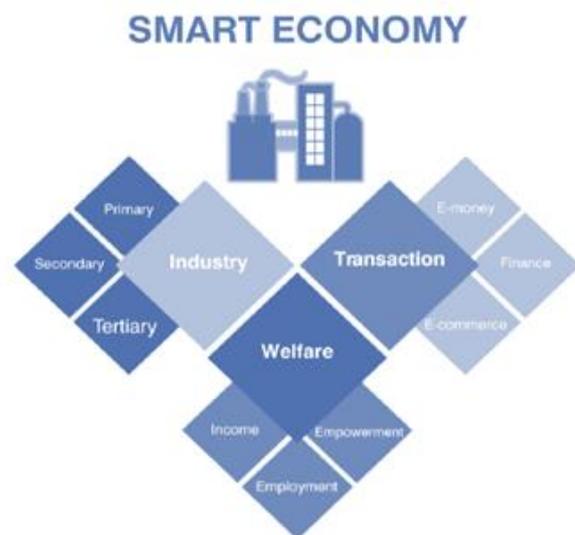
Smart Branding merupakan sebuah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing, serta mampu menarik partisipasi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah, pelaku bisnis dan investor untuk mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sasaran dari *smart branding* yaitu adanya peningkatan daya saing daerah baik dari aspek ekonomi maupun kehidupan sosial. Adapun unsur smart branding meliputi tiga hal yaitu:

1. *Tourism branding* :
membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata.
2. *Business branding*:
membangun dan memasarkan ekosistem bisnis daerah.
3. *City appearance branding*:
membangun dan memasarkan wajah kota.

c. *Smart Economy*

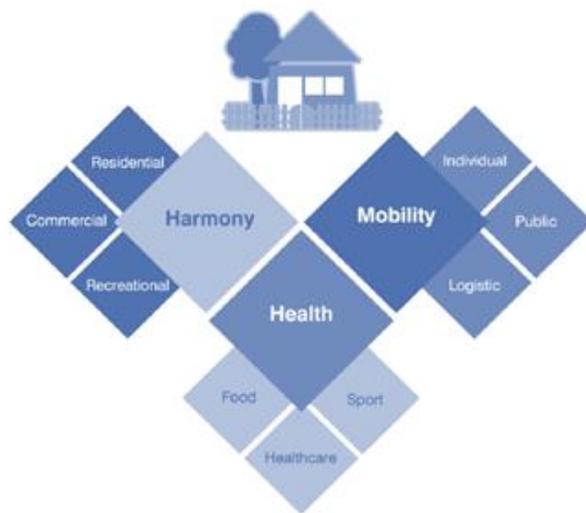
Smart Economy dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi saat ini. Sasaran dari dimensi *smart economy* untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program. Tiga unsur dalam *smart economy* meliputi:

1. Ekosistem industri (*Industry*)
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (*Welfare*).
3. Ekosistem transaksi keuangan (*Transaction*).



Gambar 2. 4 *Smart Economy*
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

d. *Smart Living*



Gambar 2. 5 *Smart Living*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

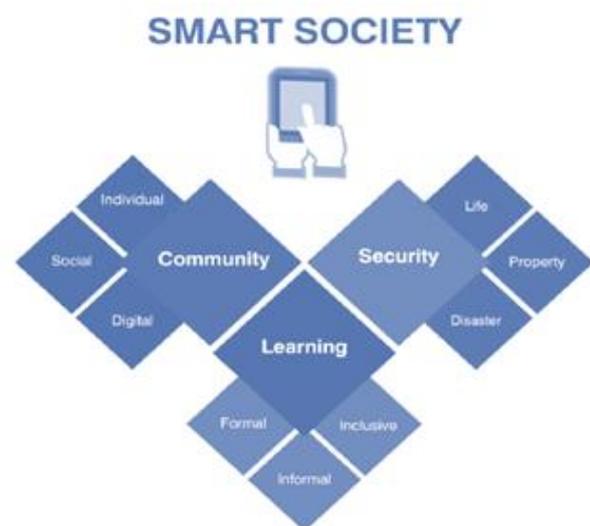
Smart Living merupakan dimensi Smart City yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan tiga elemen yaitu: kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas. *Smart Living* terdiri atas tiga indikator unsur yang terdiri atas:

1. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang selaras dan layak (*Harmony*).
2. Membangun Prasarana Kesehatan (*Health*).
3. Menjamin Ketersediaan Sarana

e. *Smart Society*

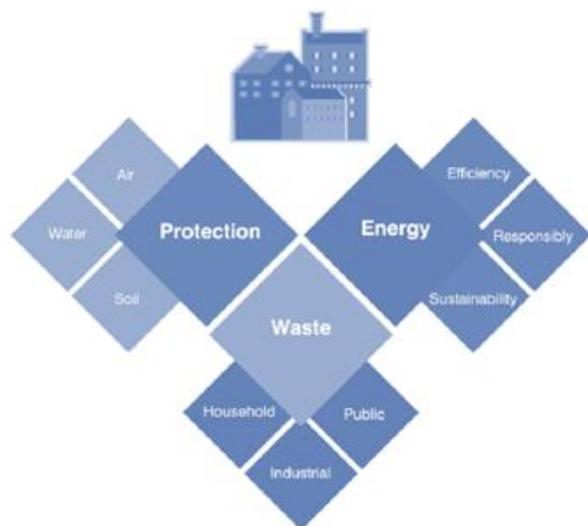
Smart society memfokuskan pada manusia sebagai unsur utama sebuah kota, dimana interaksi antar-warga terjalin semakin kuat dan tanpa sekat dengan kemajuan teknologi yang ada. Tiga elemen unsur di dalam *smart society*, yaitu:

1. Interaksi masyarakat yang efisien (*community*).
2. Ekosistem edukasi yang efisien (*learning*).
3. Sistem keamanan masyarakat (*security*).



Gambar 2. 6 *Smart Society*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

f. *Smart Environment*

Gambar 2. 7 *Smart Environment*
 Sumber: Citiasia Center for Smart Nation
 (CCSN)

Smart Environment merupakan pengelolaan tata kelola lingkungan dalam pembangunan kota dengan cara cerdas dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Adapun unsur dalam *smart environment* meliputi:

1. Program perlindungan terhadap lingkungan (*Protection*).
2. Pengembangan tata kelola sampah dan limbah (*Waste*).
3. Pengembangan tata kelola energi yang bertanggungjawab (*Energy*).

Tabel 2. 2 Komponen, Variabel dan Indikator Smart City

NO	KOMPONEN SMART CITY	VARIABEL	INDIKATOR SMART CITY
1	<i>SMART GOVERNANCE</i>	<i>Service</i>	Pelayanan administrasi kepada masyarakat
			Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan masyarakat
			Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa bagi masyarakat
		<i>Bureaucracy</i>	Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, bertanggungjawab dan keterbukaan
		<i>Policy</i>	Kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme aspirasi masyarakat secara berkesinambungan

NO	KOMPONEN SMART CITY	VARIABEL	INDIKATOR SMART CITY
			Sistem informasi kebijakan pemerintah yang dapat diakses masyarakat dengan mudah
2	<i>SMART BRANDING</i>	<i>Tourism branding</i>	Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan Infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan Budaya ramah pengunjung
		<i>Business branding</i>	Platform dan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman Ekosistem investasi yang mudah dan efektif Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah
		<i>City appearance branding</i>	Penataan kembali wajah kota Membangun batas wilayah, <i>landmark</i> , <i>signage</i> , <i>path</i> , dan <i>node</i>
3	<i>SMART ECONOMY</i>	<i>Industry</i>	Daya saing industri daerah pada leading sector
		<i>Welfare</i>	Kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan rumah tangga Penyerapan angkatan kerja Pemberdayaan ekonomi masyarakat
		<i>Transaction</i>	Ekosistem transaksi keuangan digital menuju masyarakat <i>less cash</i>

NO	KOMPONEN SMART CITY	VARIABEL	INDIKATOR SMART CITY
			Bankable dan memiliki akses terhadap permodalan Ekosistem ekonomi digital dalam mendorong industri <i>e-commerce</i> dan <i>marketplace</i>
4	<i>SMART LIVING</i>	<i>Harmony</i>	Lingkungan tempat tinggal yang residential, commercial, recreational
		<i>Health</i>	Akses terhadap ketersediaan food, healthcare, sport
		<i>Mobility</i>	Ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas
5	<i>SMART SOCIETY</i>	<i>Community</i>	Interaksi sosial masyarakat Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
		<i>Learning</i>	Ekosistem pendidikan yang saling mendukung Platform edukasi bagi masyarakat
		<i>Security</i>	Sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi masyarakat
6	<i>SMART ENVIRONMENT</i>	<i>Protection</i>	Tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara Ruang Terbuka Hijau Restorasi Sungai Polusi Udara Sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga

NO	KOMPONEN SMART CITY	VARIABEL	INDIKATOR SMART CITY
		<i>Waste</i>	Tata kelola limbah industri (<i>industrial</i>) Tata kelola limbah dan sampah publik (<i>public</i>) Keseimbangan ekosistem lingkungan
		<i>Energy</i>	Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

(Sumber: Data olahan, 2020)



PATEN

(PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN)

KECAMATAN SANDEN

ngja
Istimewa

Bantu
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE



BAB III PROGRAM KERJA SMART CITY

3.1 Evaluasi Program Kerja Smart City Kabupaten Bantul

Evaluasi terhadap program kerja Smart City Kabupaten Bantul yang telah disusun perlu dianalisis dari segi prioritasnya setiap inisiasi akan di klustering kedalam empat kriteria sebagai berikut:

- a. **STRATEGIK (S)**. *Label Strategic* berarti inisiasi ini sangat penting untuk dilakukan karena terkait layanan yang sangat diperlukan saat ini juga untuk disiapkan oleh pemerintah.
- b. **KEY OPERATIONAL (K)**. *Label Key Operational* ini memandang inisiasi penting untuk dilakukan tapi tidak urgent. Akan sangat dibutuhkan dimasa yang akan datang.
- c. **HIGH POTENTIAL (H)**. *Label High Potential* diberikan kepada inisiasi yang penting namun masih jauh untuk dilaksanakan.
- d. **SUPPORT (S)**. Label ini diberikan kepada inisiasi yang bersifat tidak terlalu penting untuk layanan tapi cukup membantu jika dilakukan.

Pembangunan Smart City Kabupaten Bantul meliputi 6 (enam) elemen yaitu:

1. *Smart Governance*

Smart governance merupakan dimensi Smart City yang disasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.



Adapun klustering terhadap target dari *smart governance* adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik (**Strategik**)
 - a) Peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan dan dirasakan kemudahannya terutama dalam kelengkapan administrasi program inovasi layanan administrasi kependudukan online dari DISDUKCAPIL dan perizinan online dari DPMT Kab. Bantul. Dengan adanya inovasi tersebut sangat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan. Peningkatan sistem administrasi untuk ASN dalam mempermudah pekerjaannya seperti kemudahan dalam pengarsipan dokumen surat melalui e-surat, serta aplikasi SAPA ASN yang digunakan untuk mempermudah pegawai ASN dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

- b) Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan masyarakat salah satunya melalui program kerja pengembangan Aplikasi e-retribusi yang terdiri dari e-retribusi pelayanan persampahan (DLH), pemakaian laboratorium lingkungan (DLH), uji kualitas air (DINKES), pasar (DISDAG), rusunawa (DPUPKP), menara telekomunikasi (DISKOMINFO), pariwisata (DINPAR), dan pelayanan pendidikan (DINKES).
- 2) Meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi (**Key Operational**)
- a) Pengembangan Sistem informasi kebijakan pemerintah yang dapat diakses masyarakat dengan mudah seperti pengembangan JDIH yang digunakan untuk mempublikasikan produk hukum, konsultasi online untuk masyarakat, serta pengajuan produk hukum oleh OPD.
 - b) Tersedianya sistem informasi monitoring barang/jasa dalam SIMDAN (Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa).
 - c) Tersedianya wadah untuk masyarakat memberikan aspirasinya melalui Jaring Aspirasi.
- 3) Mengintegrasikan berbagai program dalam sebuah skema kebijakan (**High Potensial**)
- Pengembangan Bantul Smart City, Bantul Satu Data, dan Bantul Hub menjadi program kerja yang masuk dalam kategori *High Potensial*. Pengembangan Bantul Smart City dijadikan sebagai wadah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengintegrasikan berbagai sistem informasi maupun aplikasi yang ada menjadi satu kesatuan aplikasi portal layanan publik. Bantul Satu Data menjadi salah satu bentuk keterlibatan Kabupaten Bantul dalam Program Pemerintah Pusat yaitu *One Data Policy*. Sedangkan, Bantul Hub sebagai media interoperabilitas data dan informasi antar sistem dalam pengembangan Bantul Smart City dan Bantul Satu Data.

2. Smart Branding

Smart branding memiliki sasaran untuk peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Adapun klustering terhadap target dari smart branding adalah sebagai berikut:



- 1) Mengembangkan pelayanan atraksi pariwisata dan potensi ekonomi lokal serta membangun wajah kota (**Strategik**)
 - a) Mengembangkan aplikasi dengan melengkapi fitur terkait atraksi wisata dan akomodasi yang mendukung, serta dilakukan juga sosialisasi terkait aplikasi tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan pelayanan (Jelajah Bantul)
 - b) Mengembangkan pola pemasaran dan *branding* produk yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) lokal yaitu melalui UMKM dengan memberdayakan masyarakat melalui media sosial, pameran dan acara perlombaan (JAGORIKO)
 - c) Menata wajah kota dengan membangun *landmark* melalui perencanaan dan pengembangan wilayah (Master Plan Pembangunan Gerbang Selamat Datang Kabupaten Bantul)
- 2) Mengembangkan berbagai media publikasi demi mengedukasi masyarakat terkait Smart City dan pengelolaan data terkait ekosistem pariwisata (**Key Operational**)
 - a) Mengedukasi masyarakat dengan media publikasi elektronik dan massa terkait program Smart City yang dijalankan Kabupaten Bantul akan meningkatkan informasi masyarakat dan transparansi kinerja pemerintah (Pengelolaan Informasi Media Cetak dan *Media Social*)
 - b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terkait pengelolaan data statistik wisata dengan melibatkan masyarakat dan *stakeholder* sekitar (Pengembangan SIM Data Kunjungan Objek Wisata dan Desa Wisata)
- 3) Membangun pusat pelayanan informasi terkait ekosistem pariwisata (**High Potential**)
 - a) Memberikan pelayanan dan informasi terkait dengan pariwisata kepada para wisatawan dengan membangun pusat pelayanan yang mempertimbangkan posisi strategis dari beberapa pusat pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Bantul (Pembangunan TIC)

3. Smart Economy

Smart economy elemen Smart City dimana program kerjanya bertujuan untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta

meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.

Adapun klustering terhadap target dari *smart economy* adalah sebagai berikut:



- 1) Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (**Strategik**)
 - a. Membangun ekonomi digital dalam mendorong industri e-commerce dan *marketplace* seperti Marketplace Pasar Desa/ Pasar Tradisional.
 - b. Menyelenggarakan Pasar Sehat Bantul.
 - c. Meningkatkan penyerapan angkatan kerja melalui program Padat Karya Tunai.
- 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat (**Key Operational**)
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas melalui Program Kerja Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah seperti SIPENKUH dan GERIMIS SENJA.
 - b. Mengadakan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin di sekitar melalui program kerja PERAS HABIS.

4. Smart Living

Smart living memiliki sasaran untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Adapun klustering terhadap target dari *smart living* adalah sebagai berikut:



- 1) Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas (**Strategik**)
 - a) Mengembangkan integrasi sistem informasi kesehatan dan NIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat (Aplikasi DGS Layanan Kesehatan)

- b) Melaksanakan upaya mitigasi dan pengembangan sistem informasi terkait riwayat perjalanan masyarakat di masa pandemik (Pengembangan informasi siaga Covid-19 melalui portal *website*)
- 3) Harmonisasi tata ruang wilayah dan peningkatan produktivitas lahan (**High Potential**)
- a) Memanfaatkan lahan terbuka demi meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian dengan memberdayakan masyarakat sekitar (GALAMATRA dan ELODEA)
 - b) Tersedianya layanan informasi tata ruang berbasis GIS yang dapat diakses oleh masyarakat (SIPETARUNG)
 - c) Terintegrasinya sistem informasi penataan ruang dengan database pemanfaatan lahan berbasis GIS (*Cybernetics* Tata Ruang)
- 4) Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia melalui inovasi, pembelajaran dan pengembangan layanan internal (**Support**)
- a) Menciptakan masyarakat yang inovatif dan peka terhadap informasi (Gelar Teknologi Tepat Guna dan Pembentukan Kader JBM)
 - b) Mengembangkan sistem pelayanan internal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan (WA-Tantri, SIPANDU TERPANA)

5. Smart Society

Smart society memiliki sasaran yang difokuskan pada manusia sebagai subyek. Elemen ini menitik beratkan pada bagaimana menciptakan masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi.



Adapun klustering terhadap target dari *smart society* adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan ekosistem pendidikan melalui platform edukasi masyarakat (**Support**)

- a) Membangun aplikasi e-learning guna meningkatkan mutu pembelajaran siswa.
 - b) Menyediakan buku digital dan layanan perpustakaan keliling melalui IBRA.
- 2) Meningkatkan sistem manajemen keamanan dan keselamatan masyarakat (**Strategik**)
- a) Adanya Sistem Informasi SIPP MAS (Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Perlindungan Masyarakat) sebagai penyediaan data dan informasi terkait dengan keamanan masyarakat guna meningkatkan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kabupaten Bantul.
 - b) Pelaporan Singkat *Emergency* dan Kebencanaan atau disingkat PASEBAN menjadi salah satu sistem manajemen yang ada di Kabupaten Bantul yang menyajikan pelaporan bencana, peringatan dini BMKG, prakiraan cuaca, penyajian data bencana sebagai alat edukasi mitigasi bencana, penanggulangan bencana, serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.
- 3) Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (**Key Operational**)
- a) Menyelenggarakan Expo Fair sebagai kegiatan tahunan di Kabupaten Bantul. Expo Fair menjadi salah satu cara dalam pengembangan komunitas warga dengan cara memasarkan produk unggulan masing-masing kelompok/UMKM.
 - b) Pengembangan pelayanan administrasi melalui Lapor Bantul menjadi salah satu bentuk pelayanan aspirasi dari masyarakat ke Pemerintah Daerah.

6. Smart Environment

Smart environment memiliki sasaran untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Bantul yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

Adapun klustering terhadap target dari smart living adalah sebagai berikut:

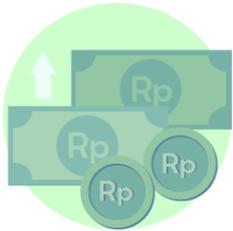


- 1) Menjaga daya dukung lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (**Strategik**)
 - a) Melaksanakan pengelolaan sampah dengan memberdayakan masyarakat (*One Village one JPSM/OVOJ* atau Jaringan Pengelolaan Sampah Mandiri)
 - b) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah atau limbah (Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan TPS3R)
 - c) Membangun layanan dalam mendukung lingkungan yang bersih dan sehat (Aplikasi Layanan Sanitasi Tinja)
- 2) Mengembangkan data dan informasi terkait lingkungan demi mengendalikan pencemaran lingkungan (**Key Operational**)
 - a) Pengembangan sistem informasi dan sosialisasi terkait pencemaran lingkungan (Susun Dokumen Lingkungan (SUDOKU))
- 3) Memanfaatkan energi dan Sumberdaya Alam dalam meningkatkan produktivitas pertanian (**High Potential**)
 - a) Pelaksanaan kegiatan pertanian dengan sistem penjemuran yang menggunakan energi dan potensi yang ada (SIPERKASA)

3.2 Hubungan Misi dan Sasaran Smart City Kabupaten Bantul

Tabel 3. 1 Hubungan Sinkronisasi Elemen Smart City dengan Misi Pembangunan

Elemen Smart City	Misi	Deskripsi
Smart Governance	Misi 1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam mencapai proses pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan.
Smart Living & Environment	Misi 4	Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang bertanggung-jawab, dan berkelanjutan sehingga terciptanya lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Elemen Smart City	Misi	Deskripsi
Smart Economy & Branding	Misi 3	<p>Mewujudkan ekosistem lingkungan yang berdaya saing yang dikemas dengan branding yang menarik guna mendorong pemasaran potensi perekonomian daerah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.</p> 
Smart Society	Misi 2&5	<p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terciptanya masyarakat yang lebih produktif, komunikatif, dan interaktif.</p>

3.3 Peta Jalan Pembangunan Smart City Kabupaten Bantul 2018 - 2023

Peta jalan pembangunan Smart City Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2023 merupakan hasil *review* dari pelaksanaan program kerja yang terdapat dalam Masterplan Smart City Tahun 2018-2023 dan dengan memperhatikan RPJMD Tahun 2011 - 2019 serta pelaksanaan Program Smart City, maka Peta Jalan Pembangunan Smart City Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2023 tertuang pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Peta Jalan Pembangunan Smart City Perdimensi

SMART GOVERNANCE

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun Awal Pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub Dimensi	Keterangan	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023						
1	e-Surat	a. Pengembangan aplikasi berbasis website	DISKOMINFO							BKPP	Aplikasi SAPA ASN	Misi 1	Bureaucracy	Usulan program baru	
		b. Sosialisasi aplikasi e-Surat													
		- Surat masuk									-				
		- Surat keluar													
		c. Pengembangan tandatangan digital							BSSN						
2	Pengembangan Aplikasi e-Retribusi	a. Pengembangan <i>platform</i>	DISKOMINFO							BPD DIY, DISKOMINFO dan GOJEK		Misi 1	Service	Program kerja Masterplan	
		b. e-retribusi pelayanan persampahan	DLH												
		c. e - retribusi pemakaian laboratorium lingkungan	DLH												Usulan program baru

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun Awal Pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub Dimensi	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		d. e-retribusi uji kualitas air	DINKES											
		e. e-retribusi pasar	DISDAG											
		f. e-retribusi rusunawa	DPUPKP											
		g. e-retribusi menara telekomunikasi	DISKOMINFO											
		h. e-retribusi pariwisata	DINPAR											
		i. e - retribusi pelayanan Pendidikan	DINKES											
3	Bantul Satu Data	a. Menjalin kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial dan Badan Pusat Statistik	DISKOMINFO								Misi 1	Bureaucracy	BAN	
		b. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati terkait Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul												
		c. Membangun dan menghubungkan portal data Bantul ke portal data nasional (http://data.go.id/ dan https://tanahair.indonesia.go.id/)												
		d. Menyusun Rancangan Keputusan Bupati terkait Tim Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul												
		e. Menyusun Rancangan SOP terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul												
		f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan SDI	FORUM SDI											

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun Awal Pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub Dimensi	Keterangan	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023						
		g. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	DISKOMINFO												
		h. Menginventarisasi data statistik dan data geospasial	FORUM SDI												
		i. Menetapkan daftar data (data statistik dan geospasial)													
		j. Pengumpulan dan produksi data statistik dan geospasial	SELURUH OPD												
		k. Memeriksa data statistik dan data geospasial sesuai prinsip SDI	DISKOMINFO												
		l. Penyebarluasan data statistik dan data geospasial													
		m. Integrasi portal Satu Data Bantul dengan Portal Data Pemda DIY													
		n. Proyeksi Data Makro Ekonomi													
		o. Integrasi portal Satu Data Bantul dengan aplikasi di lingkungan pemda Bantul melalui sistem penghubung layanan (Bantul Hub)													
4	Pelayanan Administrasi Kependudukan	a. Pembangunan Aplikasi Dukcapil SMART	DISDUKCAPIL							DISKOMINFO		Misi 1	Service	Usulan program baru	
		b. Pelayanan Jemput Bola (MORO LEGA)													

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun Awal Pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub Dimensi	Keterangan						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023											
		c. SITUPAT																		
		d. Digitalisasi Arsip																		
		e. Pemutakhiran Data Kependudukan																		
		f. AKSI MESRA																		
		g. Integrasi Data NIK dengan Pusat																		
		h. ATM KTP																		
		i. Aksi Simpati (Akta Kematian Sehari Jadi)																		
		j. PAGODA (Perekaman KTPeL Plus Test Golongan Darah) - Memasukkan elemen data golongan darah dalam wajib KTP																		
5	SAPA ASN (Aplikasi Pelayanan Terpadu Aparatur Sipil Negara)	a. Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	BKPP							DISKOMINF O dan seluruh OPD Kabupaten Bantul		Misi 1	Bureaucracy	Program kerja Masterplan						
		b. Pembinaan dan pengembangan aplikasi																		
		c. Sosialisasi aplikasi SAPA ASN secara manual dan virtual melalui media massa dan media sosial																		
6	Perizinan	a. Perizinan online	DPMPT							DISKOMINF O		Misi 1	Service	Usulan program baru						

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun Awal Pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub Dimensi	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		b. Pengembangan Sistem Aplikasi Perizinan Online								-				
		c. Pembayaran retribusi perizinan melalui ATM							BPD DIY					
		d. Peningkatan pelayanan respon pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal							-					
		e. Pengelolaan jasa bongkar dengan pembayaran di muka							BPD DIY	Usulan program baru				
		f. Perizinan dan Sistem Layanan Jemput Antar (Nasi Putar)							Bank BPD, OPD terkait (DISHUB, DPUPKT, DPPKP, dll)	Program kerja Masterplan				
7	Pembayaran PBB	a. Pengembangan Barcode SPPT PBB	BKAD							BSSN	Misi 1	Service	Usulan program baru	
		b. Sosialisasi <i>Barcode</i> SPPT PBB												
		c. Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak PBB												
8	Pelayanan Pajak	a. SISARI (Validasi Selasa Sehari)	BKAD							-	Misi 1	Service	Usulan program baru	
		b. Pelayanan Mobil Keliling							-					
		c. E-SPTPD							Pihak Ketiga, Bank BPD DIY					

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun Awal Pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub Dimensi	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		d. Pemasangan <i>Tapping Box</i> di hotel dan restoran								BPD DIY		Bureaucracy	Program kerja Masterplan	
		e. Aplikasi LAPAK BANTUL							17 Kecamatan, 75 Desa					
		- Pembangunan dan Pengembangan aplikasi												
		- Sosialisasi aplikasi												
9	Pelayanan PKB	a. Pembangunan Aplikasi SIPENTOL (Sistem Informasi Pendaftaran Online)	DISHUB							DISKOMINFO	e- retribusi	Misi 1	Service	Program kerja Masterplan
		b. Pengadaan Sistem Informasi Pendaftaran Online							Usulan program baru					
		c. Pengembangan integrasi SIPENTOL dengan e-retribusi							Usulan program baru					
		d. Penerapan Smart Card												
10	Bantul Smart Service	a. Perencanaan Bantul Smart Service	DISKOMINFO							DUKCAPIL	SIAK	Misi 1	Service	Usulan program baru
		b. Pembuatan Bantul Smart Service												
		c. Sosialisasi Bantul Smart Service												
11	Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu	Sosialisasi kepada masyarakat agar dapat melakukan pengurusan administrasi kependudukan secara mandiri	KECAMATAN							DUKCAPIL	-	Misi 1	Service	Program kerja Masterplan

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun Awal Pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub Dimensi	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	Kecamatan) Berhadiah													
12	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengembangan Aplikasi SIMDAN	BAG LPBJ							DISKOMINFO		Misi 1	Bureaucracy	Program kerja Masterplan
13	JDIH Dokumen Informasi Hukum	a. Peningkatan fitur JDIH	BAG . HUKUM							DISKOMINFO	JDIH Nasional	Misi 1	Service	Usulan program baru
		b. Pengembangan JDIH yang terintegrasi dengan JDIH pusat												
14	e-Audit	Pembangunan Aplikasi e-audit	INSPEKTORAT							DISKOMINFO	SIMRAL	Misi 1	Bureaucracy	Usulan program baru
15	Pengawasan Kinerja ASN	Pengembangan Aplikasi Kehadiran	BKPP							DISKOMINFO	SIMPEG	Misi 1	Bureaucracy	Usulan program baru
	Sistem penilaian kinerja pegawai	Pembangunan aplikasi e-kinerja												
16	Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	a. Jetis One Stop Service (JETIS JOSS) Pelayanan Kecamatan Berbasis <i>Online</i>	KECAMATAN							DUKCAPIL, DKUKM, DISDAG, DPMPT, DINSOSPPPA		Misi 1	Service	Program kerja Masterplan
		b. Pelayanan kolektif administrasi kependudukan oleh dukuh												Usulan program baru
		c. Yan Perum (Layanan Antar KTP sampai rumah)								DUKCAPIL				Program kerja Masterplan

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun Awal Pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub Dimensi	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		d. Go Go to School (GOVERNMENT GOES TO SCHOOL)								DISKOMINFO			Usulan program baru	
17	Pelayanan Data di Kecamatan	a. JETRUDAL (Jetis Rumah Data Lengkap)	KECAMATAN							DISKOMINFO	Misi 1	Service	Program kerja Masterplan	
		b. Pemanfaatan geoportal kabupaten							Pihak Ketiga	Usulan program baru				
		c. Pembangunan Aplikasi SIM Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (UMK)							DISKOMINFO, DPMPT, DKUKMP	Program kerja Masterplan				
18	Pendaftaran ORMAS online	a. Sosialisasi website pendaftaran ormas	KESBANGPOL								Misi 1	Service	Usulan program baru	
		b. Peningkatan fitur pendaftaran												
19	KAPERU (KK Baru untuk pengantin Baru)	Pengintegrasian SIAK dengan SIMKAH sehingga KK lama sebelum menikah otomatis berubah	DISDUKCAPIL							DISKOMINFO	Misi 1	Service	Usulan program baru	
20	Integrasi Sistem Informasi Desa dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	a. Melakukan validitas data kependudukan b. Mensinkronisasikan SID dan SIAK	DISKOMINFO							BAPPEDA, BAG PEMDES, DUKCAPIL, 17 kecamatan, 75 Desa	Misi 1	Bureaucracy	Program kerja Masterplan	

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun Awal Pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub Dimensi	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
21	Sistem pendaftaran tanah	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	KECAMATAN							BPN		Misi 1	Service	Program kerja Masterplan
22	Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Meningkatkan kesadaran pentingnya administrasi kependudukan bagi masyarakat	KECAMATAN							-		Misi 1	Service	Program kerja Masterplan
23	Pemutakhiran Data Warga Miskin	Pembetulan kader / surveyor untuk melakukan validasi data BDT (Basis Data Terpadu)	KECAMATAN							-		Misi 1	Bureaucracy	Program kerja Masterplan
24	Sistem Informasi Desa dan Profile	Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Profil Desa	KECAMATAN							-		Misi 1	Service	Program kerja Masterplan
25	E-Arsip - GETAR BAHANA (Gerakan Tertib Arsip Bantul Harmoni dan	Meningkatkan kesadaran mengenai arsip dengan cara gencar sosialisasi serta melakukan pendampingan pada masyarakat	DISPUSIP							Telkom dan ANRI		Misi 1	Bureaucracy	Program kerja Masterplan

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun Awal Pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub Dimensi	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	Akuntabel)													
26	Bantul Hub (Media Interoperabilitas Data dan Informasi Antar Sistem)	a. Pembuatan Arsitektur	DISKOMINFO								Misi 1	Bureaucracy	Usulan program baru	
		b. Pembangunan Bantul Hub												

SMART BRANDING

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1	Pengembangan aplikasi "Jelajah Bantul" untuk penambahan konten dan	a. Pendataan informasi berbagai wisata, kuliner, ekonomi, dll b. Pengembangan aplikasi yang dapat diunduh oleh masyarakat dan wisatawan c. Pemasaran potensi wisata Bantul integrasi dengan Aplikasi Jelajah Bantul	DISPAR							DISKOMINFO, UGM, Akakom, DINBUD, KUKMP, DISDAG, Asosiasi Pelaku Wisata, DPUPKP, BAPPEDA		Misi 3	Tourism	Program kerja Masterplan Program kerja Masterplan

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	pemutahiran data													
2	Sosialisasi aplikasi Jelajah Bantul	Sosialisasi melalui media sosial dan media massa	DISPAR							DISKOMINFO, UGM, Akakom, DINBUD, KUKMP, DISDAG, Asosiasi Pelaku Wisata, DPUPKP, BAPPEDA		Misi 3	Tourism	Program kerja Masterplan
3	Penambahan informasi data museum pada Aplikasi Jelajah Bantul	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pendataan museum sebagai tambahan obyek wisata di Jelajah Bantul b. Memberdayakan masyarakat berusia muda untuk melestarikan warisan budaya c. Mengisi konten seni budaya di aplikasi Jelajah Bantul seperti acara- acara tertentu 	DINBUD							DISPAR		Misi 3	Tourism	Usulan program baru
4	SIM Data Kunjungan Objek Wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan SIM Data Kunjungan b. Sosialisasi SIM Data Kunjungan 	DISPAR									Misi 3	Tourism	Program kerja Masterplan
5		a. Penyusunan Masterplan Gerbang Selamat Datang Kabupaten Bantul	BAPPEDA									Misi 1		

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	Landmark/Identitas Bantul	b. Pembangunan Gerbang Selamat Datang Kabupaten Bantul sebagai ciri identitas masuk Bantul								DPUPKP dan DPTR		Appearance	Program kerja Masterplan	
6	JAGORIKO (Jajan Tonggo Nglarisi Konco)	a. Membantu UMKM berbasis SDA lokal	KECAMATAN								Misi 3	Welfare	Usulan program baru	
		b. Sosialisasi branding di masyarakat sekitar												
		c. Menyelenggarakan acara pameran produk lokal dan lomba												
		d. Branding Jagoriko												
7	Pembangunan TIC (Tourism Information Center) untuk memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan yang melewati obyek wisata pantai	Pembangunan TIC dan sosialisasi	DISPAR								Misi 3	Tourism	Program kerja Masterplan	
8	Pengembangan SDM Desa Wisata dalam bentuk pelatihan bagi	Pelatihan pemandu outbond	DESA							DISPAR	Misi 2	Tourism	Program kerja Masterplan	

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	pemandu Outbond													

SMART ECONOMY

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1	Info Pangkalan Gas "TELO KASPO" (Temukan Lokasi Pangkalan Gas Pada Android)	a. Pengembangan aplikasi berbasis Android	DISDAG							-		Misi 3	Welfare	Program kerja Masterplan
		b. Pendataan pangkalan gas dan plotting												
		c. Sosialisasi kepada masyarakat terkait aplikasi												
2	Pasar Sehat Bantul (PASEBAN)	a. Identifikasi kondisi pasar	DISDAG									Misi 3	Welfare	Usulan program baru
		b. Sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat												
3		a. Pembuatan Aplikasi Android Harga Bahan Pokok Kabupaten Bantul	DISDAG							-		Misi 3		

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	Pasar tradisional <i>online</i>	- Pendataan								DISKOMINFO		Transaction	Usulan program baru	
		- Pengembangan Aplikasi												
		b. <i>Market Place</i> Pasar Tradisional												
		- Pendataan pedagang												
		- Sosialisasi												
		c. Pengembangan Aplikasi <i>Market Place</i> yang terintegrasi dengan Aplikasi lain								DISKOMINFO dan DPPKP	SIPADU			
4	Sistem informasi pangan terpadu (SIPADU)	Pengembangan Aplikasi SIPADU	DPPKP						DISKOMINFO, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Ternak, Kelompok Wanita Tani		Misi 3	Welfare	Program kerja Masterplan	
		- Pengelolaan data digital di sektor pertanian berbasis <i>website</i>												
5	Peningkatan kesempatan kerja	a. Padat Karya Tunai (Produksi Alat Kesehatan)	DKUKMP						DISDAG, DINKES		Misi 3	Industry	Usulan program baru	
		b. Pembuatan Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS						DISKOMINFO			Welfare	Program kerja Masterplan	

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub	Keterangan		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023							
6	Pengembangan UMKM	a. Pengembangan Kampung UKM Digital	DKUKMP							DISKOMINFO, DISDAG, Telkom	Misi 3	Industry	Program kerja Masterplan			
		b. Pengembangan Kewirausahaan UMKM	KECAMATAN							-			Usulan program baru			
		c. Pengembangan UMKM Produksi Jamu								DPPKP, DLH, DKUKMP, DISDAG			Program kerja Masterplan			
		d. Pelatihan Pengembangan Industri Kreatif	DESA													
		e. Pengembangan Aplikasi Gateway UMKM	KECAMATAN										DEKRANAS Kecamatan			Usulan program baru
		- Pemantauan Kegiatan UMKM														
		- Pendataan UMKM														
		f. Peningkatan pelayanan masyarakat IUMK											-			Program kerja Masterplan
		g. Pembangunan Sistem Industri Kreatif Sektor Kriya untuk <i>fashion</i>	DKUKMP										DISKOMINFO			Usulan program baru
		h. PERAS HABIS (Koperasi Sahabat Si Miskin)											DINSOSPPPA, BAPPEDA, DUKCAPIL			Program kerja Masterplan
- Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan melalui koperasi																
7		a. Penataan PKL berbasis kawasan (PEGANG KAKI BESAN)	DISDAG								Misi 3	Welfare				

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	Promosi dan pemasaran	- Pendataan PKL dan pembangunan sentra kawasan											Program kerja Masterplan	
		b. Pembangunan Rest Area di Lokasi Strategis	DPUPKP										Usulan program baru	
		c. Mendata objek UMKM	DKUKMP											
8	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	a. Pembuatan Sistem Informasi Pengurangan Angka Kemiskinan (SIPENGGUH)	KECAMATAN								Misi 3	Welfare	Usulan program baru	
		b. Gerimis Senja (Gerakan Mengatasi kemiskinan dan Kesenjangan)								Pengusaha ,Bank, UPK				
9	SIJEMPOL (jemput bola untuk pemotongan hewan)/ RPH 24 jam	Mendukung kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	DPPKP								Misi 3	Industry	Program kerja Masterplan	
10	Awas Dagadu (Pengawasan Perdagangan Terpadu)	a. Pengawasan distribusi dan harga bahan pokok b. Pengadaan test kit untuk pengecekan kandungan bahan berbahaya di setiap pasar tradisional	DISDAG								Misi 3	Welfare	Program kerja Masterplan	
11	Sidak Malih (Sosialisasi Pedagang Kaki Lima	a. Pengelolaan kawasan sentra kuliner b. Sosialisasi pentingnya berinvestasi, menata produk yang dijual dan PHBS	DISDAG								Misi 3	Welfare	Program kerja Masterplan	

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Integrasi Sistem	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	Melalui <i>Road Show</i>)													

SMART LIVING

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Sistem Integrasi	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1	Pelayanan Kesehatan	a. Pembangunan Aplikasi DGS Layanan Kesehatan	DISKOMINFO DINKES							RSUD Panembahan Senopati, 27 Puskesmas, DINKES, BPJS		Misi 4	Health	Program kerja Masterplan
		b. Integrasi sistem informasi dengan SIAK dan Aplikasi Lainnya	DINKES						DUKCAPIL, BPJS	SIAK	Usulan program baru			
		c. Integrasi data dan pelayanan fasilitas kesehatan, puskesmas, dan RSUD												
		d. Sistem pendaftaran pesan online APM	RSUD							DISKOMINFO				Program kerja Masterplan

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Sistem Integrasi	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		e. Rekam medik elektronik	RSUD							BPJS dan NIK	Misi 2	Health	Usulan program baru	
2	Sistem Informasi KLB	Pembuatan Sistem Informasi	DINKES							DISKOMINFO	Misi 4	Health	Usulan program baru	
3	a. Penanganan COVID 19 <i>Corona Self Monitoring</i>	a. Pendataan warga yang bepergian dari wilayah zona merah melalui WA	DINKES							BPBD	Misi 4	Health	Usulan program baru	
		b. Monitoring kondisi kesehatan warga melalui <i>google form</i>												
		c. Pembukaan Rumah sakit lapangan khusus COVID-19 untuk ODP dan PDP (gejala ringan & sedang)												
		d. Sistem informasi surveilance												
	b. Penanggulangan Wabah	a. Penyemprotan Disinfektan di tempat umum	DINKES								Misi 5	Health	Usulan program baru	
		b. Isolasi Mandiri (IMAN)												
	c. Pengembangan Informasi	a. Portal <i>website</i> https://corona.bantulkab.go.id/	DISKOMINFO								Misi 4	Health	Usulan program baru	
		b. Pengintegrasian data dengan level provinsi dan nasional												
c. Sosialisasi secara digital mengenai Covid -19 dan layanan yang harus dihubungi														
d. Pendataan Pelaku Perjalanan melalui <i>website</i>														

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Sistem Integrasi	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		https://deteksicorona.bantulkab.go.id/deteksi.html								DINKES				
4	Cybernetics Tata Ruang	a. Pengembangan aplikasi informasi penataan ruang b. Pengintegrasian data pemetaan ruang dan lahan c. Pengembangan Aplikasi Penataan Tata Ruang (SIPERTARUNG) d. Sosialisasi kepada masyarakat	DIPERTARU							BIG, BPN, BAPPEDA, PLN integrasi peta jaringan listrik, Telkom integrasi peta jaringan Telkom, DPPKP, BPBD, PDAM, DPUPKP, DLH, DISHUB, Kecamatan dan Desa	Misi 4	Harmony	Program kerja Masterplan	
5	Pemanfaatan Lahan Kosong	a. Mengembangkan pertanian irigasi kabut dan pengembangan benih lele (ELODEA) b. Garap lahan masyarakat sejahtera (Galamatra)	KECAMATAN							Masyarakat sekitar DLH, DPPKP, DKUMKM	Misi 4	Harmony	Usulan program baru Program kerja Masterplan	

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Sistem Integrasi	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	a. Pemberian dan pendampingan PMT untuk Ibu Hamil, Kekurangan Energi Kronis/ Anemia (KEK)	DESA							DLH, DPPKP, DINKES, Komunitas Masyarakat dan DISDIKORA	Misi 2	Health	Program kerja Masterplan	
		b. Pemeriksaan Sampel Air Bakteriologis pada Rumah Tangga Keluarga Balita KEK/ Stunting												
		c. Membantu PASBATIK (Pasukan Anak Sekolah Pembasmi Jentik)	KECAMATAN											
		- Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan di sekolah												
7	Pembentukan Kader JBM (Jam Belajar Masyarakat)	Rekrutmen Kader JBM	KECAMATAN						-	Misi 2	Harmony	Program kerja Masterplan		
8	Gelar Teknologi Tepat Guna	Menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti gebyar/pameran khusus inovasi teknologi tepat guna	DESA							-	Misi 2	Harmony	Program kerja Masterplan	
9	Pendataan Posyandu melalui Aplikasi SIPANDU TERPANA	a. Pembangunan Aplikasi SIPANDU TERPANA	DPPKBPMO						DISKOMINFO	Misi 2	Health	Program kerja Masterplan		
		b. Pendataan Posyandu dll												
		c. Integrasi Data Stunting												

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Sistem Integrasi	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
10	WA-Tantri (Whatsapp Tanpa Antri)	Memaksimalkan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan efisiensi pendaftaran	DINKES							-		Misi 2	Health	Program kerja Masterplan
11	SIGAP (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Publik) – Public Safety center (PSC) 119	Meningkatkan utilisasi (masyarakat yang mengakses) ke SIGAP – PSC 119 Bantul	DINKES							-		Misi 2	Health	Program kerja Masterplan
12	Gropyok TBC	Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penderita TBC	DINKES							-		Misi 2	Health	Program kerja Masterplan

SMART SOCIETY

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Sistem Integrasi	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1	Penyediaan Pelayanan Aspirasi Masyarakat "Lapor Bantul"	a. Pembuatan Aplikasi Lapor Bantul	DISKOMINFO							Semua OPD Kab. Bantul	Misi 1	Community	Program kerja Masterplan	
		b. Sosialisasi												
		c. Pengembangan Aplikasi Lapor Bantul												
2	Manajemen informasi pendidikan melalui E-Raport	a. Pembuatan aplikasi E-Raport	DISDIKPORA						DISKOMINFO	Misi 2	Learning	Program kerja Masterplan		
		b. Sosialisasi dan implementasi E-Raport di sekolah SMP di Bantul												
3	E-learning	Pembelajaran secara daring	DISDIKPORA						DISPUSIP	Misi 2	Learning	Usulan program baru		
4	Pengembangan Budaya Baca (Aplikasi IBRA)	a. Literasi membaca di era digital (pemanfaatan Aplikasi IBRA)	DISPUSIP						DISDIKPORA	Misi 2	Learning	Program kerja Masterplan		
		b. Peningkatan sarana prasarana pendukung aplikasi							DISKOMINFO					
5	Sistem Informasi Pengawasan Perlindungan Masyarakat	a. Penyiapan data dan informasi keamanan yang update dan akurat	SATPOL PP						DISKOMINFO, 17 Kecamatan	Misi 5	Security	Program kerja Masterplan		
		b. Penyiapan sarana dan prasarana di Kecamatan (SIPP MAS)												
6	Penanganan Kemiskinan	Bedah Rumah Warga Miskin, Pemberian makan bagi lansia terlantar,	KECAMATAN						Forkompincam,UPK,Mitra	Misi 3	Community	Usulan program baru		

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Sistem Integrasi	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	a. Gerakan Madu Manis (Gerakan Masyarakat Peduli Mengatasi Kemiskinan)	Pemasangan Listrik bagi Keluarga Tidak Mampu, Lantainisasi, Pembuatan MCK								Kerja, Peduli Dhuafa				
	b. GETARR (Gerakan Tanggap Renovasi Rumah)	Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)												
7	Penangan Bencana Aplikasi PASEBAN (Pelaporan Singkat Emergency dan Kebencanaan)	a. Pengembangan Aplikasi PASEBAN	BPBD							DISKOMINFO, PU, DPTR, SATPOL PP, DINSOSPPP A, BMKG, BASARNAS, BPBP DIY, komunitas, masyarakat	Misi 4	Security	Program kerja Masterplan	
		b. Penambahan menu e-Logistik												
		c. Integrasi sistem informasi kebencanaan dengan Peta Rawan Bencana												
		d. Sosialisasi sistem informasi kebencanaan												
8	Peningkatan Peran KIM di era digital	a. Pemberdayaan KIM Milenial	DISKOMINFO						Komunitas, Desa	Misi 2	Community	Usulan program baru		
		b. <i>Public Communication 4.0</i>	DISKOMINFO											
9	Pembinaan POKDARWIS	Pengembangan wisata terpadu	KECAMATAN						DISPAR	Misi 3	Community	Program kerja Masterplan		

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Sistem Integrasi	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	(Kelompok sadar wisata)													
10	Expo Fair	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	KECAMATAN							Seluruh OPD Kab. Bantul dan Kepala Dusun	Misi 3	Community	Program kerja Masterplan	
11	UPTD PPT KKPA Hotline 24 Jam	Peningkatan penanganan korban kekerasan anak dan perempuan	DINSOSPPPA							-	Misi 5	Security	Program kerja Masterplan	
12	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	Pendataan dan pengelolaan fakir miskin serta penanganan PMKS	DINSOSPPPA							-	Misi 3	Community	Program kerja Masterplan	
13	UPTD Kesejahteraan dan Puskesmas	Pelaksanaan tandar Pemenuhan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018	DINSOSPPPA							-	Misi 3	Community	Program kerja Masterplan	

SMART ENVIRONMENT

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Sistem Integrasi	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1	OVOJ (One Village One JPSM)	a. Pembentukan JPSM (Jaringan Pengelolaan Sampah Mandiri)	DLH							Bank BNI (dalam mengelola dana tabungan sampah dari nasabah), dan Paguyuban Pengelolaan Sampah (TPS 3R)		Misi 4	Waste	Program kerja Masterplan
		b. Diklat anggota JPSM												
		c. Pemberdayaan Masyarakat melalui JPSM												
		d. Penyediaan sarana prasarana JPSM												
2	Pengelolaan sampah	a. Membentuk Tim RUMPUT SAMAR	KECAMATAN							Bank sampah dan UKM		Misi 4	Waste	Usulan program baru
		b. Pengelolaan limbah minyak jelantah												
		c. Kerjasama pengelolaan persampahan dengan kelompok penggiat lingkungan di masyarakat	DLH						Babinsa, babinkamtibmas, kader lingkungan hidup dan satgas lingkungan hidup	Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan				Program kerja Masterplan
		d. Gost Sampah (Grobyok Sampah, OTT Sampah, Saber Sampah, dan Tindak Sampah)												

No	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Tahun awal pelaksanaan						Kerjasama	Sistem Integrasi	MISI RPJMD	Sub	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		e. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan TPS3R								(Perguruan Tinggi), SATPOL PP, Kepolisian, dan DISHUB				
3	Info Lingkungan SUDOKU (Susun Dokumen Lingkungan)	a. Sosialisasi Aplikasi SUDOKU b. Pengembangan data dan informasi lingkungan	DLH							DPMT dan perusahaan badan usaha di Kab. Bantul		Misi 2	Protection	Program kerja Masterplan
4	SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santoso)	a. Sosialisasi dan pendampingan kepada petani b. Penjaringan produk pertanian dengan teknik penutupan (inovasi)	DPPKD									Misi 4	Energy	Usulan program baru
5	Penanganan sanitasi	Rencana pengembangan website Layanan PU dengan menambahkan menu ALSANTI (Aplikasi Layanan Sanitasi Tinja) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi seputar sanitasi	DPUPKP							DISKOMINFO		Misi 4	Waste	Program kerja Masterplan



Pemerintah Kabupaten Bantul



BANTUL SIAGA COVID-19

[Masuk Ke Website Utama](#)



Satu Data



Geoportal



PPID



KIM



Event Bantul



Layanan E-Government



Pengaduan



Perangkat Daerah



Kecamatan



BUMD



Perizinan



Perencanaan



Perdagangan & Perindustrian



Ketenagakerjaan



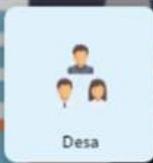
Kesehatan



Pendidikan



Kependudukan



Desa



Pariwisata

BAB IV CAPAIAN SMART CITY

4.1 Model Evaluasi Smart City Kabupaten Bantul

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana Model evaluasi Smart City Kabupaten Bantul dikembangkan. Model ini menggunakan 6 komponen utama sebagai parameter utama pengembangan. Enam komponen tersebut adalah (1) smart Governance, (2) Smart Branding, (3) Smart Economy, (4) Smart Living, (5) Smart Society, dan (6) Smart Environment. Model evaluasi Smart City ini pada dasarnya adalah model analisis yang dikembangkan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Smart City yang telah dirumuskan dalam sebuah roadmap yang ada di dokumen Masterplan Smart City Kabupaten Bantul. Analisis evaluasi ini dilakukan dengan mengidentifikasi (1) tingkat capaian, (2) progress, (3) kendala yang dihadapi dan (4) inisiatif perbaikan dari masing-masing indikator program kerja yang disusun. Adapun formula untuk mengidentifikasi persentase pencapaian dari masing-masing program dijelaskan sebagai berikut.

Formula nilai bobot per indikator program kerja:

$$Nilai = \frac{100}{x}$$

Formula nilai rata-rata capaian proker per dimensi Smart City :

$$Nilai = \frac{\sum_{i=1}^n ni}{n}$$

Keterangan:

x = jumlah indikator tercapai

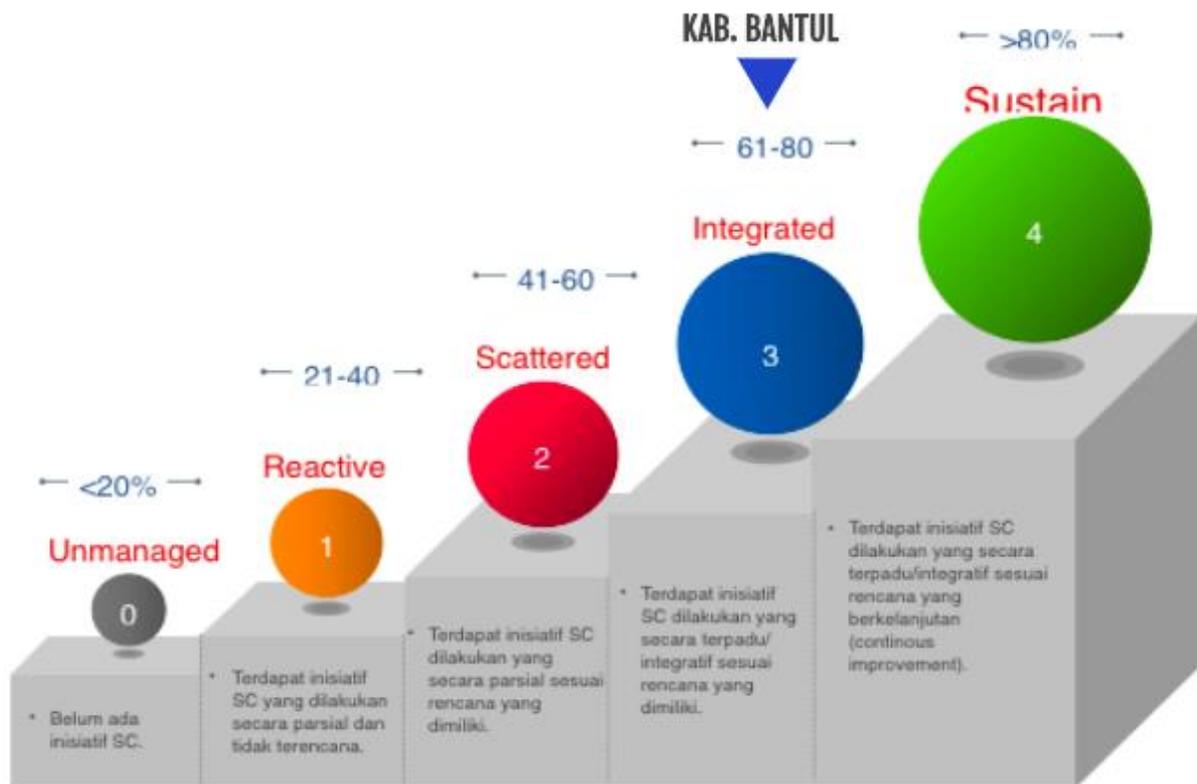
ni = nilai indikator

n = jumlah indikator

Nilai persentase ini digunakan untuk tolak ukur capaian implementasi program kerja. Selanjutnya nilai persentase dari masing-masing program kerja akan di rata-rata sesuai dengan dimensinya untuk menghasilkan nilai capaian implementasi tiap dimensi Smart City. Untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang koheren atas progres pencapaian Smart City maka nilai ini

perlu di kategorikan kedalam tingkatan kematangan. Adapun penjelasan mengenai tingkat kematangan implementasi Smart City dijelaskan sebagai berikut.

4.2 Tingkat Kematangan Implementasi Smart City



Gambar 4.1 *Smart City Maturity Level*

(Sumber: Data olahan, 2020)

Tingkat kematangan adalah sebuah kondisi hasil penilaian. Dalam konteks Smart City adalah capaian kota atas usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup kota. Level kematangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 level kematangan berdasarkan capaian kondisi ideal.

- Level 0: Pencapaian kondisi ideal kurang dari 20%. Pada level ini ketercapaian sasaran untuk setiap kluster lebih kecil dari 20. Belum ada inisiatif berarti yang dilakukan untuk tercapainya setiap sasaran yang ditetapkan.

- Level 1: Pencapaian kondisi ideal antara 20 – 40 %. Pada level ini ketercapaian untuk setiap kluster rata-rata antara 20 – 39% dimana inisiatif Smart City sudah mulai dicanangkan oleh kota/kabupaten meskipun masih dilakukan secara parsial dan tidak terencana secara maksimal dan cenderung bersifat responsif.
- Level 2: pencapaian kondisi ideal antara 40 – 60 %. Pada level ini ketercapaian untuk setiap kluster rata-rata antara 40 – 59% dimana inisiatif Smart City sudah mulai dicanangkan oleh kota/kabupaten meskipun masih dilakukan secara parsial berdasarkan rencana yang telah dimiliki.
- Level 3: Pencapaian kondisi ideal antara 60 – 80 %. Pada level ini ketercapaian untuk setiap kluster rata-rata antara 61 – 79% dimana inisiatif Smart City sudah mulai dicanangkan oleh kota/kabupaten dan dilakukan secara terpadu dan berdasarkan rencana yang telah dibuat
- Level 4: Pencapaian kondisi ideal lebih dari 80%. Pada level ini ketercapaian untuk setiap kluster rata-rata antara 61 – 79% Pada level ini ketercapaian untuk setiap kluster rata-rata antara 61 – 79% dimana inisiatif Smart City sudah mulai dicanangkan oleh kota/kabupaten dan dilakukan secara terpadu dan berdasarkan rencana yang berkelanjutan.

4.3 Tahapan Pencapaian Implementasi Smart City

Tahapan pencapaian implementasi Smart City merupakan sebuah kondisi yang harus dilalui dari awal hingga akhir secara berurutan (*staging*) Artinya dalam mengimplementasikan program kerja Smart City tidak diperbolehkan untuk melakukan tahap pengembangan tanpa menyelesaikan tahap inisiasi. Hal bertujuan agar pengelolaan penerapan Smart City di Kabupaten Bantul lebih terarah. Analisis ini mengidentifikasi secara kualitatif untuk mengukur sejauh mana penerapan dari masing-masing program kerja. Tahapan yang digunakan dalam analisis ini ini terdiri dari 4 kriteria berdasarkan capaian kondisi ideal program kerja.



Gambar 4. 2 Tahapan Implementasi Smart City

(Sumber: Hasil analisis, 2020)

1. **Inisiasi:** Pada tahapan ini program kerja Smart City sudah memiliki kajian perencanaan dan regulasinya di kabupaten/kota.
2. **Pengembangan:** Pada level ini ketercapaian untuk setiap program kerja yang dimana perencanaan dan regulasi dari suatu program kerja Smart City sedang dalam tahap implementasi / pembangunan.
3. **Pendayagunaan:** Pada tahapan ini program kerja Smart City sudah diimplementasikan dan dirasakan dampaknya oleh *Government, Business dan Citizen*.
4. **Penyempurnaan:** Pada level ini ketercapaian untuk setiap program kerja yang dimana suatu program kerja Smart City yang telah implementasikan dan dirasakan dampaknya sudah dievaluasi dan sudah ditingkatkan (*continuous improvement*) oleh *stakeholder*.

4.4 Penilaian Capaian Progress Program Kerja

1. Jangka Pendek (1 – 3 Tahun)

a. Smart Governance

Sasaran smart governance yaitu mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tabel 4. 1 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Governance*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah	A.1 Pengembangan aplikasi e-Retribusi	Tercapai	Penyempurnaan
B	Mempermudah dan mempercepat proses pembuatan akta kematian sehari jadi	B.1 AKSI Simpati (Akta kematian sehari jadi)	Tercapai	Pendayagunaan
C	Mempermudah pegawai ASN dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam administrasi kepegawaian seperti izin belajar, cuti, kenaikan pangkat, dsb.	C.1 Aplikasi Pelayanan Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN)	Tercapai	Penyempurnaan
D	Mengenalkan aplikasi dan meningkatkan kesadaran pegawai ASN untuk melengkapi data pada Aplikasi SAPA ASN	D.1 Sosialisasi aplikasi SAPA ASN secara manual dan virtual melalui media massa dan media sosial	Tercapai	Pendayagunaan
E	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan pendaftaran PKB	EM.1 SIPENTOL (Sistem Informasi Pendaftaran Online)	Tercapai	Pengembangan

(Sumber: Data olahan, 2020)

b. Smart Branding

Sasaran smart branding yaitu meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Tabel 4. 2 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Branding*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Mengembangkan pemasaran pariwisata	A.1 Pengembangan aplikasi "Jelajah Bantul" dengan menambahkan konten dan memutahiran data	Tercapai	Pendayagunaan

(Sumber: Data olahan, 2020)

c. Smart Economy

Sasaran *smart economy* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.

Tabel 4. 3 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Economy*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gas	A.1 Telo kaspo (Temukan Lokasi Pangkalan Gas Pada Android)	Tidak Tercapai	Pengembangan

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
B	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	B.1 Kampung UKM Digital untuk mempromosikan hasil produksi bagi Pelaku Usaha	Tidak Tercapai	Pendayagunaan
C	Meningkatkan kesejahteraan petani	C.1 SIJEMPOL (jemput bola untuk pemotongan hewan)/ RPH 24 jam	Tercapai	Pendayagunaan

(Sumber: Data olahan, 2020)

d. Smart Living

Sasaran *smart living* yaitu mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Tabel 4. 4 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Living*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	A.1 Aplikasi DGS Layanan Kesehatan	Tercapai	Pendayagunaan
B	Meningkatkan pelayanan kesehatan	B.1 "SIGAP (Sistem Penanggulangan Gawat	Tercapai	Pendayagunaan

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
		Darurat Publik) – Public Safety center (PSC) 119"		

(Sumber: Data olahan, 2020)

e. Smart Society

Sasaran *smart society* yaitu mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi.

Tabel 4. 5 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Society*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Menyediakan pelayanan aspirasi masyarakat	A.1 Aplikasi Laport Bantul	Tercapai	Pendayagunaan
B	Menyajikan dan mengintegrasikan data profil posyandu beserta kegiatannya, termasuk data kader posyandu se-Kabupaten Bantul	B.1 "SIPANDU TERPANA"	Tercapai	Pengembangan

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
C	Menyajikan pelaporan bencana, peringatan dini BMKG, prakiraan cuaca, penyajian data bencana sebagai alat edukasi mitigasi bencana, penanggulangan bencana, serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan	C.1 PASEBAN (Pelaporan Singkat Emergency dan Kebencanaan)	Tidak Tercapai	Pengembangan
	Pendataan logistik yang dibutuhkan dalam penanganan bencana		Tidak Tercapai	Inisiasi
D	Memberikan kemudahan akses informasi wilayah rawan bencana bagi masyarakat	D.1 Integrasi Sistem Informasi Kebencanaan dengan Peta Rawan Bencana	Tidak Tercapai	Inisiasi
E	Mengenalkan sistem informasi kebencanaan kepada masyarakat yang selanjutnya dapat dimanfaatkan secara optimal	E.1 Sosialisasi Sistem Informasi	Tidak Tercapai	Inisiasi

(Sumber: Data olahan, 2020)

f. Smart Environment

Sasaran *smart environment* yaitu untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Bantul yang baik, bertanggung- jawab, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 6 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Environment*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	A.1 One Village one JPSM/OVOJ (Jaringan Pengelolaan Sampah Mandiri)	Tercapai	Pendayagunaan
B	Mengenalkan dan mengajak masyarakat Kabupaten Bantul untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan aplikasi SUDOKU guna mencapai iklim lingkungan hidup yang kondusif	B.1 Sosialisasi aplikasi SUDOKU secara manual dan virtual melalui media massa, dan media sosial	Tercapai	Pendayagunaan
C	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	C.1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah 3 Reuse, Reduce, Recycle) yang bukan tempat pembuangan sampah tetapi ada aktivitas pemilahan sampah, penggunaan kembali sampah dalam bentuk lain.	Tercapai	Pendayagunaan

(Sumber: Data olahan, 2020)

2. Jangka Menengah (3 - 5 Tahun)

a. Smart Governance

Sasaran *smart governance* yaitu mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tabel 4. 7 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Governance*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Meningkatkan validitas dengan mensinkronisasi antar sistem informasi	A.1 Integrasi Sistem Informasi Desa dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Tercapai	Penyempurnaan
B	Memper mudah proses pengadaan barang dan jasa sehingga lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya	B.1 SIMDAN (Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa)	Tercapai	Penyempurnaan
C	Memperkenalkan sistem pendaftaran tanah kepada masyarakat	C.1 Sistem pendaftaran tanah	Tidak Tercapai	Inisiasi
D	Memberikan pelayanan data bagi masyarakat melalui pengembangan website kecamatan Jetis	D.1 JETRUDAL (Jetis Rumah Data Lengkap)	Tidak Tercapai	Pengembangan
E	Menciptakan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	E.1 Pembangunan SIM Pendaftaran Ijin Usaha Mikro Kecil (UMK) sehingga masyarakat pemohon mengajukan izin secara online	Tidak Tercapai	Inisiasi
F	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam mengurus administrasi	F.1 Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Berhadiah	Tidak Tercapai	Inisiasi

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
G	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	G.1 Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Tercapai	Penyempurnaan
H	Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pelayanan kecamatan satu pintu	H.1 JETIS JOSS (Jetis One Stop Service)	Tercapai	Penyempurnaan
I	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	I.1 Yan Perum (Layanan Antar KTP Sampai rumah)	Tercapai	Pendayagunaan
J	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam mengurus administrasi	J.1 Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Tercapai	Pendayagunaan
K	Memverifikasi data BDT Kabupaten Bantul	K.1 Pemutakhiran Data Warga Miskin	Tidak Tercapai	Inisiasi
L	Menambah informasi dan fitur yang ada di Sistem Informasi Desa	L.1 Sistem Informasi Desa dan Profile	Tidak Tercapai	Inisiasi
M	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan	M.1 PAGODA (Perekaman KTP-eL Plus Test Golongan Darah)	Tercapai	Pendayagunaan

(Sumber: Data olahan, 2020)

b. Smart Branding

Sasaran *smart branding* yaitu meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Tabel 4. 8 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Branding*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Arah perwujudan branding Kabupaten Bantul dari sektor pembangunan fisik berupa Gerbang Selamat Datang di Kabupaten Bantul	A.1 Master Plan Pembangunan Gerbang Selamat Datang Kabupaten Bantul	Tercapai	Pendayagunaan
B	Mengembangkan pemasaran pariwisata	B.1 Sosialisasi aplikasi Jelajah Bantul	Tercapai	Pendayagunaan
C	Meningkatkan pelayanan informasi wisata	C.1 Pembangunan TIC (Tourism Information Center) untuk memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan yang melewati obyek wisata pantai	Tercapai	Pengembangan
D	Mengembangkan pengelolaan data statistik wisata	D.1 Pengembangan SIM Data Kunjungan Obyek Wisata dan Desa Wisata	Tidak Tercapai	Pengembangan
		D. 2 Pelatihan pengisian data kunjungan obyek wisata dan desa wisata bagi para POKDARWIS	Tidak Tercapai	Inisiasi

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
		(kelompok sadar wisata) dan pengelola desa wisata		
E	Mengembangkan skill pemandu sebagai salah satu daya tarik dari Desa Wisata	E.1 Pengembangan SDM Desa Wisata dalam bentuk pelatihan bagi pemandu Outbond	Tidak Tercapai	Inisiasi

(Sumber: Data olahan, 2020)

c. Smart Economy

Sasaran *smart economy* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.

Tabel 4. 9 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Economy*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Meningkatkan pengawasan dan perlindungan pada produk- produk yang dikonsumsi masyarakat	A.1 Awas Dagadu (Pengawasan Perdagangan Terpadu)	Tercapai	Penyempurnaan

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
B	Meningkatkan kesejahteraan pedagang secara kualitas dan kuantitas	B.1 Sidak Malih (Sosialisasi Pedagang Kaki Lima Melalui Roadshow)	Tercapai	Penyempurnaan
C	Pencari kerja dapat mencari lowongan pekerjaan di semua wilayah dengan lebih efektif dan efisien, Perusahaan akan memperoleh calon tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien, Lebih optimalnya sinergitas peran BKK maupun PPTKIS terhadap Disnakertran Kab/Kota.	C.1 Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja	Tidak Tercapai	Inisiasi
D	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	D.1 PERAS HABIS (Koperasi Sahabat Si Miskin) merupakan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin di sekitar koperasi	Tidak Tercapai	Pendayagunaan
E	Peningkatan skill UMKM	E.1 Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tidak Tercapai	Pendayagunaan

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
F	Meningkatkan pelayanan dalam perizinan IUMK	F.1 Peningkatan pelayanan masyarakat IUMK	Tidak Tercapai	Pengembangan
G	Peningkatan daya saing produk industri kreatif di Kabupaten Bantul	G.1 Pelatihan dan Pendampingan Industri Kreatif	Tercapai	Pendayagunaan

(Sumber: Data olahan, 2020)

d. Smart Living

Sasaran *smart living* yaitu mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Tabel 4. 10 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Living*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Memudahkan masyarakat mendapatkan informasi seputar pelayanan sanitasi	A.1 Pengembangan Web Layanan PU dengan menambahkan menu ALSANTI (Aplikasi Layanan Sanitasi Tinja)	Tidak Tercapai	Pengembangan
B	Meningkatkan partisipasi terhadap upaya memberantas nyamuk, dan meningkatkan kesehatan masyarakat	B.1 PASBATIK (Pasukan Anak Sekolah Pembasmi Jentik)	Tidak Tercapai	Pengembangan

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
C	Meningkatkan produktivitas lahan di sektor pertanian dengan memberdayakan masyarakat	C.1 GALAMATRA (Garap Lahan Masyarakat Sejahtera)	Tidak Tercapai	Pengembangan
D	Meningkatnya kualitas Ibu Hamil dan penurunan jumlah kasus anemia pada Ibu Hamil	D.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Tercapai	Pendayagunaan
E	Menurunnya jumlah balita stunting	E. 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Tercapai	Pendayagunaan
F	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam dunia pendidikan	F.1 Pembentukan Kader JBM (Jam Belajar Masyarakat)	Tidak Tercapai	Inisiasi
G	Mempromosikan inovasi teknologi tepat guna kepada masyarakat secara luas dan meningkatkan semangat inovasi masyarakat dalam menciptakan inovasi baru	G.1 Gelar Teknologi Tepat Guna	Tidak Tercapai	Inisiasi
H	Meningkatkan pelayanan rumah sakit	H1. Sistem Antrian Pendaftaran Pasien Online dan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)	Tercapai	Penyempurnaan

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
I	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	I.1 WA - Tantri (Whatsapp Tanpa Antri)	Tercapai	Pendayagunaan
J	Meningkatkan pemahaman dan upaya kesehatan masyarakat mengenai penyakit TBC	J.1 Gropyok TBC	Tidak Tercapai	Inisiasi

(Sumber: Data olahan, 2020)

e. Smart Society

Sasaran *smart society* yaitu mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi.

Tabel 4. 11 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Society*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Memberikan kemudahan dalam memantau nilai dan hasil kompetensi siswa baik oleh siswa, orang tua dan para pengambil kebijakan.	A.1 "E-Raport Sistem informasi manajemen penilaian pendidikan SMP berbasis web dan mengintegrasikan data manajemen pendidikan yang telah dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI."	Tercapai	Pendayagunaan

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
B	Menjadikan potensi wisata Kabupaten Bantul menjadi daya tarik sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekitar	B.1 Pembinaan POKDARWIS (Kelompok sadar wisata)	Tidak Tercapai	Inisiasi
C	Mengenalkan dan mempromosikan produk unggulan masing-masing kecamatan	C.1 Expo Fair	Tidak Tercapai	Inisiasi
D	Meningkatkan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat	D.1 SIPP MAS (Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Perlindungan Masyarakat)	Tercapai	Pengembangan
E	Meningkatkan kualitas pelayanan informasi masyarakat	E.1 Pengembangan aplikasi IBRA (e-Library), merupakan layanan perpustakaan online perpusdabantul.id	Tercapai	Pendayagunaan

(Sumber: Data olahan, 2020)

f. Smart Environment

Sasaran *smart environment* yaitu untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Bantul yang baik, bertanggung- jawab, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 12 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Environment*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	A.1 Gost Sampah	Tercapai	Pendayagunaan

(Sumber: Data olahan, 2020)

3. Jangka Panjang (5 Tahun)

a. Smart Governance

Sasaran *smart governance* yaitu mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tabel 4. 13 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Governance*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah	A.1 Layanan Aplikasi Pajak BANTUL (LAPAK BANTUL)	Tercapai	Penyempurnaan
B	Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah	B.1 Sosialisasi aplikasi LAPAK BANTUL secara manual dan virtual melalui media massa dan media sosial	Tercapai	Penyempurnaan

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
C	Peningkatan pengelolaan perizinan untuk mempermudah pemohon dalam mengurus administrasi perizinan	C.1 Nasi Putar (Perizinan dan Sistem Layanan Jemput Antar) untuk memudahkan pemohon izin yang tidak mempunyai banyak waktu dalam pengurusan izin serta meminimalisir piutang retribusi izin.	Tidak Tercapai	Inisiasi
D	Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat	D.1 E-Arsip - GETAR BAHANA (Gerakan Tertib Arsip Bantul Harmoni dan Akuntabel)	Tercapai	Pendayagunaan

(Sumber: Data olahan, 2020)

b. Smart Economy

Sasaran *smart economy* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.

Tabel 4. 14 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Economy*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Meningkatkan kesejahteraan pedagang secara kualitas dan kuantitas	A.1 PEGANG KAKI BESAN (Penataan Pedagang Kaki Lima Berbasis Kawasan)	Tercapai	Pendayagunaan

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
B	Mengembangkan sektor pertanian dengan memanfaatkan peran teknologi dan informasi	B.1 Aplikasi SIPADU (Sistem Informasi Pangan Terpadu)	Tidak Tercapai	Inisiasi

(Sumber: Data olahan, 2020)

c. Smart Living

Sasaran *smart living* yaitu mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Tabel 4. 15 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Living*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang	A.1 Cybernetics Tata Ruang	Tercapai	Penyempurnaan

(Sumber: Data olahan, 2020)

d. Smart Society

Sasaran *smart society* yaitu mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi.

Tabel 4. 16 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Society*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	A.1 UPTD PPT KKPA Hotline 24 Jam	Tercapai	Pendayagunaan
B	Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kurang mampu dengan bantuan sosial	B.1 SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	Tercapai	Pengembangan
C	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	C.1 UPTD Kesejahteraan dan Puskesmas	Tidak Tercapai	Inisiasi

e. Smart Environment

Sasaran *smart environment* yaitu untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Bantul yang baik, bertanggung- jawab, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 17 Penilaian Capaian Program Kerja *Smart Environment*

No	Tujuan	Program Kerja	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tingkat Tahapan
A	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengendalikan pencemaran lingkungan	A.1 Susun Dokumen Lingkungan (SUDOKU)	Tercapai	Pendayagunaan

(Sumber: Data olahan, 2020)

Tabel 4. 18 Penilaian Program Kerja Jangka Pendek (1-3 Tahun)

A. Smart Governance

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Pengembangan aplikasi e-Retribusi	A.1 Adanya sistem e-retribusi yang dapat diakses melalui website	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tercapai	Penyempurnaan	Saat ini, pengelolaan retribusi diserahkan kepada masing-masing OPD yang berwenang. Akses E-retribusi sudah dapat melalui website yang terdiri atas pelayanan e-retribusi pasar, rusunawa, uji kendaraan, pengujian kualitas air dan pelayanan kebersihan/persampahan dengan link yang telah tersedia sebagai berikut ini https://e-retribusi.bantulkab.go.id/	-	Adanya informasi jumlah kunjungan website dan kolom komentar atau kritik dan saran dari masyarakat
B	B. 1 AKSI Simpati (Akta kematian sehari jadi)	B.1 Jumlah penduduk Bantul yang meninggal dapat langsung diberikan Akta Kematian dan Dokumen Kependudukan bagi ahli waris	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai	Pendayagunaan	Sudah terlaksana di seluruh Desa Kabupaten Bantul (75 desa) sudah bisa melaksanakan AKSI SIMPATI	-	Monitoring dan evaluasi AKSI SIMPATI secara berkala sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan
C	C.1 Aplikasi Pelayanan Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN)	C.1 Update data pegawai secara berkala	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Tercapai	Penyempurnaan	Proses Update Data ASN sudah dilaksanakan disemua OPD, kecuali Sekolah Dasar dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul, aplikasi sudah terintegrasi dengan SIAK, e-surat bantul, dan presensi bantul	-	1. Mutu Data akan dilakukan verifikasi dan konsolidasi 2. Pembuatan Aplikasi SAPA ASN berbasis Android (Layanan TAKAH Kepegawaian) dokumen bisa langsung di scan melalui aplikasi 3. Pengembangan integrasi aplikasi kepegawaian milik pusat (SAPK) dan SIM Gaji Taspen

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
								4. Melengkapi data pegawai yang masih kosong
D	D.1 Sosialisasi aplikasi SAPA ASN secara manual dan virtual melalui media massa dan media sosial	D.1 Terselenggaranya sosialisasi aplikasi SAPA ASN	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Tercapai	Pendayagunaan	Telah dilaksanakan sosialisasi di semua OPD, kecuali di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul	-	Sosialisasi SAPA ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul
E	E.1 SIPENTOL (Sistem Informasi Pendaftaran Online)	E.1 Terbangunya aplikasi SIPENTOL	Dinas Perhubungan	Tercapai	Pengembangan	Sipentol tidak hanya dapat digunakan untuk pendaftaran tapi juga dapat digunakan untuk pembayaran https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perhub.interglobal&hl=en	-	-

B. Smart Branding

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Pengembangan aplikasi "Jelajah Bantul" untuk penambahan konten dan pemutahiran data	A.1 Sebagian besar wisatawan lokal dan wisatawan luar daerah dapat memanfaatkan aplikasi	Dinas Pariwisata	Tercapai	Pendayagunaan	Aplikasi Jelajah Bantul sudah diunduh oleh 1000 orang lebih dan telah diberikan ulasan oleh 24 pengguna yang menghasilkan penilaian atau rating yaitu 4,4 dari 5. Aplikasi ini diperuntukkan untuk memudahkan wisatawan lokal, luar daerah dan mancanegara dalam menjelajahi Kabupaten Bantul	-	Pengembangan aplikasi berbasis iOS dan penambahan fitur data jumlah kunjungan setiap objek wisata, daftar harga tiket setiap obyek wisata, pembayaran non tunai untuk pembelian tiket masuk obyek wisata serta data

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
						dengan nyaman, karena tersedia informasi yang terdiri atas : - Wisata Bantul / Jogja - Kuliner Bantul / Jogja - Info Hotel - Acara yang menarik di Bantul / Jogja, dapat diakses melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui link berikut ini : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamatechno.mcity.kabbantul&hl=en		jumlah yang telah mengunjungi aplikasi, aplikasi diharapkan mampu memberikan informasi mengenai penjualan souvenir dan oleh - oleh khas Kabupaten Bantul

C. Smart Economy

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Telo kaspo (Temukan Lokasi Pangkalan Gas Pada Android)	A.1a Masyarakat selaku konsumen dapat mengakses informasi lokasi pangkalan di masing-masing pangkalan se Kabupaten Bantul melalui aplikasi android tersebut. A.1b Peta pangkalan gas LPG sesuai dengan titik – titik koordinat yang berada di Google Maps. A.1c Meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi	Dinas Perdagangan	Tidak Tercapai	Pengembangan	Masyarakat merasa terbantu dan mudah dalam pencarian lokasi pangkalan gas LPG dengan mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi ini sudah memiliki wadah, tetapi belum diwujudkan dalam <i>Playstore</i>	-	Dilakukan <i>update database lokasi agen</i> pangkalan gas setiap tahun dan sosialisasi pemanfaatan aplikasi kepada masyarakat

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
		tersebut. A.1d Terjalannya komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat secara luas.						
B	B.1 Kampung UKM Digital untuk mempromosikan hasil produksi bagi Pelaku Usaha UMKM secara <i>online</i>	B.1 Jumlah Transaksi jual beli yang terjadi melalui website blanja.com	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian	Tidak Tercapai	Pendayagunaan	Kampung digital telah dilaksanakan di 5 kecamatan Kab. Bantul. Namun karena kegiatan ini kurang efektif maka mulai tahun 2021 tidak lagi diselenggarakan	UMKM di titik-titik kampung digital belum dapat menggunakan internet untuk pemasaran secara maksimal	Perlu pelatihan dan pembinaan pada UMKM pengguna internet pada kampung digital untuk memanfaatkan teknologi internet dalam mengembangkan dan meningkatkan pemasaran produk
C	C.1 SIJEMPOL (jemput bola untuk pemotongan hewan)/ RPH 24 jam (Rumah Pemotongan Hewan)	C.1 Pemasok daging terbesar dengan jaminan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal), dan pengelolaan limbah yang optimal	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Tercapai	Pendayagunaan	Sudah terlaksananya kegiatan pendukung UPT Rumah Pemotongan Hewan dengan jaminan ASUH	-	-

D. Smart Living

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Aplikasi DGS Layanan Kesehatan	A.1 Masyarakat dapat pelayanan yang cepat serta mudah dalam faskes tingkat I	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tercapai	Pendayagunaan	Aplikasi Digital Government Service Layanan Kesehatan sudah terintegrasi dengan P-Care BPJS	-	Pengembangan aplikasi berbasis android agar dapat mengintegrasikan dengan

		maupun rujukan ke rumah sakit yang telah terintegrasi dengan BPJS				Layanan Kesehatan, dan sudah dimanfaatkan di 25 Puskesmas.		NIK nasional karena banyak terjadi pelayanan puskesmas untuk pasien dari luar Kabupaten Bantul dan penambahan layanan pendaftaran secara mandiri sehingga dapat mengoptimalkan proses yang efektif dan efisien
B	B.1 "SIGAP (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Publik) – Public Safety center (PSC) 119"	B.1a Prosentase Fasyankes yang melakukan MOU dengan SIGAP – PSC 119 Bantul dibanding semua Fasyankes di Bantul B.1.b Tingkat utilisasi (masyarakat yang mengakses) ke SIGAP – PSC 119 Bantul B.1.c Prosentase kasus Gadar yang tertangani melalui SIGAP – PSC 119 Bantul	Dinas Kesehatan	Tercapai	Pendayagunaan	1. Fasyankes yang melakukan MOU dengan SIGAP-PSC 119 Bantul: 27 Puskesmas (100 %) dan 13 Rumah Sakit yang layak melakukan penanganan kegawat daruratan (100%) 2. Jumlah Masyarakat yang mengkases SIGAP-PSC 119 Bantul: 1.482 3. Prosentase Kasus Gadar yang mengakses SIGAP-PSC 119 Bantul adalah 1.028	-	Kedepannya ada penggabungan degan Peta Geometri, yaitu adanya pemetaan dengan SDM yang ada di masing - masing fasilitas kesehatan dan sarana prasarana

E. Smart Society

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Aplikasi Laporan Bantul	A.1 Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dimanapun dan kapanpun, aspirasi/Keluhan yang masuk dapat tertangani dengan cepat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tercapai	Pendayagunaan	Masyarakat telah memanfaatkan aplikasi Laporan Bantul untuk menyampaikan berbagai permasalahan maupun saran kepada Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini ditandai dalam kurun waktu	-	Sedang berupaya mengintegrasikan dengan layanan website lapor.go.id sehingga masukan yang masuk lewat lapor.go.id untuk Kabupaten Bantul juga dapat ditanggapi dan

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
		karena arus data informasi yang real time.				tahun 2019, terdapat 148 masukan dan 147 sudah tertanggapi.		diselesaikan oleh OPD di Kabupaten Bantul.
B	B.1 "SIPANDU TERPANA"	B.1 Jumlah data profile posyandu yang di input kedalam aplikasi SIPANDU TERPANA	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tercapai	Pengembangan	1049 Data dasar Posyandu telah terentry tahun 2018, dari Total 1139 Jumlah Posyandu di Kabupaten Bantul, namun pada tahun 2019 hanya 149 Data Posyandu yang terentry	Tidak ada honor untuk admin Sipandu Kabupaten dan Desa (kewenangan anggaran ada di Desa), serta tidak ada anggaran untuk maintenance	Diadakan pelatihan / <i>refreshing</i> tentang Aplikasi Sipandu
C	C.1 PASEBAN (Pelaporan Singkat <i>Emergency</i> dan Kebencanaan)	C.1.a Presentase laporan yang benar dan presentase tindak lanjut laporan; Jumlah masyarakat yang mengakses sistem informasi kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Tercapai	Pengembangan	Tahun 2019 dilaksanakan upgrade aplikasi Paseban dengan menambahkan fitur.	Akhir Tahun 2019 baru dilaksanakan upgrade aplikasi, sehingga aplikasi blm dapat dijalankan secara optimal pada awal tahun 2020	-
		C.1.b Jumlah data logistik yang diinput ke dalam sistem informasi kebencanaan		Tidak Tercapai	Inisiasi	Belum ada	Aplikasi Paseban versi 2 belum tersedia	menu e-logistik akan diintegrasikan dengan PASEBAN, kendalanya e-logistik belum jalan sehingga belum bisa diintegrasikan
D	D.1 Integrasi Sistem Informasi Kebencanaan dengan Peta Rawan Bencana	D.1 Jumlah data sistem informasi kebencanaan yang diintegrasikan dengan data peta rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Tercapai	Inisiasi	Belum ada	Aplikasi Paseban versi 2 belum tersedia	-

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
E	E.1 Sosialisasi Sistem Informasi	E.1 Jumlah konten informasi yang dikemas secara manual dan virtual dan disebarluaskan melalui media massa dan media sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Tercapai	Inisiasi	Belum ada	Aplikasi Paseban versi 2 belum tersedia	-

F. Smart Environment

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 One Village one JPSM/OVOJ (Jaringan Pengelolaan Sampah Mandiri)	A.1a Jumlah JPSM yang terbentuk di tingkat desa dan dusun A.2b Jumlah Anggota JPSM yang mengikuti diklat A.3c Jumlah kegiatan diklat tentang pengelolaan sampah yang dilakukan terhadap JPSM	Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai	Pendayagunaan	Sudah adanya Regulasi terkait JPSM yang tertuang dalam Perda Kab. Bantul No 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selain itu, capaian program meliputi: 1) Jumlah JPSM yang terbentuk pada Tahun 2019 sekitar 157 PSM, dari jumlah tersebut ada yang baru dan ada yang sudah lama. 2) Workshop pendamping pengelolaan sampah mandiri dilaksanakan di Ros In Hotel pada tanggal 25 – 26 Februari 2019 dengan peserta sejumlah 50 orang yang terdiri dari perwakilan JPSM di masing – masing kecamatan di	-	-

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
						<p>wilayah Kabupaten Bantul.</p> <p>3) Adapun pelatihan pengelolaan sampah dan daur ulang sampah untuk anggota JPSM dan masyarakat sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 29 Maret 2019 Aula Rumah Dinas Bupati Pelatihan daur ulang sampah untuk pkk se-Kabupaten Bantul 75 orang 2. 13 Mei 2019 Dukuh sukuh, patalan, jetis Pelatihan daur ulang sampah organik dan an organik 50orang 3. 21 juni 2019 Bank sampah mandiri barokah, kuroboyo, caturharjo, pandak Pelatihan daur ulang sampah organik 50orang 4. 22 juni 2019 BS igakanas, krapyak wetan, panggungharjo, sewon Pelatihan daur ulang sampah organik 50orang 5. 12 juli 2019 Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Pleret Km 4, Jambidan, Banguntapan Pelatihan sampah organik dan anorganik 50orang 6. 20 agustus 2019 Pedukuhan Ngincep, Triwidadi Pajangan Pelatihan daur ulang sampah organik 30orang 7. 20 agustus 2019 Aula Kecamatan Sewon pelatihan daur ulang sampah (pembuatan lilin dari minyak bekas) 30orang 8. 22 agustus 2019 Pedukuhan Kabrokan Wetan RT 1 Sendangsari 		

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
						<p>Pajangan Pelatihan daur ulang sampah anorganik 30orang</p> <p>9. 23 september 2019 Balai Desa Triharjo kegiatan Pelatihan Pengelolaan sampah 36orang</p> <p>10. 25 september 2019 Balai Desa Tirtonirmolo kegiatan Pelatihan Pengelolaan sampah 36orang</p> <p>11. 1 oktober 2019 Balai Desa bangunjiwo kegiatan Pelatihan Pengelolaan sampah 36orang</p> <p>12. 2 oktober 2019 Balai Desa Tamantirto kegiatan Pelatihan Pengelolaan sampah 36orang</p> <p>13. 3 oktober 2019 Balai Desa Ngestiharjo kegiatan Pelatihan Pengelolaan sampah 36orang</p> <p>14. 11 november 2019 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong kegiatan pelatihan daur ulang sampah (sampah organik) 50orang</p> <p>15. 12 november 2019 Yayasan Yatim Piatu Al-Dzikro kegiatan pelatihan daur ulang sampah (sampah organik) 40orang</p> <p>16. 14 november 2019 Balai Desa Srimulyo kegiatan pelatihan pengelolaan sampah untuk kawasan bukit bintang 60 orang.</p>		
B	B.1 Sosialisasi aplikasi SUDOKU secara manual dan virtual melalui media	B.1 Terselenggaranya sosialisasi aplikasi SUDOKU ke masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai	Pendayagunaan	Sosialisasi ke masyarakat dilakukan dua kali selama periode 2019 yaitu sosialisasi ke UMKM dan sosialisasi	-	-

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
	massa, dan media sosial					ke PIRT dan pendamping IUMK di kecamatan		
C	C.1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah 3 Reuse, Reduce, Recycle) yang bukan tempat pembuangan sampah tetapi ada aktivitas pemilahan sampah, penggunaan kembali sampah dalam bentuk lain.	C.1a Jumlah TPS3R yang dibangun di tingkat kecamatan, desa, dan dusun C.2b Jumlah anggota JPSM yang melakukan aktivitas pengelolaan sampah di TPS3R	Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai	Pendayagunaan	1) TPS3R yang dibangun pada tahun 2018 dan 2019 berupa TPS 3R skala besar, menengah dan kecil (tipe A, B dan C) dengan rincian sbb : Rumah pilah tahun 2018 : 1. TPS 3R (Rumah Pilah Sampah Tipe A) TPS 3R Minggir, Imogiri, Imogiri 2. TPS 3R (Rumah Pilah Sampah Tipe A) TPS 3R Depok, Parangtritis 3. TPS 3R (Rumah Pilah Sampah Tipe A) TPS 3R Poncosari 4. Rumah Pilah Sampah Tipe B PSM Ponggok, Sidomulyo, Bambanglipuro 5. Rumah Pilah Sampah Tipe B PSM Mawar Asri, Kauman, Tamanan, Banguntapan 6. Rumah Pilah Sampah Tipe B PSM Azola, Serut, Palbapang, Bantul 7. Rumah Pilah Sampah Tipe B Desa Wisata Kakilangit, Mangunan, Dlingo 8. Rumah Pilah Sampah Tipe B Desa wisata Kebonagung, dusun Jayan, Kebonagung, Imogiri 9. Rumah Pilah Sampah Tipe B PSM Barongan, Sumberagung, Jetis 10. Rumah Pilah Sampah Tipe B PSM Ngudi Sehat, Sragen, Canden, Jetis 11. Rumah Pilah Sampah Tipe B	-	-

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
						PSM Gardu Action, Mancingan, Parangtritis, Kretek 12. Rumah Pilah Sampah Tipe B Pondok Pesantren Al Imdad Putra, Guwosari, Pajangan 13. Rumah Pilah Sampah Tipe B PSM Kauman, Wijirejo, Pandak 14. Rumah Pilah Sampah Tipe B PSM Karanganom, Karanganom, Sitimulyo, Piyungan 15. Rumah Pilah Sampah Tipe B Pondok Pesantren Binaul Umah, Bawuran, Pleret 16. Rumah Pilah Sampah Tipe B PSM Panjang, Panjangrejo, Pundong 17. Rumah Pilah Sampah Tipe B PSM alam Lestari, Ceme 2, Srigading, Sanden 18. Rumah Pilah Sampah Tipe B PSM 45, Metes, Argorejo, Sedayu 19. Rumah Pilah Sampah Tipe B PSM Ngudimulyo, Glondong, Bibis, Timbulharjo, Sewon 20. Rumah Pilah Sampah Tipe B Wisata Pantai Baru, Ngentak, Poncosari, Srandakan 21. Rumah Pilah Sampah Tipe C PSM Jodog, Gilangharjo, Pandak 22. Rumah Pilah Sampah Tipe C PSM Melikan Lor, Bantul, Bantul 23. Rumah Pilah Sampah Tipe C PSM Dukuh, Seloharjo, Pundong 24. Rumah Pilah Sampah Tipe C PSM Kertan, sumberagung, Jetis 25. Rumah Pilah Sampah Tipe C PSM Kembanggede, Guwosari,		

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
						<p>Pajangan</p> <p>26. Rumah Pilah Sampah Tipe C PSM Jembangan, Segoroyoso, Pleret</p> <p>27. Rumah Pilah Sampah Tipe C PSM Madugondo, Sitimulyo, Piyungan</p> <p>28. Rumah Pilah Sampah Tipe C PSM Karangploso, Sitimulyo, Piyungan</p> <p>29. Rumah Pilah Sampah Tipe C PSM Brajan, Wonokromo, Pleret</p> <p>30. Rumah Pilah Sampah Tipe C PSM Mertosanan Kulon, Potorono, Banguntapan</p> <p>31. Rumah Pilah Sampah Tipe C PSM Glagah Kidul, Tamanan, Banguntapan</p> <p>Rumah Pilah tahun 2019 Lokasi pembangunan rumah pilah sampah tipe B adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gulon, Srihardono, Pundong 2. Tunjungan, Triharjo, Pandak 3. Pelemmadu, Sriharjo, Imogiri 4. Jombor, Srimulyo, Piyungan 5. Kadibeso, Sabdodadi, Bantul <p>Lokasi pembangunan rumah pilah sampah tipe C adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balong Kidul, Potorono, Banguntapan 2. Dusun Paten, Dk IV Lopati, Trimurti, Srandakan 3. Dusun Pepen, Canden, Jetis 4. Dusun Dengkeng, Wukirsari, Imogiri 5. Dusun Polaman, Argorejo, 		

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
						<p>Sedayu 6. Dusun Karanggede, Dagen, Pendowoharjo, Sewon 7. Dusun Jejeran I, Wonokromo, Pleret 8. Dusun Kalakijo, Guwosari, Pajangan 9. Dusun Mandungan, Srimartani, Piyungan 10. Dusun Daleman, Gilangharjo, Pandak 11. Plebengan, Sidomulyo, Bambanglipuro 12. Dusun Code, Trirenggo, Bantul 13. Dusun Srandakan, Trimurti, Srandakan</p> <p>2)TPS 3R di Bantul berjumlah 18 buah ditambah rumah pilah skala menengah dan kecil yang dibangun pemkab.</p>		

Tabel 4. 19 Penilaian Program Kerja Jangka Menengah (3-5 Tahun)

A. Smart Governance

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Integrasi Sistem Informasi Desa dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	A.1 Pelayanan administrasi kependudukan hingga level desa berjalan dengan lancar karena data telah terintegrasi dengan SIAK dari Disdukcapil.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tercapai	Penyempurnaan	Pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat berjalan dengan lancar karena data telah terintegrasi dengan SIAK dari Disdukcapil. SID dikembangkan oleh CRI yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berbasis NIK dengan memanfaatkan API dari Disdukcapil. Operator hanya memasukkan NIK dan data lain seperti nama, alamat yang diambil oleh server sehingga pelayanan menjadi lebih cepat	-	Terdapat rencana untuk meningkatkan SID menjadi <i>platform</i> SID yang terbaru sehingga berpeluang aman dari <i>hack</i> . Selanjutnya, database persuratan akan selalu diperbarui sesuai kebutuhan di Desa. SID juga akan dimanfaatkan untuk analisis pengolahan data selanjutnya seperti analisis kemiskinan dan lain - lain.
B	B.1 SIMDAN (Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa)	B.1 Proses pengajuan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Tercapai	Penyempurnaan	Membatasi usulan maksimal 40 paket dalam satu periode sehingga paket tender tidak menumpuk disatu periode tertentu	-	Kedepan lebih dioptimalkan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul
C	C.1 Sistem pendaftaran tanah	C.1 Jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialisasi pendaftaran sertifikat tanah	Kecamatan	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	Keterbatasan anggaran karena adanya rasionalisasi anggaran terkait COVID-19	-

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
D	D.1 JETRUDAL (Jetis Rumah Data Lengkap)	D.1a Jumlah data yang dimasukkan ke website kecamatan Jetis D.1b Jumlah masyarakat yang mengakses <i>website</i> kecamatan jetis	Kecamatan	Tidak Tercapai	Pengembangan	1. Telah terbentuk forum data kecamatan 2. Telah dilakukan <i>mapping</i> kebutuhan data, tetapi di dalam <i>website</i> belum mampu menampilkan data jumlah masyarakat yang mengunjungi dan rumah data, sebagaimana yang ditunjukkan pada link <i>website</i> berikut ini pada <i>toolbar</i> data https://kec-jetis.bantulkab.go.id/data/4/75/81	Minimnya sumber daya manusia yang menguasai IT	Penambahan personil dengan keahlian IT ke BKPP dan melibatkan banyak stakeholder termasuk dari desa. Selain itu, diharapkan semua data ditata kelolaan <i>system by system</i> , artinya juga dapat dikeluarkan statistiknya dari aplikasi/ <i>website</i> untuk masuk ke portal data kami. Mungkin pengelompokan data dapat sesuai dimensi dan diperbarui per semester atau per tahun.
E	E.1 Pembangunan SIM Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) sehingga masyarakat pemohon mengajukan izin secara <i>online</i>	E.1 Jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi SIM Pendaftaran Izin UMK	Kecamatan	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	Dengan adanya sistem OSS, semua pelayanan perijinan sudah beralih ke sistem OSS yang diampu oleh DPMPT	-
F	F.1 Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Berhadiah	F.1 Masyarakat dapat terlayani secara maksimal dengan adanya pelaksanaan pelayanan terpadu di Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	Terkendala sarpras dan SDM	Dapat memaksimalkan sarana prasarana dan SDM yang ada
G	G.1 Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	G.1 Meningkatkan kesadaran pentingnya administrasi kependudukan bagi masyarakat	Kecamatan	Tercapai	Penyempurnaan	Kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan cukup tinggi	-	Input data dari setiap desa masih secara manual sehingga diperlukan aplikasi yang terintegrasi untuk merekam data yang terkait

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
H	H.1 JETIS JOSS (Jetis One Stop Service)	H.1a Meningkatnya tingkat IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) H.1b Meningkatnya pengajuan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang terlayani	Kecamatan	Tercapai	Penyempurnaan	1. Nilai IKM meningkat dari semester sebelumnya 2. Jumlah pengakses pelayanan meningkat, Hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2018 capaiannya 76% dan di tahun 2019 meningkat 8,66%	-	Modifikasi pelayanan dengan menambahkan inovasi berupa pelayanan nomor WhatsApp yang mudah diingat atau "nomor cantik"
I	I.1 Yan Perum (Layanan Antar KTP Sampai rumah)	I.1 KTP yang telah selesai dapat didistribusikan ke masyarakat sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP	Kecamatan	Tercapai	Pendayagunaan	Banyak warga yang merasa terbantu dengan pelayanan ini dan pelaksanaannya juga masih berjalan dengan rutin. Program ini juga termuat dalam artikel <i>website</i> Kecamatan Pundong sebagai berikut : https://kec-pundong.bantulkab.go.id/berita/2018/10/paparan-top-20-tim-juri-bilang-yan-perum-bagus	-	Belum ada inisiatif ke depannya, tetapi karena tidak dapat dilaksanakan pengantaran sehingga warga datang sendiri untuk mengambil KTP
J	J.1 Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	J.1 Masyarakat dapat melakukan pengurusan administrasi kependudukan secara mandiri	Kecamatan	Tercapai	Pendayagunaan	Antusias masyarakat cukup baik dengan adanya <i>reward</i> dari Pelayanan Umum di Kecamatan	-	Melakukan koordinasi dengan tim anggaran
K	K.1 Pemutakhiran Data Warga Miskin	K.1 Jumlah data BDT yang divalidasi	Desa	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	-	-
L	M.1 Sistem Informasi Desa dan Profile	L.1a. Jumlah data dan informasi yang di input ke Sistem Informasi Desa L.1b Jumlah mengakses Web Desa / Sistem Informasi Desa	Desa	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	-	-

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
M	M.1 PAGODA (Perekaman KTP-eL Plus Test Golongan Darah)	M.1 Elemen data golongan darah dalam wajib KTP sudah terisi semua	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai	Pendayagunaan	Elemen data golongan darah dalam wajib KTP hampir semua sudah terisi	-	-

B. Smart Branding

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Master Plan Pembangunan Gerbang Selamat Datang Kabupaten Bantul	A.1 Masterplan Pembangunan telah selesai disusun, dengan efek lain berupa gerbang selamat datang di Kabupaten Bantul yang telah dibangun dapat menambah fungsi lain sebagai outcome yaitu meningkatkan nilai estetika yang mendukung wajah Kabupaten Bantul sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat setempat hingga para pendatang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapai	Pendayagunaan	Dokumen Mastreplan Pembangunan Kabupaten Bantul di Kawasan Sedayu telah diselesaikan dan dapat ditelusuri hingga diunduh pada link (website) yang tertera berikut ini : https://bappeda.bantulkab.go.id/index.php/data/hal/0/4/33/108-perencanaan-masterplan-gerbang-kawasan-sedayu-kabupaten-bantul	-	-
B	B.1 Sosialisasi aplikasi Jelajah Bantul	B.1 Sosialisasi telah dilaksanakan dengan lebih mendekati kepada masyarakat	Dinas Pariwisata	Tercapai	Pendayagunaan	Sosialisasi sudah dilaksanakan dengan media digital yaitu via media sosial dan media massa sebagaimana seperti yang tercantum	-	Pemasangan iklan aplikasi Jelajah Bantul pada lokasi strategis dan berpotensi diamati oleh pendatang seperti pada

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
						pada beberapa contoh berikut ini: Facebook (https://www.facebook.com/diskukmpbantul/photos/yuuukkss-download-aplikasi-jelajah-bantul-untuk-mendapat-informasi-mengenai-bant/520094331751086/) , media massa republik (https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/22/p1ctf0368-info-destinasi-di-bantul-ada-di-aplikasi-jelajah-bantul)		videotron pada simpang jalan, pemasangan di kereta bandara, stasiun, bandara, terminal dan shelter transportasi umum, serta iklan di youtube dan instagram untuk menarik wisatawan generasi milenial, membuat channel youtube mengenai pariwisata di Kabupaten Bantul
C	C.1 Pembangunan TIC (Tourism Information Center) untuk memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan yang melewati obyek wisata pantai	C.1 Bangunan telah berdiri dan dimanfaatkan oleh wisatawan yang mengunjungi	Dinas Pariwisata	Tercapai	Pengembangan	Sudah dibangun di Pantai Parangkusumo sejak Bulan Juli tahun 2019, tetapi pengunjung masih rendah (53 pengunjung) karena kurangnya sosialisasi dan lokasi gedung yang jauh dari obyek wisata (melainkan dekat JJLS)	-	Pembangunan TIC perlu memperhatikan teori lokasi kebutuhan, dimana fungsi bangunan didekatkan dengan kebutuhan lingkungan sekitar, misalnya didekatkan pada lokasi gerbang utama masuk obyek wisata pantai. Namun, apabila TIC yang sudah terlanjur dibangun dapat dilakukan peningkatan kerjasama dengan perusahaan tour travel yang ada di DIY terutama Bantul untuk menjadikan salah satu obyek kunjungan wisatawan sebelum berkunjung ke obyek wisata pilihan. Selain itu juga dapat penambahan fungsi pelayanan ekonomi di sekitar bangunan TIC, misalnya seperti pasar ikan, sentra souvenir dari laut dan sebagainya sehingga

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
								meningkatkan daya tarik wisatawan.
D	D.1 Pembangunan SIM Data Kunjungan Obyek Wisata dan Desa Wisata	D.1 Jumlah data kunjungan obyek wisata dan desa wisata dan fasilitas wisata yang diinput ke dalam aplikasi SIM data kunjungan	Dinas Pariwisata	Tidak Tercapai	Pengembangan	SIM ini diperuntukkan untuk desa wisata, pelaku usaha sudah melakukan input data ke SIM Data. Sejak Desember 2019 sistem ini sudah selesai dikembangkan dan Bulan Maret 2020 memiliki rencana untuk dilakukan sosialisasi yang peruntukannya lebih ke pelaku usaha dalam membantu memberikan informasi mengenai data kunjungan wisata. SIM Data sudah tercantum pada website dinas pariwisata Kabupaten Bantul sebagai berikut : https://pariwisata.bantulkab.go.id/data/list/1/2/6-data-kunjungan-wisatawan	Pelatihan pengisian data belum diselenggarakan terkendala wabah Covid-19	SIM Data Kunjungan Obyek Wisata dan Desa Wisata dapat diintegrasikan pada aplikasi Jelajah Bantul, sehingga lebih efektif. Selain itu, untuk data yang harus diperbarui setiap hari dan diisikan oleh pengelola obyek wisata dan desa wisata dapat dilakukan pengisian melalui google form atau aplikasi Jelajah Bantul, sehingga aplikasi tersebut menjadi satu pintu untuk pengembangan wisata di Bantul
	D.2 Pelatihan pengisian data kunjungan obyek wisata dan desa wisata bagi para POKDARWIS (kelompok sadar wisata) dan pengelola desa wisata	D.2 Sudah dilakukan pelatihan berupa pengisian data kunjungan obyek wisata pada lebih dari 50% para POKDARWIS dan pengelola obyek wisata di Kabupaten Bantul	Dinas Pariwisata	Tidak Tercapai	Inisiasi	Rencana sudah dilaksanakan di bulan maret 2020 tapi dikarenakan adanya wabah sehingga sosialisasinya di undur.	Hambatan berupa wabah pandemik Covid -19 yang membuat sosialisasi dan pelatihan diundur	Menghubungi para POKDARWIS dan pengelola pariwisata yang datanya sudah dikumpulkan, lalu membuat pelatihan secara online dengan bekerjasama dengan perangkat desa sehingga sosialisasi dapat tetap dijalankan. Selain itu, juga dilakukan pembuatan pamflet atau poster yang dapat dibagikan ke desa wisata dan pengelola obyek wisata mengenai cara pengisian SIM Data.

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
E	E.1 Pengembangan SDM Desa Wisata dalam bentuk pelatihan bagi pemandu Outbond	F.1 Jumlah pemandu Outbond yang ikut pelatihan	Desa	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	-	-

C. Smart Economy

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Awas Dagadu (Pengawasan Perdagangan Terpadu)	A.1a Menurunnya barang - barang/produk yang beredar di pasaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. A.1b Konsumen terlindungi dari kemungkinan resiko gangguan kesehatan , dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa yang beredar	Dinas Perdagangan	Tercapai	Penyempurnaan	Telah menurunnya peredaran barang/produk dipasaran yang mengandung bahan berbahaya dalam makanan sehingga konsumen lebih terlindungi dari resiko gangguan kesehatan	-	Pengadaan test kit untuk pengecekan kandungan bahan berbahaya di setiap pasar tradisional
B	B.1 Sidak Malih (Sosialisasi Pedagang Kaki Lima Melalui Roadshow)	B.1 Sosialisasi Pedagang Kaki Lima	Dinas Perdagangan	Tercapai	Penyempurnaan	Terselenggaranya sosialisasi kepada para PKL sehingga PKL mengalami peningkatan omset/penghasilan dan <i>skill</i> dalam menjual dagangannya	-	Dilakukan pelatihan berkelanjutan terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL)

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
C	C.1 Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja	C.1 Terbangunnya Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak Tercapai	Inisiasi	Penempatan tenaga kerja baru sebatas melalui Job Fair dan mendatangi SMK	Kebanyakan mitra posisi yang ditawarkan adalah operator, padahal lowongan kerja yang dicari adalah orang yang memiliki <i>skill</i> lebih dari operator	Terbangunnya sistem informasi bursa tenaga kerja secara online sehingga mempermudah pencari kerja bertemu dengan pemberi kerja. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk mencari mitra untuk level tingkat nasional dan internasional.
D	D.1 PERAS HABIS (Koperasi Sahabat Si Miskin) merupakan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin di sekitar koperasi	D.1 Jumlah masyarakat miskin yang menerima pelatihan/ pendampingan kewirausahaan dan bantuan modal usaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian	Tidak Tercapai	Pendayagunaan	Progres Pencapaian Sampai dengan tahun 2019 terdapat 10 koperasi yang melaksanakan program. Namun karena kegiatan ini kurang efektif maka mulai Tahun 2020, anggaran pelatihan sudah tidak ada.	Koperasi merupakan badan usaha independen yang tidak dapat ditekan untuk mendampingi masyarakat melainkan sebatas dalam mensupport pelatihan menggunakan dana CSR, namun tidak memaksa untuk dapat melaksanakan program.	Peningkatan kepedulian koperasi pada masyarakat miskin di sekitar

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
E	E.1 Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	E.1 Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Kecamatan	Tidak Tercapai	Pendayagunaan	Sudah dilaksanakan program pelatihan kewirausahaan pada Tahun 2019 yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian.	Keterbatasan anggaran karena adanya rasionalisasi anggaran terkait COVID-19	Merencanakan ulang anggaran pelatihan untuk Tahun 2021 serta berkoordinasi dengan tim UMKM terkait perkembangan UMKM di wilayah kecamatan Kasihan
F	F.1 Peningkatan pelayanan masyarakat IUMK	F.1 Meningkatnya pelayanan masyarakat IUMK	Kecamatan	Tidak Tercapai	Pengembangan	-	Adanya pelayanan perizinan pada sistem OSS dan masyarakat dapat mengakses secara mandiri. Namun, pihak kecamatan belum terhubung dengan OSS yang membuat kesulitan dalam memvalidasi izin.	Perlu adanya sistem informasi yang dapat diakses oleh kecamatan untuk mengetahui OSS yang telah diakses mandiri oleh masyarakat
G	G.1 Pelatihan dan Pendampingan Industri Kreatif	G.1 Terlaksananya pelatihan dan pendampingan industri kreatif	Desa	Tercapai	Pendayagunaan	Tahun 2019 sudah dilaksanakan pengembangan tanaman Indogofera dan Tahun 2020 dilakukan pendampingan pada UMKM	-	Adanya kompetisi pemasaran dalam UMKM

D. Smart Living

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Pengembangan Web Layanan PU dengan menambahkan menu ALSANTI (Aplikasi Layanan Sanitasi Tinja)	A.1a Jumlah masyarakat yang mengajukan layanan sanitasi secara online A.1b Jumlah masyarakat yang mengakses web layanan PU khususnya layanan ALSANTI	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak Tercapai	Pengembangan	Tahap pembuatan formulir pengajuan di Web Layanan PU	Sarana dan Prasarana belum menunjang. Di dalam satu tahun terjadi beberapa pergantian SDM dalam pengawalan program juga (minimnya komunikasi).	Menyiapkan sarana dan prasarana
B	B.1 PASBATIK (Pasukan Anak Sekolah Pembasmi Jentik)	B.1a Jumlah ABJ (Angka Bebas Jentik) B.1b Jumlah siswa yang terlibat dalam program PASBATIK	Kecamatan	Tidak Tercapai	Pengembangan	1. Sudah terbentuk PASBATIK 2. Aksi sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali, di tahun 2018 relatif sudah ada aksi pada setiap sekolah	Terhenti karena sulit mensinkronisasi kan dengan kegiatan sekolah	Mengkomunikasikan kembali dengan pihak sekolah dan diadakan sosialisasi kembali
C	C.1 GALAMATRA (Garap Lahan Masyarakat Sejahtera)	C.1a Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program GALAMATRA C.1b Jumlah lahan terbengkalai yang telah tergarap dan beralih menjadi lebih bermanfaat	Kecamatan	Tidak Tercapai	Pengembangan	Sudah terlaksana sebanyak 19 titik lahan percontohan pada 4 desa.	Anggaran yang berkurang karena ada digunakan untuk kegiatan yang lain, sedangkan mata anggaran tidak spesifik menyebut	Merencanakan kembali untuk yang akan datang dengan mempertimbangkan sisi keberlanjutan

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
							kegiatan yang dimaksud. Selain itu pergantian perangkat kecamatan juga mempengaruhi.	
D	D.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	D.1a Jumlah paket PMT *Pemberian makanan tambahan) yang didistribusikan ke ibu dan anak D.1b Jumlah kader pendampingan pemberian PMT	Desa	Tercapai	Pendayagunaan	1. Tahun 2019 Pemberian PMT sebanyak 1.350 paket dengan nilai nominal @ Rp. 7.000 per paket, sedangkan pada Tahun 2020 pemberian makanan dalam bentuk matang dilakukan pada saat posyandu balita 2. Tahun 2019 terdapat 45 kader yang sudah diberikan honor	-	Jumlah peserta posyandu dipertahankan karena semakin berkurang
E	E.1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	E.1 Terlaksananya pemeriksaan bakteriologis untuk KK balita stunting	Desa	Tercapai	Pendayagunaan	Tahun 2019 sudah terlaksana pemeriksaan bakteriologis di PAB Tirta dan PAB Jalakan, sedangkan Tahun 2020 dilaksanakan uji sampel untuk KK dengan balita stunting	-	Uji sampling berbayar
F	F.1 Pembentukan Kader JBM (Jam Belajar Masyarakat)	F.1 Jumlah Kader JBM	Desa	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	-	-
G	G.1 Gelar Teknologi Tepat Guna	G.1 Jumlah kegiatan gelar teknologi tepat guna	Desa	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	-	-
H	H.1 Sistem Antrian Pendaftaran Pasien Online dan Anjungan	H.1 Pendaftaran pasien melalui APM ternyata banyak diminati masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah	Tercapai	Penyempurnaan	Pasien sudah terdistribusi melalui antrian melalui SMS, WA, APM dan datang langsung sesuai keinginan	-	Perlu sosialisasi ke masyarakat

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
	Pendaftaran Mandiri (APM)	terbukti di bulan April 2018 sudah mencapai 3.577 pasien (19,73%) dan pada bulan Mei 2018 mencapai 7.363 pasien (39,33%) dari total pasien di bulan tersebut. Prediksi bulan berikutnya pendaftaran pasien melalui APM akan lebih diminati masyarakat dengan prosentase yang semakin meningkat. Rata rata pendaftaran online tahun 2017 ada 1.866 pasien (2,76%) dan tahun 2018 bulan januari 2018 sampai bulan mei 2018 ada 4.285 pasien (4,74%)				masing-masing. Sistem antrian pendaftaran pasien online dan APM sudah terlaksana dengan baik. Pada tahun 2019 pengguna pendaftaran lewat sms sebanyak 522 orang (0,33%) WA sebanyak 3.863 orang (2,46%) APM sebanyak 66.360 orang (41,5%)		
I	I.1 WA - Tantri (Whatsapp Tanpa Antri)	I.1 Banyaknya pemohon yang menggunakan aplikasi, efisiensi waktu, pelayanan maksimal kepada masyarakat	Dinas Kesehatan	Tercapai	Pendayagunaan	Pemohon semakin mendapat kepastian untuk penerbitan izin dari sisi waktu karena pengiriman izin rekomendasi izin terbit dari aplikasi SIMPERPES terintegrasi dengan WA Tantri	-	-
J	J.1 Gropyok TBC	J.1 Dapat direplikasi di semua kecamatan, Dukungan jelas dan pendanaan tersedia, Dapat memanfaatkan anggaran dana desa, Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan, pengawasan minum obat oleh	Dinas Kesehatan	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	Semua puskesmas memiliki aspek prioritas permasalahan yang berbeda sehingga inovasi dan regulasi antar	-

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
		penderita TBC dapat terpantau.					Kecamatan berbeda	

E. Smart Society

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 E-Raport Sistem informasi manajemen penilaian pendidikan SMP berbasis web dan mengintegrasikan data manajemen pendidikan yang telah dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.	A.1 Implementasi E-Rapot di seluruh SMP se-Kabupaten Bantul	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Tercapai	Pendayagunaan	Masing-Masing sekolah belum mengupload data ke data dapodik Dinas pendidikan dan menginputkan ke E-rapot. Hasil E-rapot bisa dilihat setelah akhir semester karena memerlukan data nilai siswa dari awal semester hingga akhir semester. E-Raport telah dilaksanakan di 35 (Tiga Lima) SMP dari target 47 (empat puluh tujuh) SMP se-Kabupaten Bantul atau sekitar 74%	-	1). Penyusunan Regulasi E-Raport di Kabupaten Bantul; 2). Pelatihan SDM yang terlibat dalam E-Raport; 3). Perbaikan Sarpras untuk menjalankan E-Raport; 4). Sosialisasi Publik bagi siswa, orang tua dan para pengambil kebijakan
B	B.1 Pembinaan POKDARWIS (Kelompok sadar wisata)	B.1 Jumlah anggota POKDARWIS yang mengikuti sosialisasi	Kecamatan	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	Keterbatasan anggaran karena adanya rasionalisasi anggaran terkait COVID-19	-

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
C	C.1 Expo Fair	C.1 Terselenggaranya expo setiap kecamatan	Kecamatan	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	Expo kecamatan Tahun 2020 direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Juni. Rencananya expo akan menampilkan produk-produk UMKM, gelar budaya dan olahraga. Namun, kondisi yang tidak memungkinkan dan adanya rasionalisasi anggaran terkait COVID-19 kegiatan expo ditiadakan.	-
D	D.1 SIPP MAS (Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Perlindungan Masyarakat)	D.1 Tersedianya data dan informasi bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum yang akurat dan up to date, tersedianya ruang komunikasi dari kasi ketentraman dan ketertiban kecamatan ke Satpol PP Kabupaten Bantul atau sebaliknya.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Tercapai	Pengembangan	Sudah dilaksanakan sejak 2019	Kendala SDM petugas operator di tiap kecamatan, belum terkelolanya fungsi SIPP MAS	Diskominfo perlu mengakomodir dalam pengelolaan infrastruktur SIPP MAS

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
E	E.1 Pengembangan aplikasi IBRA (e-Library), merupakan layanan perpustakaan online perpusdabantul.id	E.1 Jumlah koleksi buku dan digital book (e-book) yang di input ke dalam aplikasi IBRA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tercapai	Pendayagunaan	Buku digital (Ebook) sudah bisa diakses melalui jaringan internet secara luas. Input data buku, koleksi akademik, dan ebook dilakukan setiap ada penambahan/pengadaan koleksi. Jumlah koleksi buku sebanyak 42.860 item dan 1921 item untuk digital book pada aplikasi IBRA. Selain itu layanan online perpustakaan keliling juga sudah berjalan sehingga masyarakat dapat meminjam dan mengembalikan buku melalui layanan tersebut. perpusda.bantulkab.go.id	-	Pengembangan fitur untuk pelayanan masyarakat, seperti penambahan fitur untuk usulan digital book yang diinginkan masyarakat, serta pengembangan fitur sesuai dengan kebutuhan pelayanan perpustakaan.

F. Smart Environment

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Gost Sampah	A.1a Jumlah timbulan sampah liar A.1b Jumlah pelaksanaan OTT Sampah A.1c Jumlah pelanggaran pembuangan sampah ilegal	Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai	Pendayagunaan	1) Jumlah timbulan sampah pada jalan dan TPS liar dari hasil survei pada 126 titik sebesar 1,89 ton/hari (Sumber: Kajian Preview Data Persampahan Tahun 2019). 2) Kegiatan operasi tangkap tangan	-	Lebih mematangkan koordinasi sehingga Pelaksanaan Kegiatan OTT dapat 100% dapat berhasil, mengingat pada Tahun 2019 beberapa Kegiatan OTT gagal dikarenakan

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
						<p>meliputi rapat koordinasi pelaksanaan OTT, pelaksanaan OTT dan juga kegiatan mengumpulkan babinsa dan babinkamtimas. Dalam rapat koordinasi dibahas calon lokasi pelaksanaan OTT, teknis pelaksanaan OTT dan sanksi yang akan diberikan apabila ada target yang tertangkap. Dalam rapat koordinasi mengundang unsur dari Polsek, Koramil, Bagian Hukum, Satpol PP, Kecamatan, Desa dan dari DLH. Pelaksanaan OTT dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan OTT juga melibatkan unsur dari Polsek, Koramil, Bagian Hukum, Satpol PP, Kecamatan, Desa dan dari DLH.</p> <p>3) Jumlah pelanggaran pembuangan sampah ilegal berjumlah sekitar 30 pelanggaran. Adapun proses dan pelaksanaan Kegiatan OTT adalah sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 8 Maret 2019 RR Adipura Rapat; Koordinasi Persiapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pelaku Pembuangan Sampah Liar 2. 28 Maret 2019 RR Adipura DLH Rapat; Koordinasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) 3. 30 Maret 2019 Jl. Bugisan, Tirtonirmolo, Kasihan; Pelaksanaan OTT Sampah di Jl. Bugisan, Tirtonirmolo, Pedukuhan Keloran, 		kurangnya koordinasi di lapangan.

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
						Kasihan 4. 2 April RR Adipura Rapat; Koordinasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) 5. 20 April 2019 di Dusun Priyan dan Bogoran Desa Trirenggo; Pelaksanaan OTT sampah di Dusun Priyan dan Bogoran Desa Trirenggo 6. 26 Juli 2019 RR Adipura; Rapat Koordinasi pelaksanaan OTT 7. 9 Agustus 2019 Kecamatan Srandakan; Pelaksanaan OTT Sampah di Jembatan Srandakan 8. 21 November 2019 RR Bid 1 DLH koordinasi rencana sosialisasi pelaksanaan OTT sampah di pasar 9. 22 November 2019 Pasar Angruksari sosialisasi pelaksanaan OTT sampah di Pasar Angruksari 10. 25 November 2019 Pasar Imogiri sosialisasi pelaksanaan OTT sampah di Pasar Imogiri 11. 26 November 2019 Pasar Pijenan sosialisasi pelaksanaan OTT sampah di Pasar Pijenan 12. 28 November 2019 Pasar Niten sosialisasi pelaksanaan OTT sampah di Pasar Niten 13. 29 November 2019 Pasar Bantul sosialisasi pelaksanaan OTT sampah di Pasar Bantul 14. 19 Desember 2019 Aula Mandala Karya Sidi Rapat koordinasi babinsa dan babinkamtibmas Saat OTT		

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
						dilakukan terjaring 2 pembuang sampah liar, namun 1 orang lepas. Pelanggaran belum diproses secara hukum		

Tabel 4. 20 Penilaian Program Kerja Jangka Panjang (5 Tahun)

A. Smart Governance

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Layanan Aplikasi Pajak BANTUL (LAPAK BANTUL)	A.1 Masyarakat mengetahui informasi objek pajak, data riwayat pembayaran, tagihan PBB dengan mudah dan jadwal mobil pelayanan pajak keliling yang dapat diakses oleh wajib pajak.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tercapai	Penyempurnaan	Aplikasi ini telah diunduh oleh 1000 lebih orang dan sudah diberikan ulasan oleh 31 orang sehingga menghasilkan nilai ulasan (<i>rating</i>) sebesar 4.3 dari 5. Aplikasi ini memberikan informasi riwayat pembayaran SPPT, informasi objek / wajib pajak, serta jadwal layanan bergerak (mobil pajak keliling) yang dapat diakses melalui aplikasi dengan mengunduh pada alamat website berikut ini : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lapakbantul&hl=en	-	Mengembangkan aplikasi yg berbasis iOS dan menambahkan informasi <i>history</i> pembayaran pada <i>database</i>

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
B	B.1 Sosialisasi aplikasi LAPAK BANTUL secara manual dan virtual melalui media massa dan media sosial	B.1 Bentuk konten informasi terdiri atas manual (kertas) dan virtual (video)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tercapai	Penyempurnaan	Terlaksananya sosialisasi LAPAK Bantul melalui via <i>online</i> seperti di media sosial, website pemerintahan dan media massa serta melalui konvensional sebagaimana yang tercantum pada beberapa link berikut ini : facebook (https://www.facebook.com/pajakbantul/posts/501883943857703), website pemerintahan (https://kec-sewon.bantulkab.go.id/hal/lapak-bantul-layanan-aplikasi-pajak-bantul), media massa (https://radarjogja.co/2018/12/10/lapak-bantul-sediakan-layanan-seperti-go-send/) dan sosialisasi konvensional (http://www.tribratanebantul.com/2018/12/sosialisasi-keliling-lapak-bantul-di.html?m=0)	-	Melaksanakan sosialisasi dengan lebih inovatif seperti melalui acara gerak jalan santai dan menyampaikan cara menggunakan aplikasi tersebut sehingga diharapkan masyarakat dapat mengunduh aplikasi LAPAK Bantul dan memanfaatkannya.
C	C.1 Nasi Putar (Perizinan dan Sistem Layanan Jemput Antar) untuk memudahkan pemohon izin yang tidak mempunyai banyak waktu dalam pengurusan izin serta meminimalisir piutang retribusi izin.	C.1 Jumlah pengajuan perizinan yang terlayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Tidak Tercapai	Inisiasi	Di Akhir Tahun 2019 sudah tidak ada piutang retribusi https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/berita/detail/255-nasiputar-masuk-dalam-top-20-inovasi-pelayanan-publik-kab-bantul	Karena sudah tidak ada piutang dalam retribusi	Dihentikan

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
D	D.1 E-Arsip - GETAR BAHANA (Gerakan Tertib Arsip Bantul Harmoni dan Akuntabel)	D.1 Jumlah masyarakat (termasuk ASN) yang terlibat dalam program GETAR BAHANA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tercapai	Pendayagunaan	52 Organisasi Perangkat Daerah, 27 Puskesmas, 75 Desa, BUMD, BUKP, Kemenag, PMI, Masyarakat umum, Mahasiswa, dan sekolah sudah mulai sadar akan pentingnya arsip baik arsip keluarga maupun arsip lembaga	-	Akan terus mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran mengenai arsip dengan cara gencar sosialisasi serta melakukan pendampingan pada masyarakat

B. Smart Economy

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 PEGANG KAKI BESAN (Penataan Pedagang Kaki Lima Berbasis Kawasan)	A.1 Terwujudnya kawasan sentra kuliner di setiap kecamatan pada Kabupaten Bantul; - Tidak terdapat konflik sosial saat dilakukan penataan antara PKL itu sendiri dengan pihak – pihak terkait; - Lahan PKL sebelumnya menjadi terlihat bersih dan lebih estetik; - Kawasan relokasi PKL yang baru menjadi ramai	Dinas Perdagangan	Tercapai	Pendayagunaan	Terbangunnya kawasan sentra kuliner di beberapa kecamatan, diantaranya adalah : Pusat Kuliner Taman Angkruksari Kretek, Taman Kuliner Imogiri (Karangtalun), Pusat Kuliner Imogiri (Lapangan Demi) dan Pusat Kuliner Baturetno (Banguntapan)	-	Dilakukannya pendataan PKL di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bantul, serta dilakukan pembangunan sentra kuliner berbasis kawasan di lokasi yang sudah ditentukan

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
		pengunjung dan tidak terdapat konflik sosial dengan pihak manapun.						
B	B.1 Aplikasi SIPADU (Sistem Informasi Pangan Terpadu)	B.1a Jumlah data ketahanan pangan, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, kesehatan hewan, kelautan dan perikanan yang di input ke dalam aplikasi SIPADU B.1b Jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi SIPADU	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	Belum ada anggaran untuk pengembangan sistem dan untuk SDM	-

C. Smart Living

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Cybernetics Tata Ruang	A.1 Tersedianya infrastruktur layanan informasi, tersedianya personel pengampu kontrol kualitas, informasi layanan tata ruang, terlaksananya operasionalisasi strategi cybernetics tata ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tercapai	Penyempurnaan	Kegiatan telah difokuskan kepada media layanan online yang berkaitan dengan website dinas. informasi yang disajikan meliputi data spasial sehingga ada sistem informasi di bidang penataan ruang yang mampu mengintegrasikan data/informasi sehingga semua informasi terkait penataan ruang dan lahan diketahui secara efektif dan cepat terutama terkait dengan keterkaitan antar jenis data.	-	Akan ada pengembangan sub domain berbasis Android

D. Smart Society

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 UPTD PPT KKPA Hotline 24 Jam	A.1 Penanggulangan korban kekerasan anak dan perempuan lebih cepat dan tertangani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tercapai	Pendayagunaan	Proses assement terhadap kebutuhan korban lebih cepat		

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
B	B.1 SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	B.1 pendataan dan pengelolaan fakir miskin serta penanganan pmks	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tercapai	Pengembangan	Penanganan fakir miskin dan pmks yang meliputi Bansos, ekonomi, kesehatan dan pendidikan terlayani	Aplikasi SIM Nangkis pendukung yang masih dalam pengembangan untuk bisa lintas sektor sampai tingkat desa	Pengembangan fitur Aplikasi SIM Nangkis
C	C.1 UPTD Kesejahteraan dan Puskesmas	C.1 Standar Pemenuhan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak Tercapai	Inisiasi	-	Keterbatasan anggaran karena adanya rasionalisasi anggaran terkait COVID-19	-

E. Smart Environment

No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
A	A.1 Susun Dokumen Lingkungan (SUDOKU)	A.1a Jumlah data dokumen lingkungan yang di input kedalam aplikasi SUDOKU A.1b Jumlah pelaku usaha yang mengajukan	Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai	Pendayagunaan	SUDOKU disesuaikan namanya menjadi Sistem Dokumen Lingkungan Hidup. Saat ini yang sudah berjalan adalah untuk penapisan dan penyusunan dokumen	-	Adanya regulasi baru dari pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dokumen yang sudah ada dengan regulasi baru

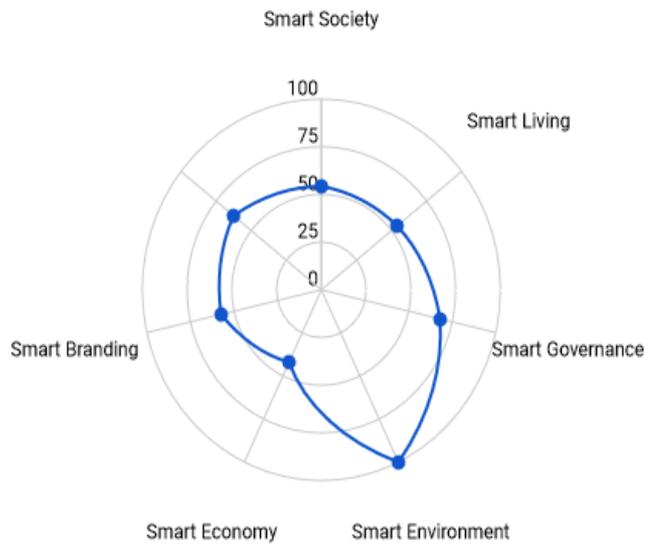
No	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Capaian Program Kerja (Tercapai / Tidak tercapai)	Tahapan Pencapaian	Progress Pencapaian	Alasan Proker belum tercapai dengan baik	Inisiatif Perbaikan
		permohonan dokumen lingkungan melalui aplikasi SUDOKU A.1c Jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi SUDOKU				lingkungan SPPL. Tahun ini direncanakan akan mengakomodasi penyusunan dokumen UKL/UPL. Adapun progress yang sudah dilaksanakan antara lain yaitu: 1) Jumlah data dokumen lingkungan (SPPL) yang diinput ke dalam aplikasi sebanyak 445,2) Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan dokumen lingkungan melalui aplikasi sebanyak 597. 3) Jumlah konten informasi yang dikemas secara virtual terdiri menu sistem doklh, menu peraturan-peraturan, form-form, kontak dan petunjuk pengisian Sistem Dokumen Lingkungan Hidup yang dapat diakses melalui link doklh.bantulkab.go.id		

4.5 Indeks Pemenuhan Dimensi Smart City

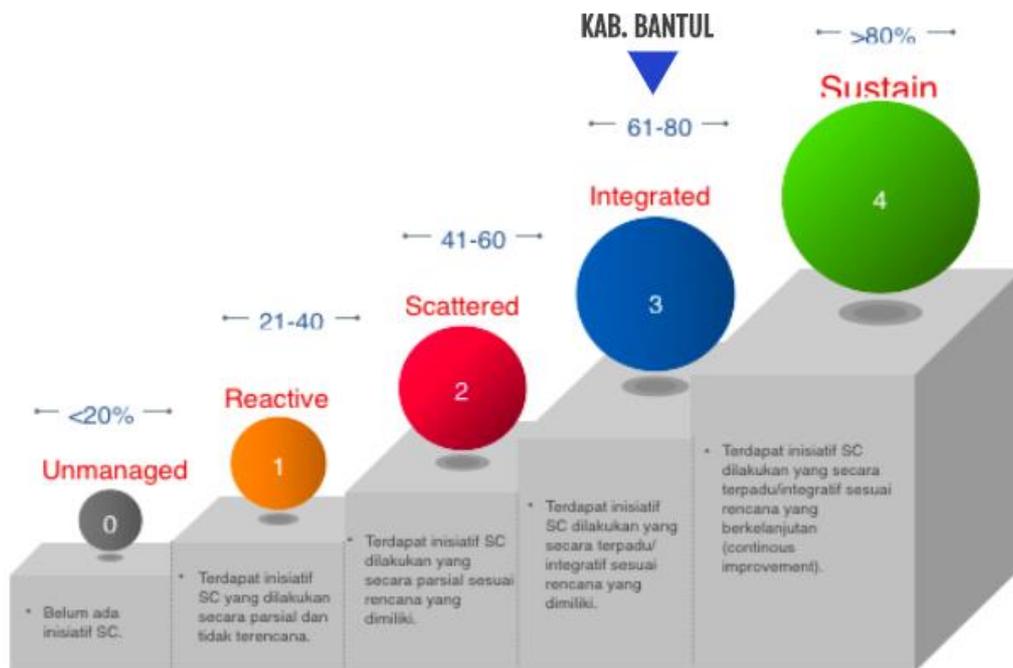
Tabel 4.21

Indeks Pemenuhan Dimensi Smart City

No	Dimensi SC	Bobot
1	Smart Society	54
2	Smart Living	54
3	Smart Governance	68
4	Smart Environment	100
5	Smart Economy	42
6	Smart Branding	57
Skor Total		62



Gambar 4.3 Smart City Maturity Kab. Bantul
Sumber: Data olahan, 2020



Gambar 4.4 Nilai Kematangan Smart City Bantul

Sumber: Data olahan, 2020

Berdasarkan hasil penilaian maka secara persentase pencapaian implementasi Smart City di Kabupaten Bantul berada di level 3 dengan persentase total 62%. Nilai ini didapat dari persentase total rata-rata pada 6 kluster utama dimensi Smart City dimana Smart Environment (100%), Smart Governance (68%), Smart Branding (57%), memberikan kontribusi tertinggi, sementara berturut-turut dengan nilai terendah adalah Smart Society (54%), Smart Living (54%) dan Smart Economy (42%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa **“Implementasi masterplan Smart City di Pemerintahan Kabupaten Bantul sudah mulai dicanangkan secara terpadu / integratif berdasarkan perencanaan yang telah disusun dan telah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pihak yang terlibat baik OPD, RSUD, dan Kelompok Masyarakat”**.



BAB V PENUTUP

5.1 Rekomendasi

1. Penyusunan program kerja Masterplan Smart City hendaknya dikoordinasikan dengan seluruh Unit Kerja/OPD dan Dewan Smart City Kabupaten Bantul sehingga meminimalisir adanya program kerja yang bersinggungan antar OPD
2. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam upaya untuk mengimplementasikan Smart City, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam merealisasikan program. Sehingga, kedepannya diperlukan pertemuan secara berkala untuk membahas setiap program yang diimplementasikan.
3. Secara keseluruhan, program kerja Smart City Kabupaten Bantul terkendala dengan adanya Pandemi COVID-19 sehingga perlu adanya re-alokasi anggaran Tahun 2021 untuk program kerja yang tertunda di Tahun 2020.
4. Dalam mengusulkan program kerja Smart City seyogyanya merupakan suatu program kerja yang inovatif dan kreatif untuk memecahkan permasalahan perkotaan yang ada.
5. Terkait dengan kendala implementasi Smart City Kabupaten Bantul beberapa OPD masih ditemukan minimnya kompetensi SDM yang menguasai, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi SDM.

5.2 Penutup

Laporan Review Masterplan Smart City Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023 merupakan dokumen analisis hasil evaluasi program kerja Masterplan dan usulan program baru sebagai pengembangan program kerja yang sudah ada. Selain itu, Review Masterplan Smart City dijadikan sebagai evaluasi dalam mengukur indeks pemenuhan dimensi Smart City di Kabupaten Bantul. Peta jalan pembangunan Smart City Kabupaten Bantul dibagi menjadi tiga bagian yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang disesuaikan dengan kondisi dan urgensi permasalahan di Kabupaten Bantul, sedangkan penilaian capaian program didapatkan dari hasil olah data seluruh OPD terkait dalam pelaksanaan program kerja Smart City dari Tahun 2018 – 2020. Laporan Review Masterplan Smart City ini sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Smart City yang berguna untuk mengidentifikasi sejauhmana progres capaian, indeks pemenuhan dimensi Smart City, sebagai bahan pertimbangan dan pengalaman di masa yang akan datang.